

**Analisa Pengeluaran
Publik Nusa Tenggara Timur**

**Analisa Pengeluaran
Publik Nusa Tenggara Timur**

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini disusun berdasarkan temuan-temuan utama dari kegiatan penelitian yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi NTT, sejumlah Perguruan Tinggi terkemuka di NTT, Bank Dunia dan AusAID-funded Australia-Nusa Tenggara Assistance for Regional Autonomy Program (ANTARA). Tim Peneliti NTT dipimpin oleh Frits O. Fanggidae dengan anggota yang terdiri dari Frankie J. Salean dan Melkianus Ndaomanu dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan Thomas Ola Langoday from Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, telah menyusun laporan garis besar penelitian (*overview report*). Sejumlah peneliti telah berkontribusi dan terlibat dalam penelitian-penelitian di tingkat kabupaten/kota lokasi studi kasus, antara lain:

Universitas Negeri Nusa Cendana: Jeny Eoh, Dian Nastiti, Jacob Wadu, William Djani, Piet de Rosari, Markus Bunga, Dominikus Fernandez, Agustinus Mahur, Alo Liliweri, Melkianus Tiro, Oktovianus Nawa Pau, Hironimus Jati.

Universitas Katolik Widya Mandira: Sabinus Hatul, Veronica Arief Mulyani Kantus Rere Paulina Bibiana, Vincentius Repu, Heny A. Manafe, Antonius Ugak, Yolinda Yanti Sonbay.

Universitas Kristen Artha Wacana: Jusuf Aboladaka, Nitaniel Hendrik, Liven E. Rofael, Damaris Yvette Koli.

Yayasan PIKUL: Juliana S. Ndolu, Desti Murdijana, Martha D. Pengko.

Yayasan Mitra Kita: Darmanto F Kisse, Richardus Adven Dhada (Manggarai).

STIE KRISWINA: Stepanus Makambombu, Muana Nanga.

Universitas Timor: Sirilus Seran.

Universitas Nusa Lontar: C. Selfina Jamin, Roliviyanti J.

Dukungan Bank Dunia dipimpin oleh Bastian Zaini dan Diane Zhang bersama-sama dengan Adrianus Hendrawan, Muhammad Ryan Sanjaya, Sukmawah Yuningsih, Ihsan Haerudin, John Theodore Weohau, dan Akhmad Bayhaqi. Sementara itu, Yohanes Eripto Marviandi dan Tim ANTARA memberikan dukungan operasional, koordinasi lapangan dan fasilitasi yang sangat berharga bagi pelaksanaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan pada Ihsan Djunaed, Victoria Ngantung, Mila Shwaiko dan Robert Brink dari Kantor BaKTI serta John Schottler dari ANTARA, atas dukungannya terutama di bidang *setting* dan *layout* serta penerbitan buku ini. Selama proses pengkajian ulang, sejumlah komentar yang berharga telah diberikan oleh Cut Dian Agustina, Enrique Blanco Armas, David Elmaleh, dan Peter Milne dari kantor Bank Dunia.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada seluruh dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang telah terlibat aktif dan pengumpulan data dan analisa. Akhirnya, penghargaan yang tinggi patut diberikan kepada *Program Management Committee* (PMC), yang terdiri dari Jamin Habid (Ketua), Partini Hardjokusomo, Benny. R. Ndoenboey, Jan Ch. Benyamin, Paula Radja Haba, Andreas W. Koreh, Nikolaus Hayong, Ruth Lodo, Tarsisius Kopong Pira, Julius Muhu, John Pama, Yaan Tanaem, Yakobus Taek, Frans Salesman dan Jefri C. Adoe.

Wolfgang Fengler, Petarca Karetji dan Richard Manning telah mengarahkan seluruh proses penelitian ini.

KATA PENGANTAR



Dengan senang hati saya umumkan peluncuran *Analisa Pengeluaran Publik Nusa Tenggara Timur*, sebuah laporan komprehensif menyangkut isu-isu manajemen keuangan publik dalam konteks otonomi daerah.

Ada banyak pembelajaran dari laporan ini yang akan membantu kita dalam melaksanakan pelayanan yang lebih baik kepada rakyat, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan dimana kita telah berkomitmen untuk meningkatkan rencana pembangunan jangka menengah. Kita telah bertekad untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan-layanan dasar dimaksud. Kedepan, kita masih menghadapi tantangan besar, dimana tingkat kemiskinan menyebar pada area geografis yang luas yang terbentuk atas beragam kepulauan. Tetapi kita siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan apa yang kita pelajari dari laporan ini akan membantu kita menanggapi tantangan tersebut.

Ada tiga elemen utama yang perlu untuk meningkatkan kinerja kita. Yang pertama, kita membutuhkan satu visi bersama yang kuat untuk merespon kebutuhan rakyat. Kita perlu menyepakati kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan dan sepakat akan target-target yang realistis yang diperlukan setiap tahun. Visi kita berbasis kinerja dan kita perlu membuat indikator-indikator untuk mengelola dan mengukur hasil-hasil.

Kedua, kita perlu meningkatkan kapasitas birokrasi kita sehingga memiliki kemampuan/ketrampilan dan sarana yang benar untuk mencapai hasil-hasil tersebut. Kita akan mengembangkan suatu program peningkatan kapasitas yang mengarah pada isu-isu yang diidentifikasi dalam laporan ini.

Ketiga, kita perlu mempunyai sumber-sumber dana untuk mencapai target-target kita. Ini berarti bahwa kita perlu lebih cerdas dalam merencanakan, menyusun anggaran dan memonitor pekerjaan kita. Laporan ini merupakan salah satu alat yang membantu kita mengalokasikan sumberdaya yang ada secara lebih efektif.

Laporan ini adalah salah satu sarana yang memungkinkan kita untuk dapat melihat kondisi perencanaan anggaran daerah kita sebelumnya serta mengambil langkah yang tepat dalam menuju paradigma Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (**Anggur Merah**) sesuai dengan Visi, Misi, Strategi dan arah kebijakan Pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur selama lima tahun kedepan.

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu 2003 sampai 2007 meningkat secara signifikan. Kecuali pada tahun 2003 – 2004 terjadi penurunan. Selama periode 2003-2007, terjadi peningkatan belanja daerah sebesar 66,03 persen dari 46,34 persen pada empat tahun sebelumnya, peningkatan terutama pada sektor pendidikan (25,21 %), kesehatan dan infrastruktur. Peningkatan ini terjadi terutama karena adanya dukungan sumber dana dari pemerintah pusat melalui dana dekonsentrasi, dana perimbangan (DAU dan DAK) dalam jumlah yang cukup besar setiap tahunnya.

Pemerintah provinsi berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan laporan ini merupakan suatu milestone penting yang sudah berjalan. Tetapi penting dicatat bahwa laporan tersebut tidak melambangkan akhir dari suatu proses, tetapi sebagai titik awal dalam menanggapi/mengatasi tantangan-tantangan yang kami hadapi demi masa depan Nusa Tenggara Timur yang lebih cerah.

Laporan ini dibuat atas kerja keras dari banyak orang. Saya berterima kasih kepada AusAID dan Tim ANTARA, serta Bank Dunia dan Decentralization Support Facility for Eastern Indonesia (SOFEI) atas dukungan dan partisipasi mereka. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan saya kepada para peneliti dari berbagai perguruan tinggi di provinsi NTT dan untuk fasilitasi dari Bappeda, baik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, karena tanpa dukungan mereka, laporan ini tidak mungkin bisa diselesaikan.

Berdasarkan rekomendasi-rekomendasi dari laporan ini, saya mengundang semua pihak yang tertarik untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan tindak lanjut, sehingga Nusa Tenggara Timur dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Indonesia untuk manajemen keuangan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Kupang, 9 September 2008

Drs. FRANS LEBU RAYA
Gubernur Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR



Australian Embassy
Indonesia

Pada pertengahan tahun lalu, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur meminta dukungan dari program ANTARA AusAID dan World Bank untuk melakukan Analisa Pengeluaran Publik terhadap provinsi dan kabupaten-kabupaten. Laporan ini merupakan puncak dari kerja keras sejak permintaan tersebut.

Analisa pengeluaran ini merupakan contoh yang sangat baik dari upaya pemerintah untuk melayani masyarakat secara lebih baik melalui peningkatan manajemen keuangan publik dan melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat miskin dan kurang beruntung. Tidak mudah bagi suatu pemerintahan untuk mengekspos keuangannya yang diteliti secara cermat demi meningkatkan efisiensi dan menjamin dana tersebut dikeluarkan secara efektif. Juga menyentuh melihat pemerintah provinsi dan kabupaten berantusias dan berkomitmen terhadap kegiatan ini yang ditunjukkan melalui kontribusi yang nyata terhadap prakarsa melalui ketersediaan anggaran dan waktu dari staf. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) dan jajarannya atas dukungan yang sangat kuat dan tanpa ragu terhadap proses ini.

Saya menyampaikan penghargaan kepada universitas-universitas di NTT atas kerja keras mereka dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Proyek ini benar-benar menunjukkan bagaimana kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan universitas yang telah memberikan hasil. Ini merupakan contoh dari suatu kemitraan yang berlangsung dan memberikan suatu model untuk wilayah lainnya. Laporan ini telah menggunakan pembelajaran dari provinsi lain termasuk Papua, Gorontalo, Aceh dan Nias untuk meningkatkan hasil akhir laporan. Tak ketinggalan, analisa pengeluaran Nusa Tenggara Timur mempunyai fokus gender yang menyoroti pentingnya data terpilah menurut jenis kelamin untuk perencanaan dan penyusunan anggaran yang efektif.

Tingkat kolaborasi antar lembaga-lembaga yang beragam antar pemerintah di tingkat provinsi dengan lembaga akademis, Bank Dunia dan AusAID merupakan suatu dasar yang sangat menjanjikan. Dengan kemauan yang baik kita dapat bekerja bersama-sama dalam suatu semangat kemitraan demi masa depan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang lebih cerah.

Harapan saya, semua tingkat pemerintahan mempunyai masa depan yang baik dengan menggunakan informasi dari laporan ini untuk memandu proses perencanaan dan penyusunan anggaran mereka. Saya juga ingin agar kesediaan pemerintah Australia untuk melanjutkan hubungan (melalui ANTARA) dengan pemerintah NTT untuk mendukung dalam peningkatan kapasitas demi terlaksananya perencanaan dan penyusunan anggaran yang baik.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada penulis atas upaya kolaborasi dan kerja yang bermutu dalam memfasilitasi proses dan menghasilkan satu laporan tepat waktu.

September 2008

Bill Farmer
Australian Ambassador to Indonesia

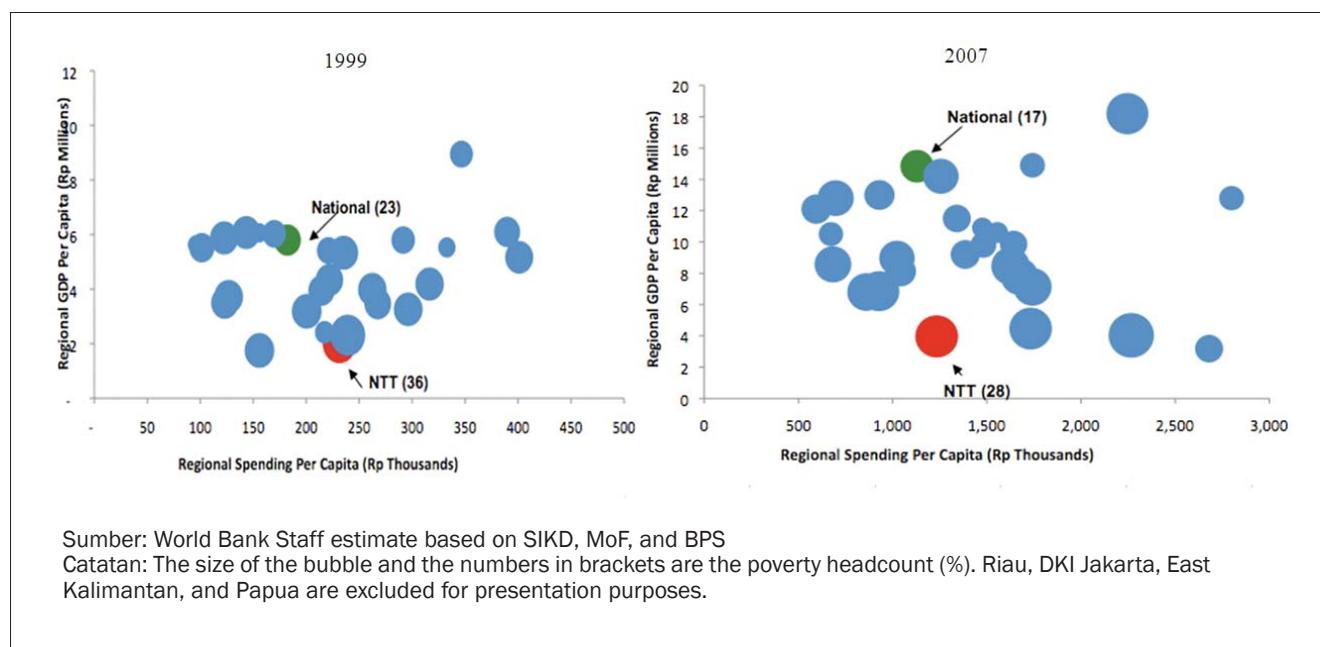
RINGKASAN EKSEKUTIF

Setelah mengalami peningkatan sumber daya fiskal yang signifikan pasca desentralisasi, NTT masih menghadapi sejumlah tantangan beberapa tahun ke depan. Sebelum penerapan desentralisasi pada tahun 2001, lebih dari sepertiga populasi NTT dikategorikan miskin, menjadikan propinsi ini sebagai salah satu yang termiskin di Indonesia.

Dibanding propinsi lain, sumber daya fiskal per kapita NTT masih relatif kecil. Terlepas dari keterbatasan ini, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota di NTT berhasil memperbaiki komposisi pengeluaran pemerintah dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Meski demikian, perbaikan tersebut harus dapat direfleksikan pada peningkatan kualitas layanan publik dan kapasitas perekonomian. Tantangan ini terasa makin berat mengingat sumber daya fiskal riil propinsi NTT akan menurun di masa datang.

NTT menghadapi serangkaian tantangan ekonomi. Selain tingkat kemiskinan yang tinggi dan skala perekonomian yang kecil, NTT juga memiliki tingkat pengangguran dan harga yang tinggi. Tingkat harga di NTT lebih tinggi dari rata-rata nasional, yang bersumber dari kenaikan harga komoditas dan biaya transportasi. Tantangan ekonomi lain yang cukup signifikan berasal dari keterpencilan geografis dan iklim semi-arid. Bentang kepulauan di NTT juga membuat akses dan transportasi menjadi isu penting.

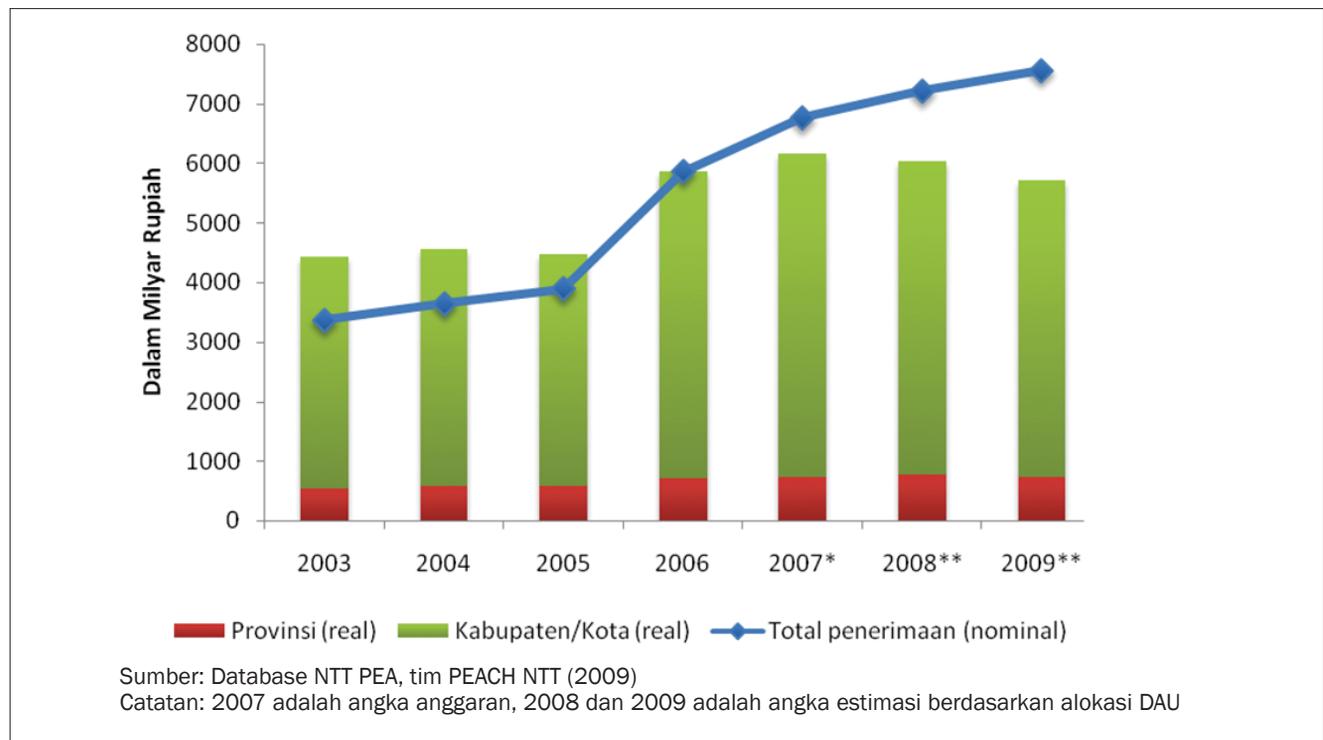
NTT adalah propinsi yang tertinggal, baik sebelum maupun setelah desentralisasi



Pendapatan

NTT menghadapi penurunan sumber daya fiskal. Propinsi ini memperoleh peningkatan yang besar pada sumber daya fiskalnya, baik secara nominal maupun riil, melalui transfer pemerintah pusat. Terutama pada tahun 2005 ketika keuntungan naiknya harga minyak dan pengurangan subsidi didistribusikan ke pemerintah daerah. Setelah mencapai puncaknya pada tahun 2007, sumber daya fiskal NTT diproyeksikan akan menurun secara riil walaupun secara nominal nilainya meningkat.

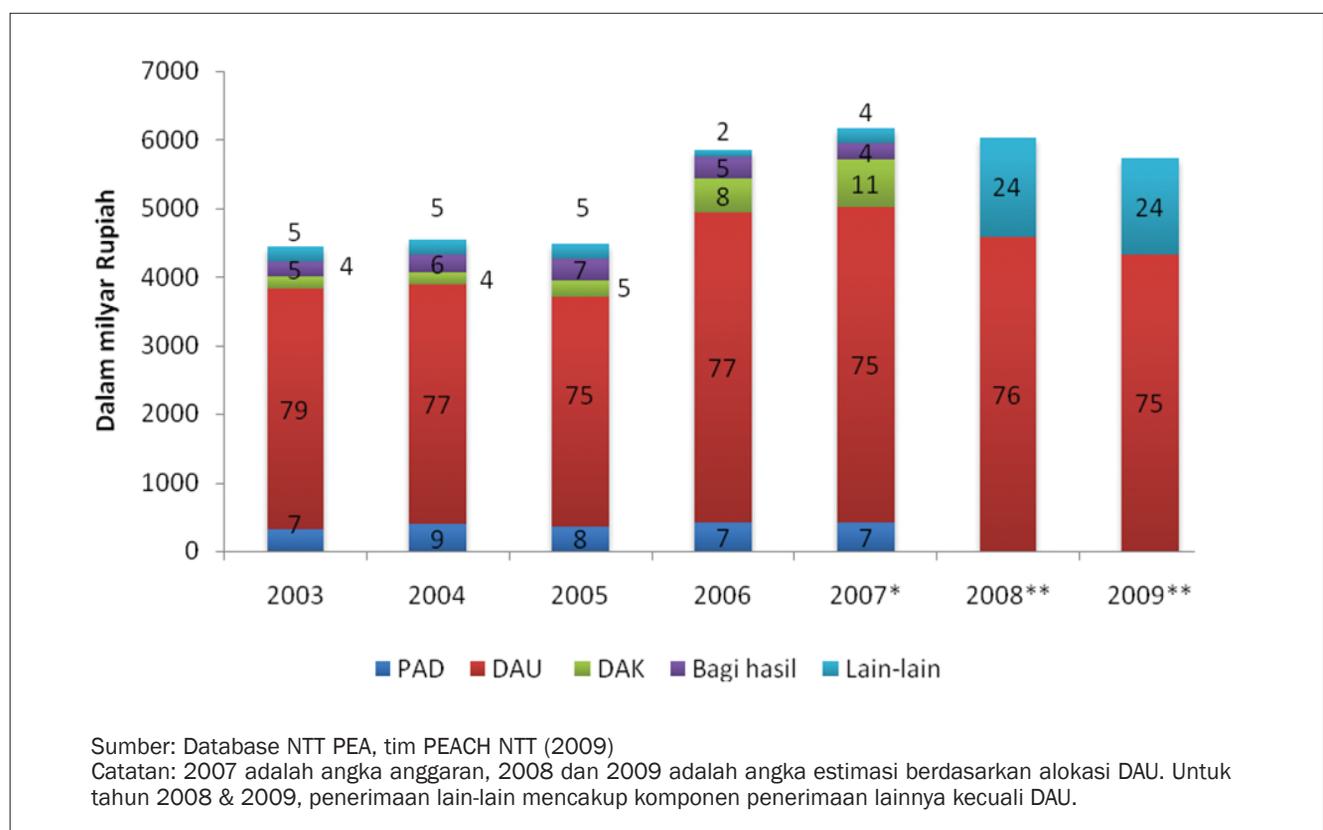
Pendapatan daerah secara nominal terus meningkat walaupun secara riil nilainya terus turun sejak 2007



Melebihi daerah lain di Indonesia, NTT sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat.

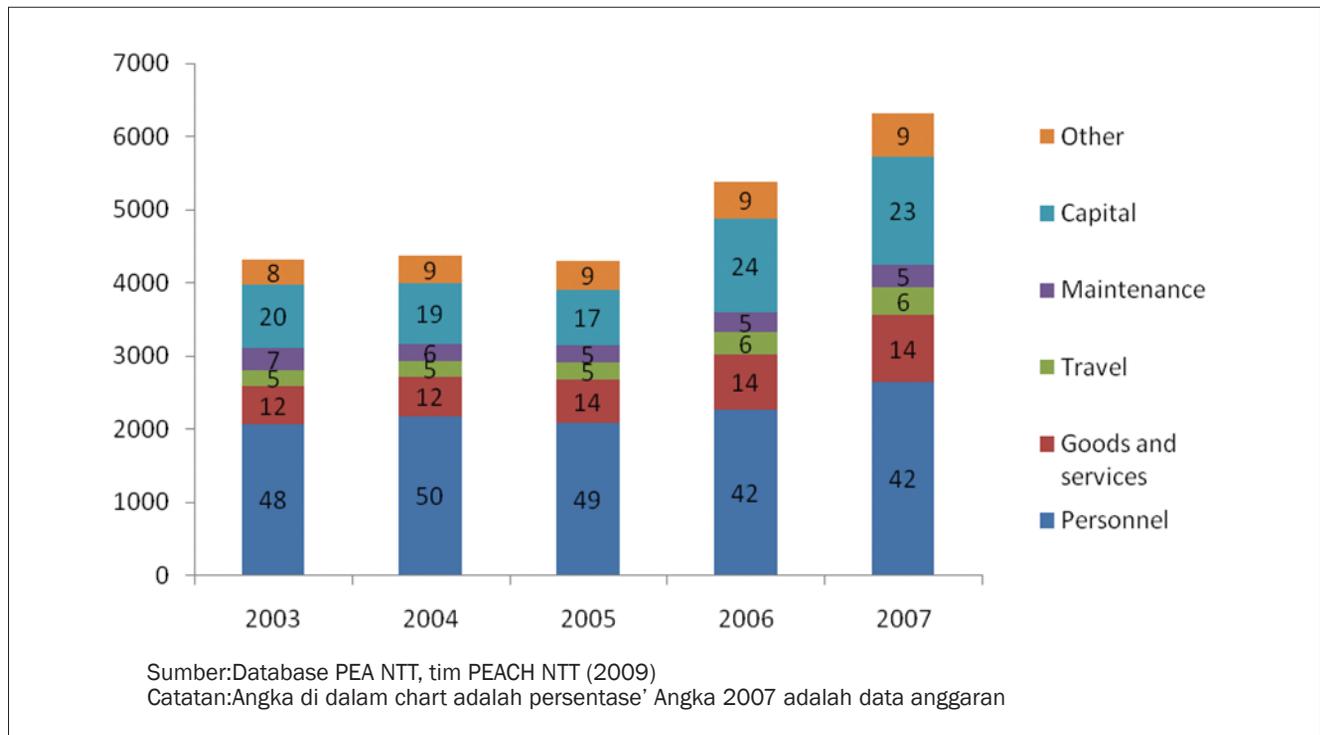
Kapasitas perekonomian NTT dan iklim semi-aridnya membatasi kapasitas propinsi untuk meningkatkan penerimaan daerahnya. Perekonomian NTT relatif belum berkembang dan sumber daya alam sangat sedikit. Hal ini terlihat dari meningkatnya ketergantungan NTT pada transfer DAU dan DAK. Komposisinya pada penerimaan propinsi meningkat dari 83 persen di tahun 2003 menjadi 86 persen di tahun 2007. Pendapatan asli daerah, meskipun meningkat juga, masih kecil kontribusinya pada anggaran.

Ketergantungan pada transfer pusat meningkat antara 2003-07

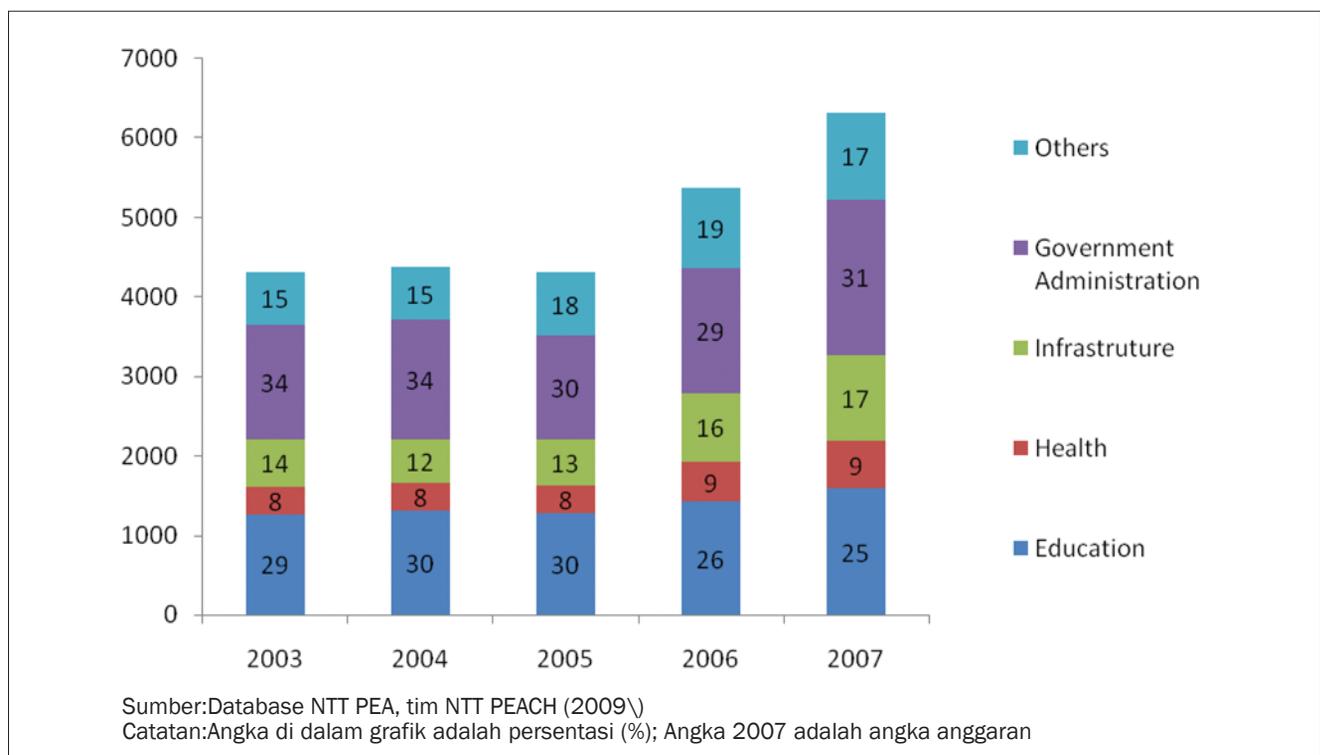


Meskipun sumber daya fiskalnya terbatas, NTT berhasil memperbaiki komposisi pengeluarannya pada kurun 2003-2007. Ini terlihat tidak hanya dari berkurangnya belanja pegawai, tetapi juga pada berkurangnya belanja administrasi umum. Di saat yang bersamaan pengeluaran publik di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap stabil dan dalam beberapa kasus, meningkat. Terlepas dari sejumlah perbaikan di atas, belanja pegawai dan belanja administrasi umum masih merupakan komponen pengeluaran terbesar.

Pengeluaran gaji menghabiskan hampir setengah dari total pengeluaran pemerintah daerah di NTT



Sekitar 30% dari total pengeluaran digunakan untuk administrasi pemerintahan



Belanja pada sektor-sektor strategis

Pendidikan: walaupun kemajuan dalam belanjanya membuat pendidikan semakin mudah diakses, dampaknya pada indikator capaian masih kecil. Peningkatan yang konsisten pada belanja pendidikan di NTT tercermin dari perbaikan akses pada sekolah dan guru. Meski demikian, indikator pendidikan secara umum tetap tidak terpengaruh dari kondisi ini. Hampir tiga dari empat orang di NTT tidak menyelesaikan sekolahnya, dan angka partisipasi murni pendidikan menengah masih lebih rendah dari rata-rata nasional. Salah satu penyebabnya adalah kekurangmampuan orangtua dalam membiayai pendidikan.

Kesehatan: mayoritas belanja sektor kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan. Jumlah rumah tangga di NTT yang memiliki akses pada layanan kesehatan gratis kini melebihi propinsi tetangganya dan rata-rata nasional. Sayangnya, perbaikan akses ini belum dapat diikuti oleh perbaikan indikator kesehatan. Sebagai contoh, penderita gizi buruk di NTT masih lebih banyak dibanding propinsi-propinsi lainnya. Hal ini berdampak serius bagi permasalahan kesehatan yang lebih luas dan tingkat kematian yang lebih tinggi. Memperbaiki indikator-indikator kesehatan membutuhkan usaha berkelanjutan yang didukung pemerintah, tidak hanya dalam meningkatkan akses tapi juga kualitasnya.

Infrastruktur: kinerja sektor ini di NTT masih beragam. Akses kepada sanitasi di NTT relatif lebih tinggi dibanding propinsi tetangganya dan rata-rata nasional, sementara akses ke air bersih dan listrik masih lebih rendah. Karena itu, pemerintah daerah telah meningkatkan jumlah dan proporsi pengeluaran untuk infrastruktur, dengan proporsi pengeluaran saat ini dialokasikan untuk belanja modal, terutama untuk meningkatkan akses ke fasilitas infrastruktur.

Perencanaan, perundang-undangan, dan kelembagaan.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran saat ini telah menggunakan aturan-aturan terbaru namun perbaikan dalam proses penganggaran masih dibutuhkan. Walaupun dokumen terkait perencanaan telah menjadi prioritas, panduan dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang. Realisasi anggaran masih belum optimal, dilihat dari kenyataan bahwa pencairan dana proyek dan aktifitas yang bersumber dari belanja modal masih dilakukan menjelang akhir tahun fiskal.

Seperti halnya di daerah lain, pemerintah daerah di NTT berusaha untuk mengikuti perubahan-perubahan aturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan baru menuntut proses pembelajaran dan adaptasi, terutama di daerah-daerah yang kapasitas aparat pengelola keuangannya masih rendah. Tantangannya tidak hanya terletak pada mentransformasi peraturan baru pemerintah pusat menjadi peraturan pemerintah daerah, tapi juga mengimplementasikannya dengan sukses.

Gender dan tantangan pembangunan daerah

Pendekatan menyeluruh pada persoalan gender diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Meskipun analisis soal isu jender banyak ditemukan, rekomendasi-rekomendasinya masih harus diadaptasi dalam program dan kegiatan. Ini kemungkinan dikarenakan isu jender belum menjadi prioritas utama di daerah atau disebabkan ketersediaan data yang tidak memadai, khususnya menyangkut data anggaran.

Kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran adalah tantangan pembangunan utama yang akan dihadapi. Pemerintah Propinsi NTT berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya. Namun beberapa tahun belakangan pengentasan kemiskinan relatif stagnan dan di beberapa kasus hanya sedikit membaik. Kemiskinan juga berpengaruh pada masalah ketahanan pangan yang mendera NTT lebih dari propinsi lain, ini masih juga terhambat oleh faktor iklim semi-arid NTT dan keterpencilannya. Terkait pengangguran, kecilnya skala perekonomian membatasi ketersediaan lapangan kerja.

Tantangan ke depan

Untuk memperkuat kondisi fiskal daerah, peningkatan kapasitas pendapatan harus menjadi kebijakan strategis pemerintah. Langkah-langkah kongkrit dibutuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan penurunan sumber daya fiskal, terutama dengan memanfaatkan sumber daya sendiri. Usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terkait dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan pelayanan publik. Sejalan dengan membaiknya perekonomian masyarakat, kapasitas perekonomian lokal untuk menutup biaya layanan publik berkualitas pun meningkat.

Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah sebagai pendukung perbaikan di komposisi pengeluaran. Efektifitas pengeluaran publik dapat ditingkatkan dengan memperbaiki kualitas aparat yang terlibat dalam perencanaan agar anggaran yang dihasilkan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah; serta memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

NTT sebaiknya fokus pada kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran sektor pendidikan dan kesehatan NTT saat ini menitikberatkan pada peningkatan akses. Namun, data menunjukkan akses pada pendidikan dan kesehatan tidak mampu meningkatkan indikator capaian pada kedua sektor secara signifikan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas layanannya dan berkeinginan untuk meraih capaian positif.

Meningkatkan akses ke air bersih dan listrik. Air bersih dan listrik adalah permasalahan penting di propinsi kepulauan dengan iklim semi-arid. Pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota perlu berkoordinasi untuk mencari solusi persoalan akses pada air bersih dan listrik, terutama solusi yang terkait erat dengan kebutuhan spesifik NTT.

Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota harus meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran harus dilengkapi dengan indikator yang terukur dan realistis sebagai sebuah standar baku. Proses penganggaran yang tepat waktu akan berpengaruh pada kualitasnya. Pada saat yang sama, pemerintah daerah harus mengantisipasi perubahan pada proses pengelolaan dan prosedur keuangan daerah melalui peningkatan kapasitas aparatnya. Ini mencakup mengadaptasi kemudian menterjemahkan peraturan pusat kepada peraturan daerah, terakhir mengimplementasikan dengan baik aturan-aturan tersebut di tingkat lokal.

Pengarusutamaan jender membutuhkan komitmen yang besar dari pemerintah daerah di NTT. Meskipun jender sudah diidentifikasi sebagai salah satu fokus permasalahan di NTT, isu tersebut belum dicantumkan secara eksplisit dalam dokumen perencanaan. Lebih lanjut, indikator isu jender perlu diidentifikasi dan disepakati oleh berbagai dinas atau pihak di pemerintahan daerah. Selanjutnya, ketersediaan data yang lebih detail juga diperlukan untuk menganalisa lebih tajam persoalan jender.

NTT membutuhkan analisis dan evaluasi menyeluruh terhadap program dan pengeluaran untuk pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengangguran. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan efektifitas dan manfaat pengeluaran, juga memberi masukan untuk perbaikan ke depannya.

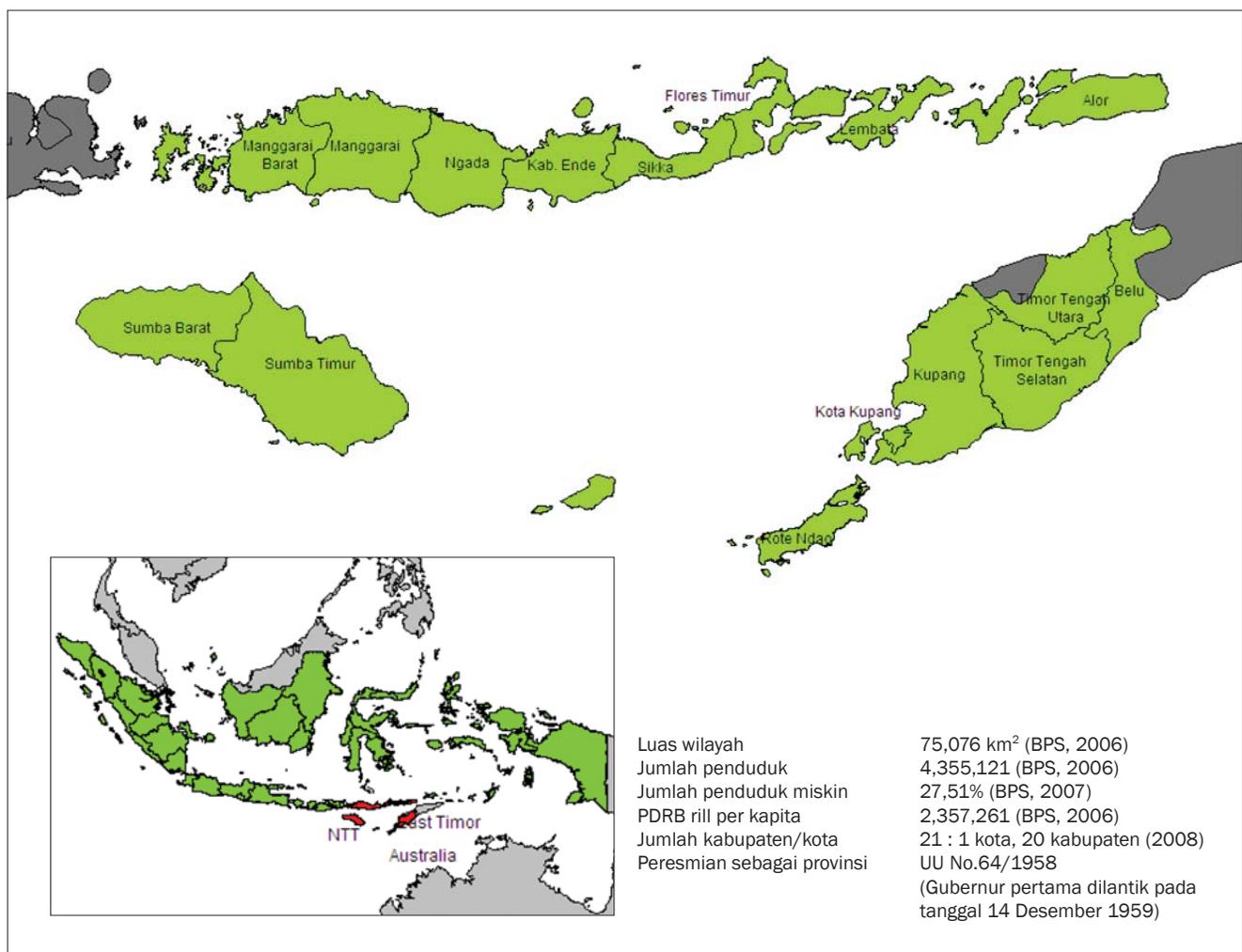
1

Pendahuluan

Latar Belakang

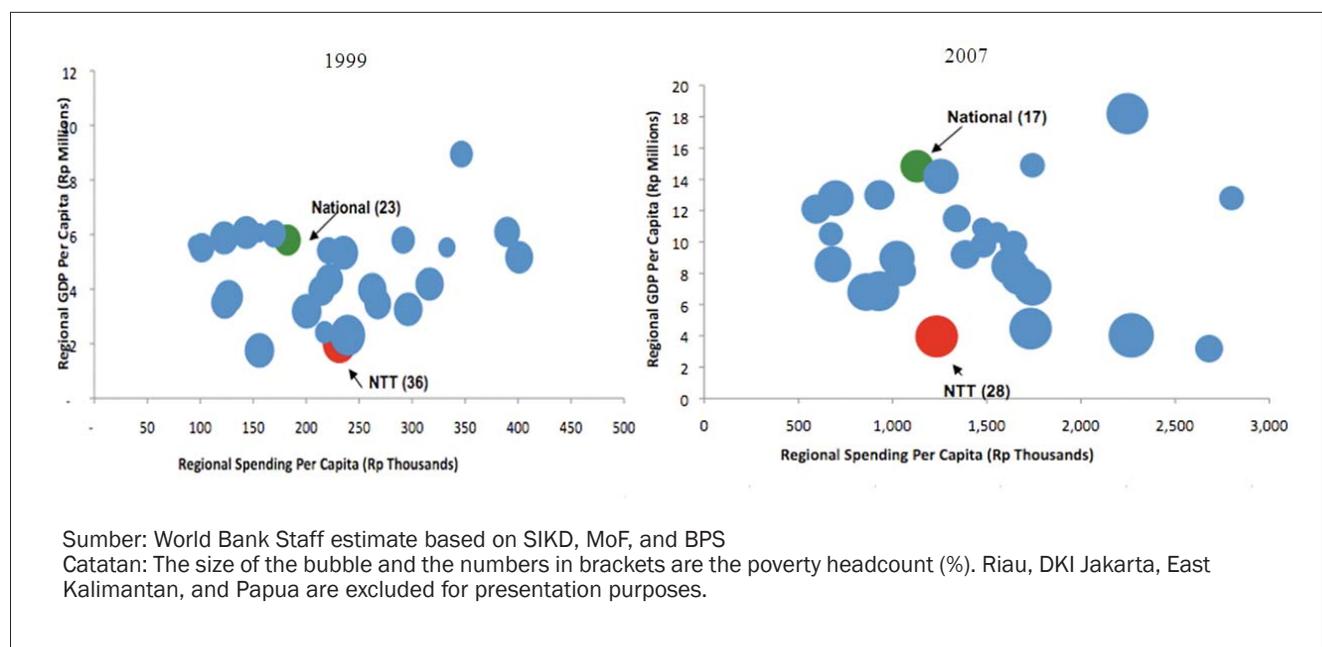
Sebelum pelaksanaan desentralisasi, lebih dari sepertiga penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) digolongkan sebagai penduduk miskin. Hal ini menjadikan NTT (bersama Papua dan Maluku) sebagai wilayah paling miskin di Indonesia. Tantangan lain yang juga dihadapi NTT adalah rendahnya kapasitas fiskal. Meskipun pengeluaran perkapita NTT (meliputi baik pengeluaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat) berada pada tingkat menengah, dalam perbandingan dengan provinsi lain di Indonesia, PDRB perkapita NTT adalah yang paling rendah di Indonesia (Gambar 2).

GAMBAR 1. Sekilas informasi tentang NTT



Sumba Barat dan Sumba Timur tercatat sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbesar dan Kota Kupang berpenduduk miskin paling kecil. Kemiskinan diukur berdasarkan garis kemiskinan. Per definisi, garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan yang dibutuhkan seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan yang layak. Berdasarkan perhitungan BPS, kebutuhan hidup minimum selama sebulan untuk mempertahankan kehidupan yang layak (*requirement of competent life*) di NTT sebesar Rp. 670.560; sedangkan pengeluaran per kapita per bulan di NTT Rp. 128,200. Angka ini memperlihatkan bahwa pengeluaran per kapita per bulan di NTT masih jauh dari kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Dilihat dari perbedaan persentase penduduk miskin antar kabupaten/kota di NTT, tampaknya terdapat perbedaan atau ketimpangan yang cukup menyolok. Flores Timur dengan sumberdaya alam (ekonomi) yang relatif terbatas, memiliki persentase kemiskinan yang rendah, sementara itu Sumba Barat dan Manggarai dengan sumberdaya alam (ekonomi) yang relatif lebih baik, memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Dari sisi ini, tampaknya kemiskinan antara lain berkaitan erat dengan kemampuan masing-masing pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sumberdaya alam (ekonomi) yang dimiliki.

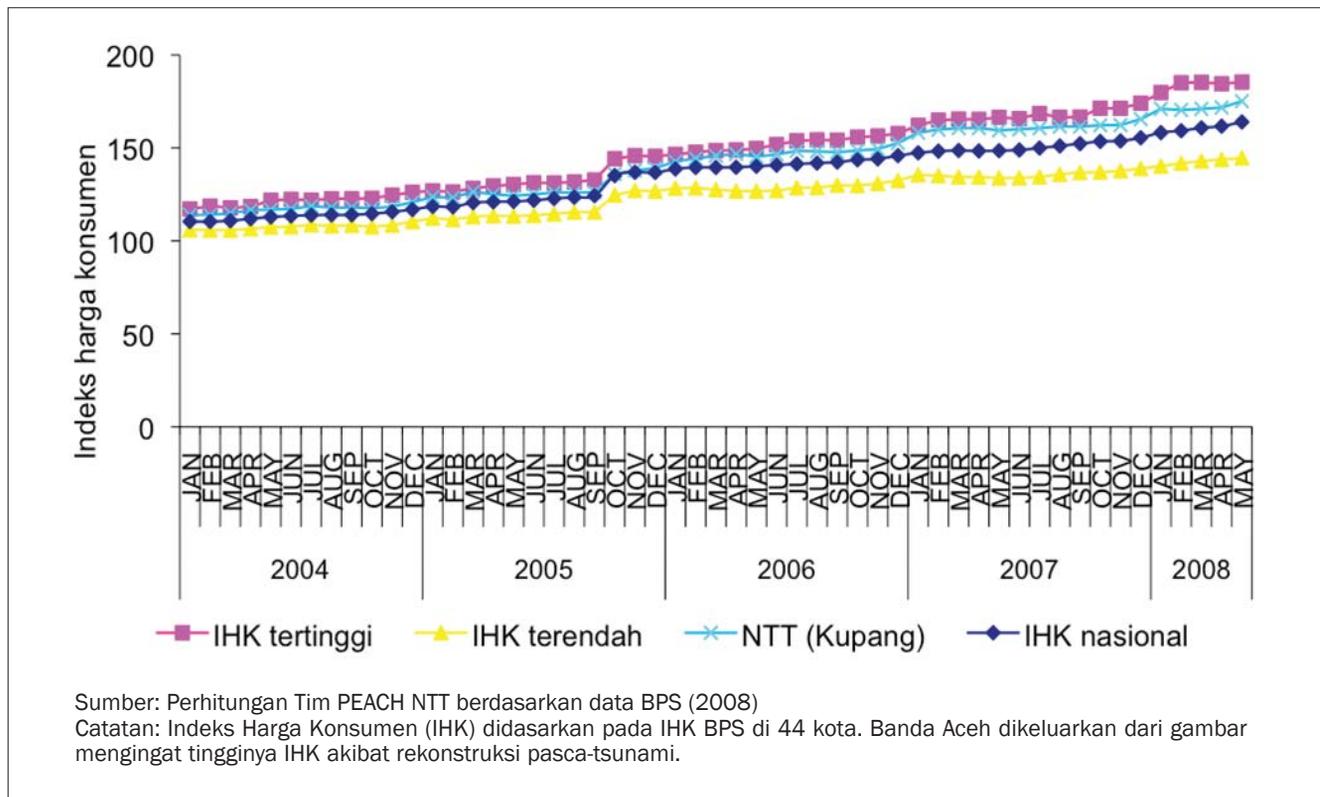
GAMBAR 2. NTT has been a lagging province, pre- and post-decentralization



Setelah pelaksanaan desentralisasi, kendati pengeluaran perkapita NTT meningkat tiga kali lipat dan tingkat kemiskinan juga menurun, NTT tetap merupakan salah satu provinsi yang perekonomiannya tertinggal. Pada tahun 2004, PDRB perkapita NTT adalah salah satu yang terendah di Indonesia (Gambar 2). Meski terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebanyak 8% yang dicapai antara tahun 1999 dan 2004, tingkat kemiskinan di NTT tetap 10% di atas rata-rata nasional.

Secara umum, NTT menghadapi tantangan ekonomi yang berat. Selain tingginya tingkat kemiskinan dan kapasitas perekonomian regional yang terbatas dengan tingkat pengeluaran publik yang tergolong menengah di Indonesia, NTT juga menghadapi tingkat pengangguran dan tingkat harga yang tinggi. Semenjak pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005, harga-harga di NTT meningkat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Kombinasi antara meningkatnya harga-harga komoditas dan biaya transportasi menjadi penyumbang bagi terjadinya inflasi di NTT (Gambar 3).

GAMBAR 3. Tingkat harga di NTT lebih tinggi dari rata-rata nasional.



Beratnya tantangan pembangunan ekonomi di NTT antara lain disebabkan oleh isolasi geografis dan iklim yang setengah kering (*semi-arid*). Seperti halnya NTB dan Maluku, NTT digolongkan sebagai wilayah setengah-kering karena minimnya curah hujan dan posisinya sebagai wilayah peralihan antara iklim gurun dan iklim basah¹. Sebagai provinsi kepulauan, ketersediaan akses dan transportasi merupakan isu yang sangat penting. Kombinasi antara iklim setengah kering dan keterisolasian membuat NTT memiliki akses ke sumber daya alam yang terbatas.

NTT sangat bergantung pada sektor pertanian yang masih tradisional. Pada tahun 2006, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 40% terhadap PDRB NTT. Dan, bersama dengan sektor galian dan pertambangan (sektor ekstraktif), merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di NTT, yakni 72% tenaga kerja laki-laki dan 68% tenaga kerja perempuan. Meskipun kontribusinya yang signifikan, sektor ini masih belum berkembang, terbukti dari besarnya jumlah petani yang masih bergantung pada pertanian subsisten serta masih terbatasnya akses pada cara-cara dan teknologi pertanian modern. Sebagai wilayah dengan kondisi tanah yang kering dan air yang hanya tersedia pada kurun waktu tertentu, para petani menghadapi banyak kesulitan dalam menanam dan mengolah hasil pertanian, terutama mereka yang masih menggunakan cara-cara tradisional.

Perpaduan antara lemahnya perekonomian daerah, tingginya kemiskinan, serta tantangan iklim dan geografi yang sulit, menuntut keseriusan pemerintah-pemerintah daerah di NTT untuk memanfaatkan sumber-sumber keuangan daerahnya secara maksimal. Karena itu, sangatlah penting untuk memahami, dari perspektif daerah, bagaimana sumber-sumber keuangan daerah dibelanjakan dan efektivitas pembelanjaan tersebut dalam memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

¹ Iklim setengah kering (*semi-arid climate*) atau iklim stepa (*steppe climate*) umumnya digambarkan sebagai wilayah dengan iklim bercurah hujan rendah (250-500 mm atau 10-20 in). Defenisi yang lebih tepat, yang diberikan oleh pengelompokan iklim menurut Köppen, menyatakan bahwa iklim stepa (BS) merupakan peralihan antara iklim gurun (BW) dan iklim basah baik dalam karakteristik ekologi maupun dalam bidang pertanian.

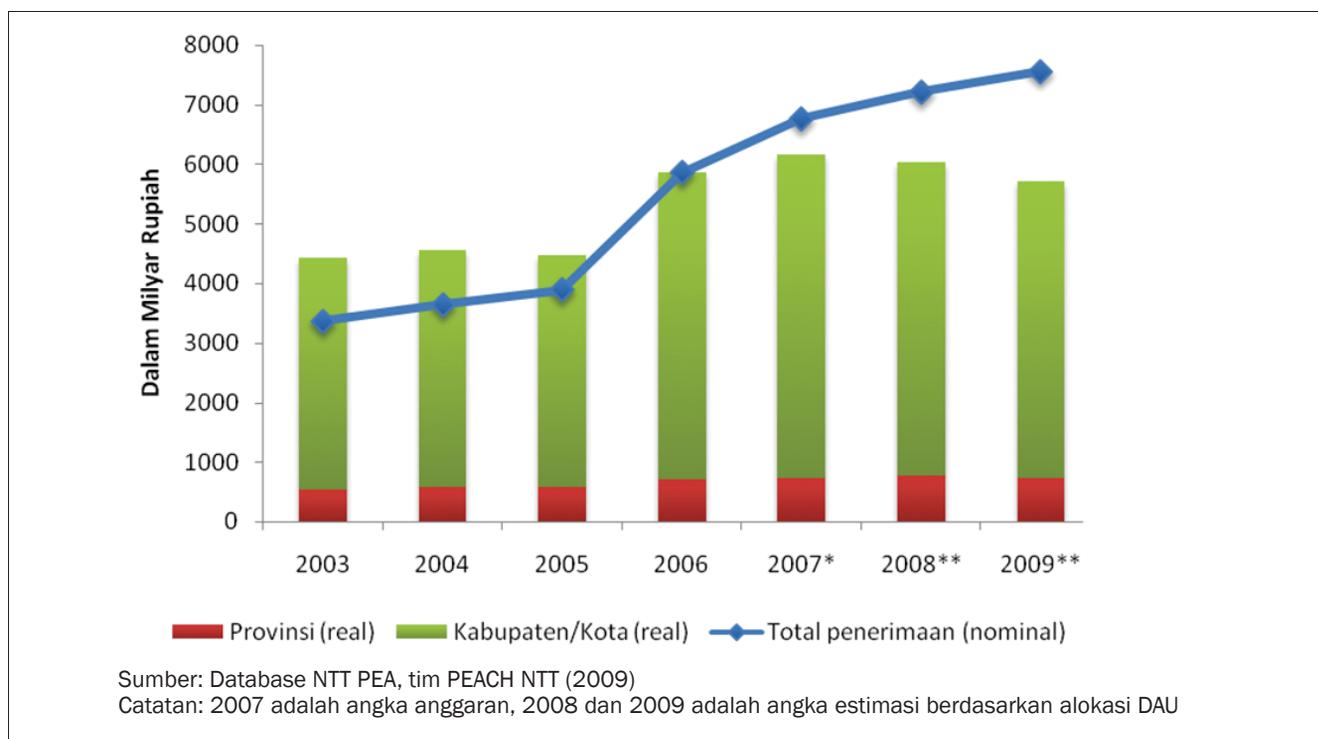
2

Penerimaan dan Pembiayaan

Dalam kurun waktu 2003 sampai 2009 total penerimaan pemerintah daerah NTT meningkat secara pesat. Secara nominal, pada periode tersebut penerimaan pemerintah daerah NTT telah meningkat sebesar 124 persen. Secara riil, peningkatan penerimaan pemerintah daerah terjadi hingga tahun 2007. Pada tahun 2009, penerimaan riil pemerintah daerah NTT diestimasikan mengalami penurunan yang sebagian besar disebabkan oleh adanya perubahan formula DAU dan inflasi.

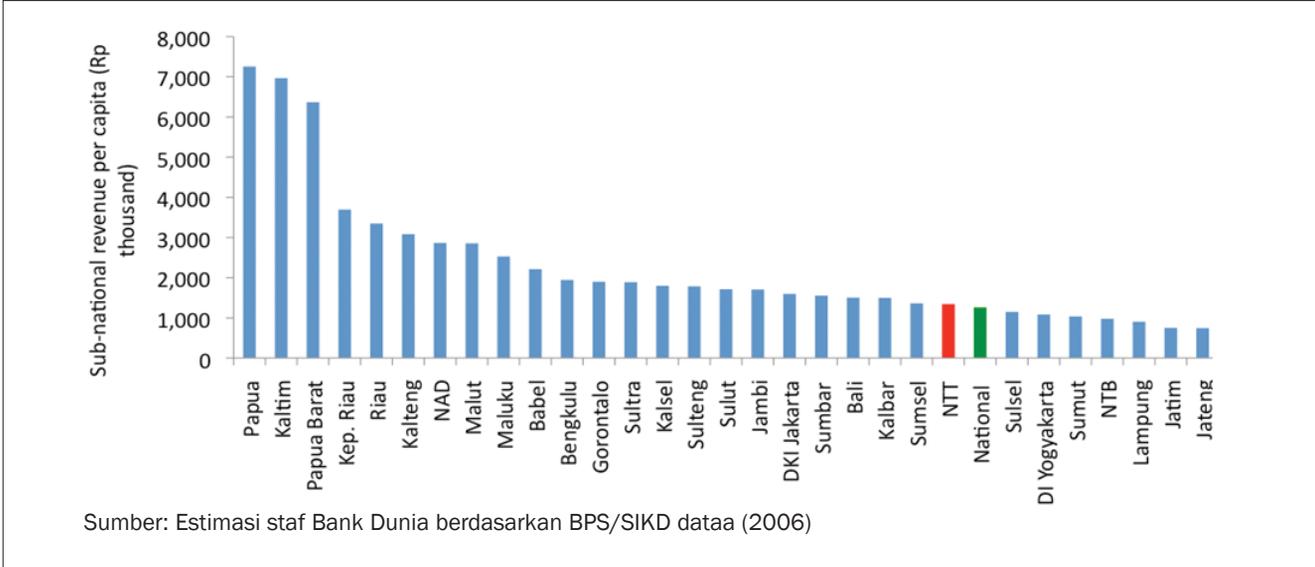
Sebagian besar sumber daya fiskal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dikelola oleh pemerintah kabupaten dan kota. Secara rata-rata, pemerintah provinsi mengelola sekitar 13% dari total penerimaan daerah NTT dan sisanya sekitar 87 persen dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun 2003 dari keseluruhan sumber daya fiskal sebesar Rp 4.669 trilyun, hanya 11% yang dikelola oleh pemerintah provinsi, sisanya sebanyak 89% dikelola oleh 15 daerah kabupaten / kota dalam wilayah NTT. Komposisi besaran sumber daya fiskal yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten / kota cenderung tidak berubah selama kurun waktu tahun 2003-2007. Kecuali pada tahun 2004 dimana pemerintah provinsi mengelola 14% sumber daya fiskal atau sejumlah Rp 583,2 milyar dari keseluruhan pendapatan fiskal sebesar Rp 3,952 trilyun.

GAMBAR 4. Penerimaan Pemerintah Daerah NTT terus meningkat walaupun secara riil ada penurunan sejak tahun 2007.



Penerimaan per kapita NTT berjumlah Rp 1,3 juta, peringkat ke-10 terendah di antara 32 provinsi di Indonesia (Gambar 5). Terdapat perbedaan yang mencolok di dalam penerimaan pemerintah antar provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2006 penerimaan per kapita Provinsi Papua adalah yang tertinggi di Indonesia, jumlahnya 5 kali penerimaan per kapita Provinsi NTT. Sementara jumlah penerimaan perkapita Provinsi Jawa Barat kurang dari setengah jumlah penerimaan perkapita Provinsi NTT. Penerimaan perkapita yang tinggi kemungkinan disebabkan oleh tambahan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana Otonomi Khusus (Papua dan Aceh), dana Pendampingan Pasca Konflik (Maluku dan Maluku Utara) atau karena kepemilikan sumber daya alam yang sangat signifikan (Kalimantan, Riau, Papua dan Aceh). Sementara itu penerimaan perkapita yang rendah sering dihubungkan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, misalnya di Jawa dan Sumatera.

GAMBAR 5. Pendapatan perkapita pemerintah daerah di NTT hampir sama dengan rata-rata provinsi di daerah lain.



Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan ciri semi arid yang memiliki pendapatan fiskal relatif besar. Daerah dengan ciri semi arid adalah daerah dengan presipitasi hujan yang rendah. Pada tahun 2006, realisasi penerimaan APBD seluruh daerah kabupaten / kota dan provinsi di NTT hanya sebesar Rp 5,857 Trilyun dan berada di urutan ke 18 dari 33 provinsi di Indonesia. Walaupun demikian bila dibandingkan dengan provinsi semi arid lainnya di Indonesia pada tahun yang sama, pendapatan fiskal seluruh daerah kabupaten / kota dan provinsi di NTT masih jauh berada diatas provinsi Maluku yang memiliki pendapatan fiskal sebesar Rp 3.212 Trilyun dan berada pada urutan ke 24. Sementara Provinsi NTB yang memiliki ciri semi arid sama seperti provinsi NTT, memiliki pendapatan fiskal sebesar Rp 4.171 Trilyun atau berada pada urutan ke 28 di seluruh Indonesia.

KOTAK 1. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH

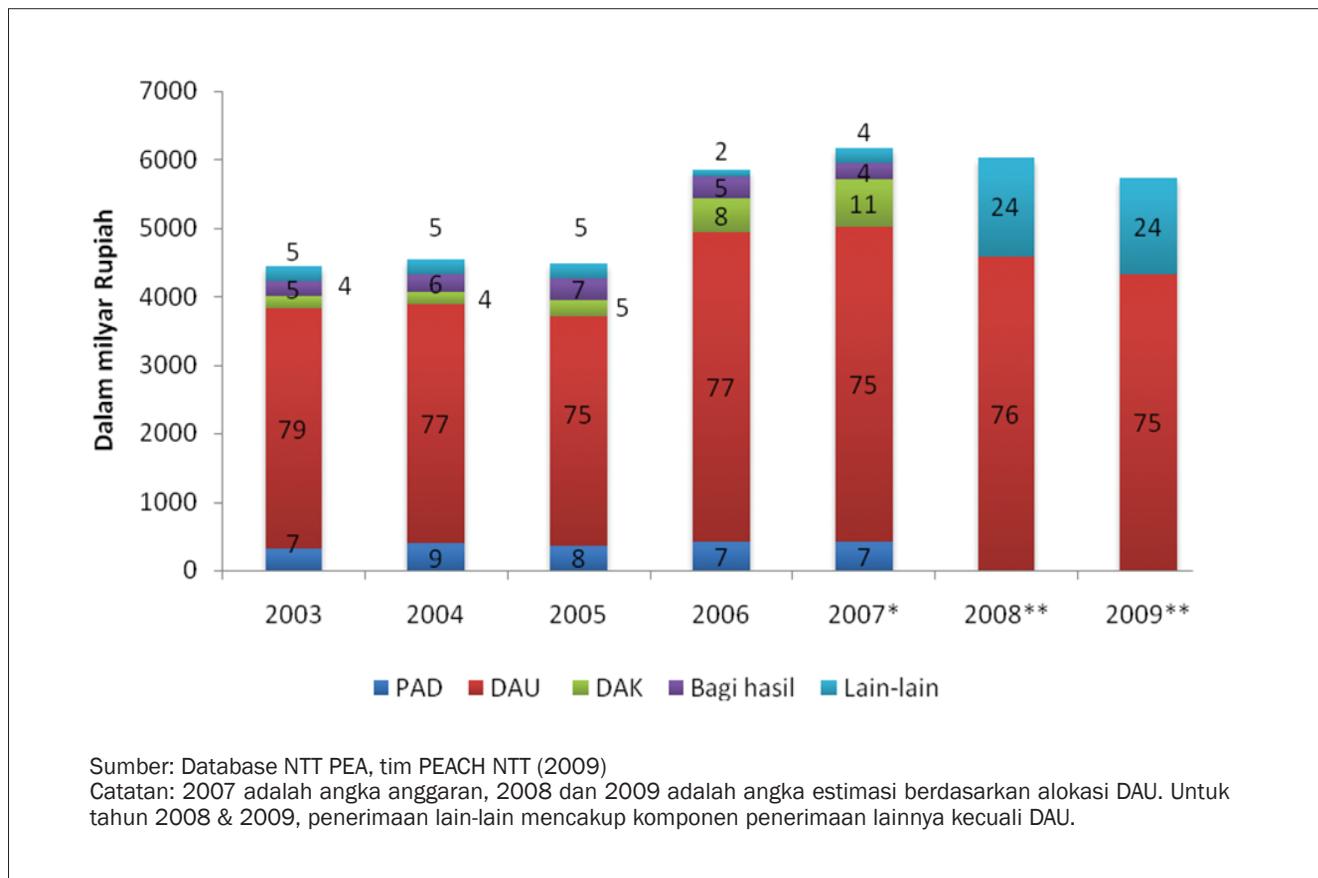
Sama halnya dengan provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi NTT memiliki empat sumber penerimaan utama, yaitu:

- 1) **Dana Alokasi Umum (DAU):** dana hibah diskresioner dari pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah dengan maksud menciptakan keseimbangan fiskal (*fiscal equality*). DAU dialokasikan dengan menggunakan formula yang dihitung berdasarkan sejumlah faktor, antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, PDRB perkapita, indeks pembangunan manusia (IPMI), anggaran dan belanja gaji pegawai negeri serta tingkat pendapatan asli daerah dan penerimaan bagi hasil.
- 2) **Dana Alokasi Khusus (DAK):** dana hibah bersyarat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan khusus daerah. Dana ini diarahkan dan dikhususkan guna membiayai program-program yang memberikan kontribusi terhadap prioritas-prioritas pembangunan nasional.
- 3) **Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam:** penerimaan yang bersumber dari pajak (pada tingkat nasional) dan sumber daya alam yang dibagikan diantara pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah berdasarkan rasio yang telah disepakati di dalam peraturan perundangan.
- 4) **Penerimaan Asli Daerah (PAD):** adalah penerimaan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, termasuk disini pajak daerah, retribusi dan keuntungan dari investasi pemerintah daerah.

Ketiga sumber yang pertama merupakan transfer antar pemerintahan dan digunakan oleh pemerintah pusat untuk menyeimbangkan kapasitas fiskal vertikal dan horizontal antar berbagai daerah.

Ketergantungan NTT terhadap DAU dan DAK terus meningkat. Pada tahun 2003 total penerimaan NTT dari sumber DAU dan DAK berjumlah 83%, dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 86% dari total penerimaannya (gambar 6). Peningkatan terutama diperoleh dari alokasi DAK. Ketergantungan NTT yang tinggi terhadap transfer pemerintah pusat dalam bentuk DAU dan DAK ini menunjukkan bahwa sumber-sumber penerimaan lainnya yang berbasis perekonomian lokal (seperti sumber daya alam) atau yang diusahakan sendiri oleh pemerintah daerah (seperti pajak dan retribusi daerah) sangat terbatas jumlahnya.

GAMBAR 6. Ketergantungan Pemda NTT terhadap transfer dari pemerintah pusat meningkat dalam kurun waktu 2007-2009



Proporsi DAU pada seluruh kabupaten / kota dan provinsi di NTT cenderung tidak berubah selama tahun 2003-2007. DAU merupakan bagian terbesar dari struktur dana perimbangan yang selain DAU terdiri dari dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan, terdapat juga penerimaan lain-lain yang sah serta bagi hasil pajak dan keuangan dari provinsi untuk pemerintah kabupaten / kota.

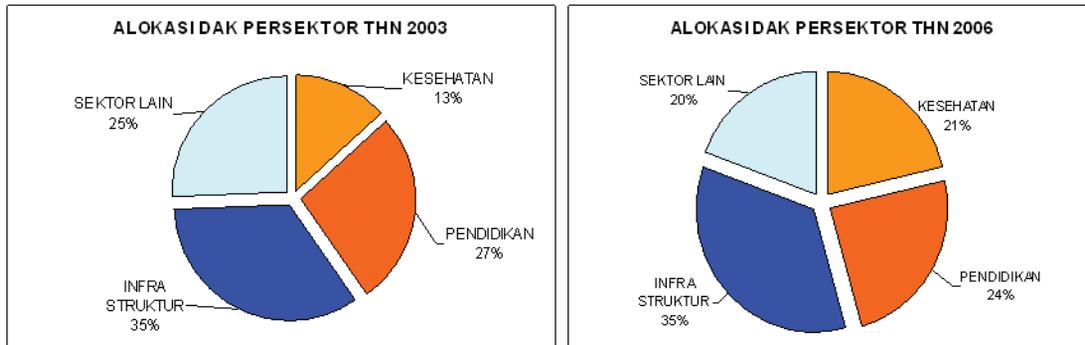
Peningkatan jumlah DAU selama tahun 2003-2007, pada seluruh kabupaten/kota di NTT hanya mengakibatkan perubahan DAU perkapita dalam jumlah yang relatif kecil. Sebaliknya peningkatan jumlah DAK selama periode waktu tersebut mampu meningkatkan DAK Perkapita sebesar hampir tiga kali lipat. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan peningkatan jumlah DAU hanya mencapai 31% selama kurun waktu 2003-2007. Sementara DAK pada periode yang sama tumbuh lebih cepat dengan peningkatan jumlah keseluruhan sebesar 192%. DAU perkapita hanya meningkat sebesar 17% sementara DAK Perkapita meningkat hampir tiga kali lipat nilainya selama periode tahun 2003-2007.

Dalam periode 2003-2007, DAU meningkat sebesar 31% dari Rp 3,5 triliun menjadi Rp 4,6 triliun (sekitar 75% dari total penerimaan NTT), sementara DAK meningkat lebih dari tiga kali lipat, dari Rp 165 milyar menjadi Rp 682 milyar. Berdasarkan data tahun 2006, 80% DAK dialokasikan untuk sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Alokasi DAK terbesar diperuntukan bagi tiga sektor utama yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan dasar publik. Jumlah alokasi DAK untuk ketiga sektor tersebut bahkan meningkat dari 75% pada tahun 2003 menjadi 80% pada tahun 2006. Dari total DAK tahun 2003 sebesar Rp 165 milyar dialokasikan kepada bidang

kesehatan sebesar Rp 20,7 milyar, bidang pendidikan sebesar Rp 42,4 milyar, dan pada bidang infrastruktur sebesar Rp 53,3 milyar. Sedangkan sisanya dialokasikan pada bidang-bidang lain. Pada tahun 2006 mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp 105,6 milyar untuk bidang kesehatan, Rp 117,8 milyar untuk bidang pendidikan dan Rp 172,5 milyar untuk bidang infrastruktur.

GAMBAR 7. Alokasi DAK untuk 3 sektor layanan public dasar tahun 2003 dan 2006

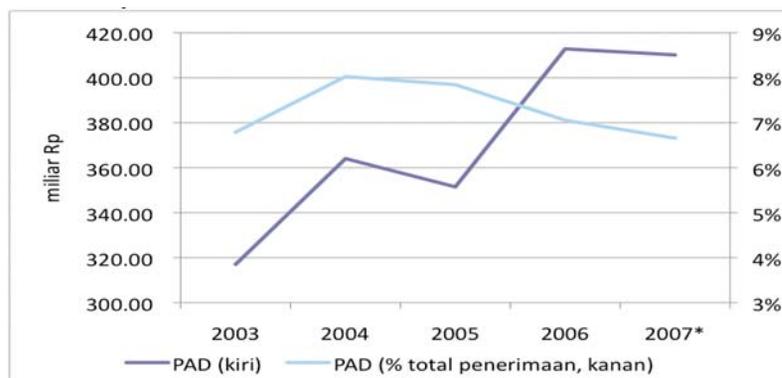


Sumber: Database NTT PEA, Tim PEACH NTT (2008)

Dana bagi hasil relatif tidak berubah jumlahnya. Di tahun 2003 dana bagi hasil adalah Rp 239 milyar (sekitar 5% dari total penerimaan) sedangkan di tahun 2007 menjadi Rp 240 milyar (sekitar 4% dari total penerimaan). Seluruh penerimaan dana bagi hasil berasal dari pajak, mengingat porsi NTT terhadap dana bagi hasil sumber daya alam relatif kecil².

Pertumbuhan PAD pada kurun waktu 2003-2007 tidak dapat mengimbangi pertumbuhan sumber daya fiskal pemerintah daerah NTT. Meskipun jumlahnya meningkat sebanyak 29% pada periode 2003-2007, namun kontribusinya terhadap total penerimaan dapat dikatakan hampir tidak mengalami perubahan, hanya menyumbang sekitar 7% terhadap total penerimaan (Gambar 8). Diperkirakan sebanyak 40% dari total PAD NTT dihasilkan oleh pemerintah provinsi dan jumlah tersebut mencapai sekitar 25% dari total penerimaan pemerintah provinsi. Sebaliknya, penurunan yang signifikan terjadi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, dimana PAD hanya mencapai rata-rata 4% dari total penerimaan.

GAMBAR 8. Dalam periode 2003-2007 total PAD meningkat tetapi persinya terhadap penerimaan tidak banyak berubah

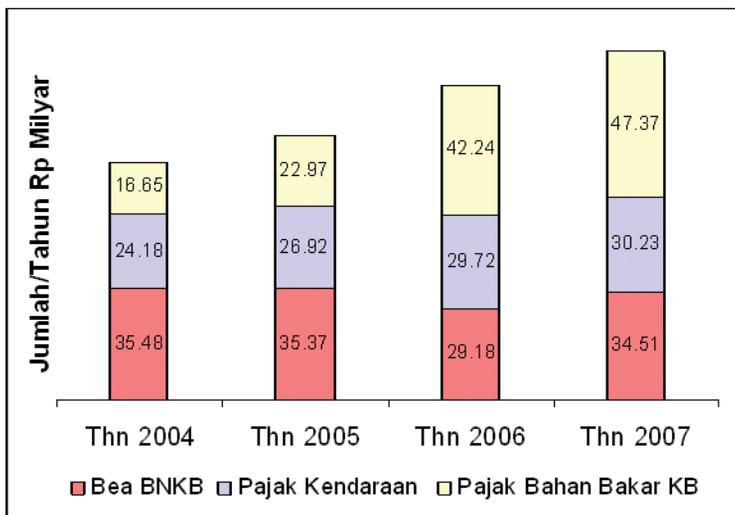


Sumber: Database NTT PEA, Tim PEACH NTT (2009)
Catatan: Angka 2007 adalah angka anggaran

² Pada kurun 2003-2004, NTT memperoleh sekitar Rp 400 juta dari bagi hasil sumber daya alam.

Pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam struktur PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama tahun 2003 sampai tahun 2007 komponen pajak daerah menyumbang 60% dari Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah merupakan komponen yang kecil namun terus meningkat baik dalam jumlah maupun dalam proporsi. Pajak daerah diperoleh dari: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang merupakan bagian terbesar, pajak kendaran bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan yang merupakan bagian terkecil. Selain pajak daerah dan retribusi terdapat juga sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah dan laba perusahaan daerah yang menyumbangkan sebagian kecil dari total PAD.

GAMBAR 9. Tiga Jenis Pajak Daerah yang dominan di Provinsi NTT



Sumber: Estimasi tim PEACH NTT berdasarkan data Dispenda Provinsi NTT (2009)

Walaupun retribusi daerah provinsi NTT merupakan bagian yang kecil dalam struktur PAD, namun jumlah dan proporsinya meningkat setiap tahun selama periode tahun 2003-2007. Pada tahun 2003 sekitar 12% PAD berasal dari retribusi daerah, jumlah ini meningkat menjadi 17% pada tahun 2007. Pada tingkat provinsi, retribusi daerah terdiri dari tiga jenis retribusi. Retribusi jasa usaha merupakan bagian terbesar dalam struktur retribusi daerah (sekitar 90% dari retribusi daerah berasal dari komponen ini). Sedangkan retribusi jasa umum dan retribusi perijinan tertentu merupakan dua jenis retribusi yang nilainya kecil (menyumbang kurang dari 10% terhadap total retribusi daerah). Berbeda dengan pemerintah provinsi, pada sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di NTT, retribusi daerah justru merupakan bagian yang dominan dalam struktur PAD. Karena kewenangannya, pemerintah kabupaten/kota lebih leluasa mengatur obyek retribusi sehingga jenis pungutan retribusi daerah pada tingkat kabupaten/kota lebih banyak daripada jenis retribusi daerah pada pemerintah provinsi. Dengan demikian jumlah dan *share* retribusi daerah pada pemerintah kabupaten/kota terhadap total PAD umumnya lebih besar daripada jumlah dan *share* retribusi daerah pada pemerintah provinsi.

Pemerintah kabupaten / kota memiliki basis pajak dan retribusi yang berbeda dengan pemerintah provinsi.

Pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak hotel dan pajak bahan galian golongan C merupakan jenis pajak yang memberikan kontribusi cukup dominan dalam struktur pajak daerah di kabupaten / kota. Sementara retribusi pelayanan kesehatan, retribusi jasa usaha pemakaian aset daerah dan terminal merupakan jenis retribusi yang memberikan kontribusi cukup besar pada PAD kabupaten lewat komponen retribusi daerah. Sementara di Kota Kupang sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, retribusi ijin gangguan juga merupakan salah satu jenis retribusi yang cukup besar sumbangannya terhadap PAD. Hal ini dapat terjadi karena jenis retribusi ini dipungut terhadap semua aktivitas pemasangan spanduk, iklan, baliho dengan tarif pembayaran menurut jumlah hari, ukuran dan jenis media yang digunakan.

TABEL 1. Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada 2 kabupaten/kota di NTT

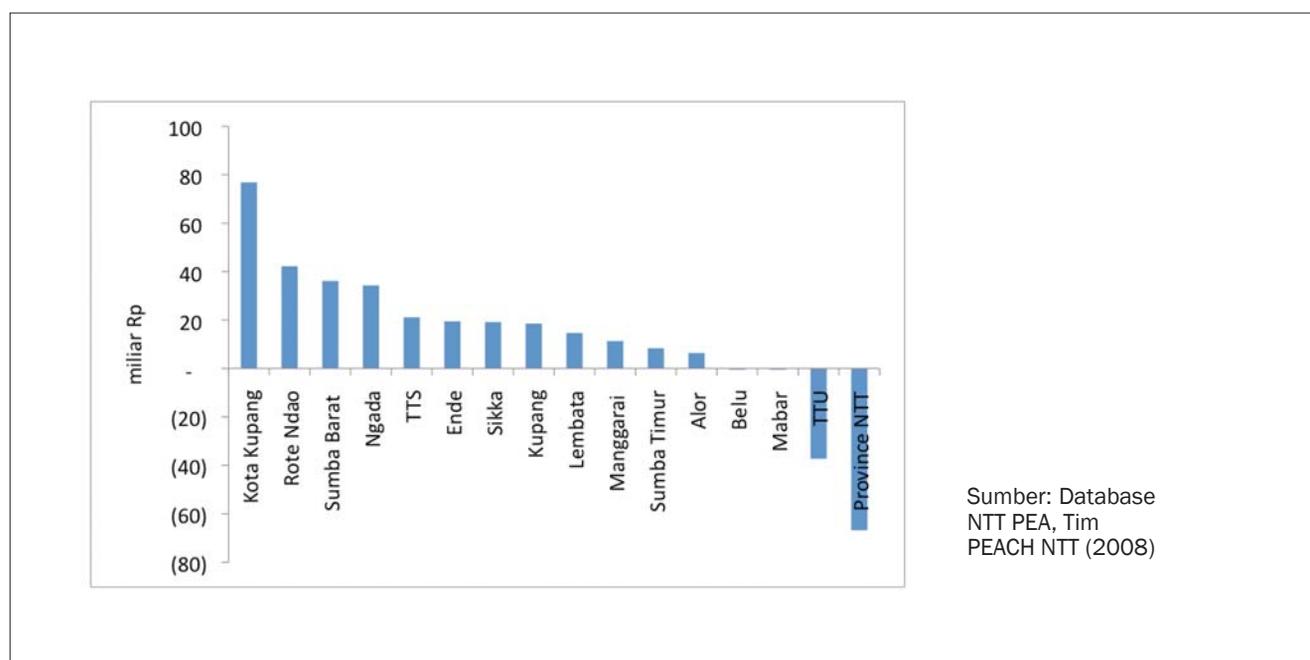
JENIS PAJAK & RETRIBUSI TERBESAR	Thn 2004 Rp Juta	Thn 2005 Rp Juta	Thn 2006 Rp Juta
KAB.SUMBA BARAT			
Pajak bahan galian Golongan C	408 (54%)	449 (50%)	460 (43%)
Pajak Penerangan Jalan	225 (30%)	420 (36%)	360 (34%)
Pajak Restoran	120 (16%)	295 (25%)	243 (23%)
JUMLAH PAJAK DAERAH	753 (100%)	1,164 (100%)	1,063 (100%)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,922 (57%)	2,038 (50%)	2,347 (41%)
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Aset	354 (10%)	457 (11%)	1,533 (27%)
Retribusi Jasa Usaha Terminal	235 (7%)	219 (5%)	239 (4%)
JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	3,389 (100%)	4,076 (100%)	5,730 (100%)
KOTA KUPANG			
Pajak Penerangan Jalan	3,891 (76%)	4,549 (74%)	4,797 (72%)
Pajak Hotel	359 (7%)	549 (9%)	707 (11%)
Pajak Restoran	286 (6%)	335 (5%)	368 (6%)
JUMLAH PAJAK DAERAH	5,089 (100%)	6,148 (100%)	6,686 (100%)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	610 (13%)	698 (11%)	594 (10%)
Retribusi Ijin Gangguan	593 (12%)	787 (13%)	842 (14%)
Retribusi Penggantian Biaya Cetak	503 (10%)	721 (12%)	668 (11%)
JUMLAH RETRIBUSI DAERAH	4,792 (100%)	6,148 (100%)	6,229 (100%)

Sumber: Database NTT PEA, Tim PEACH NTT (2008)

Catatan: Angka-angka Dalam Kurung adalah persentase Terhadap Total Pajak / Retribusi

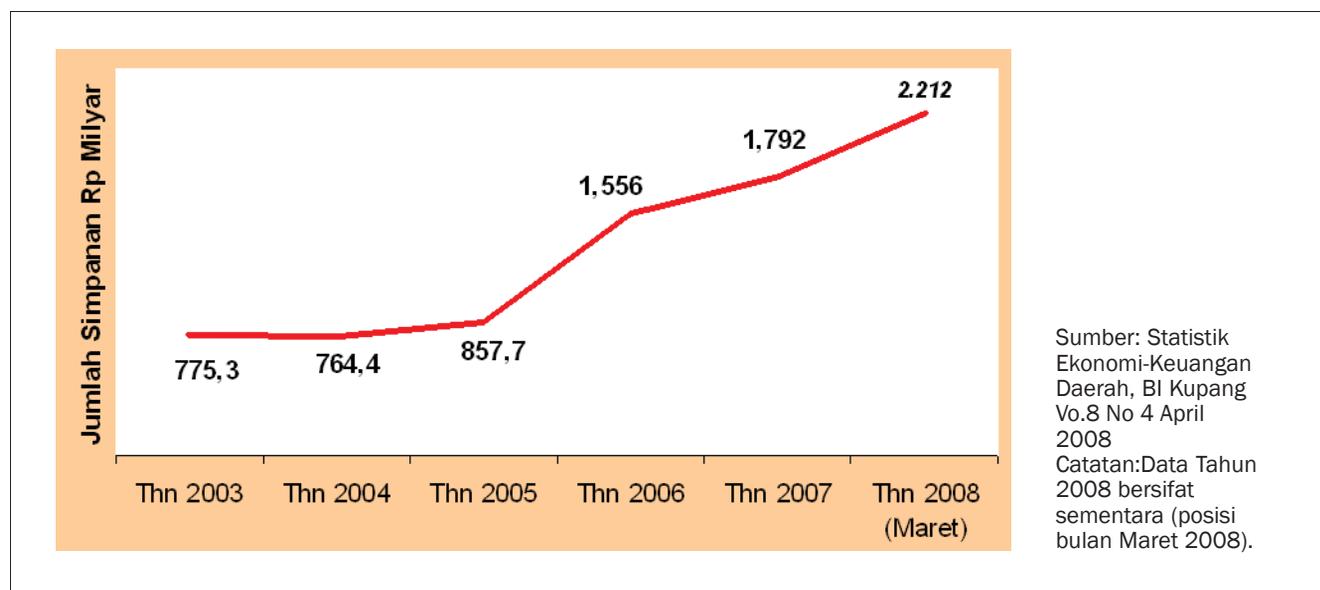
Pencatatan sisa anggaran masih merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah di NTT. Sebagian besar kabupaten/kota di NTT memiliki surplus anggaran atau SILPA (Gambar 10). Surplus anggaran dapat diartikan sebagai hasil dari upaya efisiensi anggaran. Namun di lain pihak, hal ini juga dapat dilihat sebagai ketidak mampuan pemerintah daerah dalam menggunakan anggarannya. Pencatatan terhadap SILPA dilakukan secara tidak konsisten dimana masih terdapat kasus sisa anggaran di tahun tertentu tidak sesuai dengan SILPA ditahun berikutnya.

GAMBAR 10. Sebagian besar kabupaten/kota mengalami surplus anggaran di tahun 2006



Jumlah simpanan milik pemerintah daerah yang berada di bank umum di NTT meningkat selama tahun 2003-2007. Pada tahun 2003 dana milik pemerintah daerah (tidak termasuk dana milik pemerintah pusat) yang disimpan di beberapa bank umum sebesar Rp 775 milyar kemudian meningkat menjadi Rp 1,7 trilyun. Bahkan diperkirakan mencapai Rp. 2,2 trilyun pada periode bulan maret 2008. Peningkatan jumlah simpanan pemerintah ini mengindikasikan adanya sejumlah kapital tidak bergerak (*idle*) yang sebenarnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai layanan pemerintah terutama upaya peningkatan penyediaan kebutuhan dasar publik.

GAMBAR 11. Posisi Simpanan Pemerintah di Bank Umum yang terus meningkat.



Kesimpulan:

- **Perekonomian yang kecil serta sumber daya alam yang terbatas menunjukkan keterbatasan kapasitas Provinsi NTT untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaannya.** Hal ini tercermin dari terus meningkatnya ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, terutama DAU dan DAK. Pada tahun 2003, 78% dari total penerimaan NTT berasal dari sumber DAU dan DAK, dan terus meningkat hingga mencapai 86% pada tahun 2007. Untuk sumber penerimaan lainnya, NTT menerima porsi dana bagi hasil sumber daya alam yang tidak berarti dan jumlah dana bagi hasil pajak juga tetap tidak mengalami penambahan sejak tahun 2003.
- **Sejak tahun 2003 sumber PAD NTT terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya sumber-sumber penerimaan NTT secara keseluruhan.** Pada tahun 2007 PAD mencakup 7% dari total penerimaan NTT. Proporsi ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 20%. Banyak penjelasan tentang rendahnya PAD ini, antara lain soal terbatasnya jumlah usaha kecil, rendahnya pajak dari sektor hiburan (hotel dan restoran), jumlah kendaraan bermotor terdaftar yang relatif lebih kecil jumlahnya, dan lemahnya penyediaan layanan (yang sebenarnya merupakan sumber penting untuk meningkatkan retribusi). Dibutuhkan analisis lebih jauh terhadap komposisi PAD guna menilai potensi peningkatannya ke depan.

Rekomendasi:

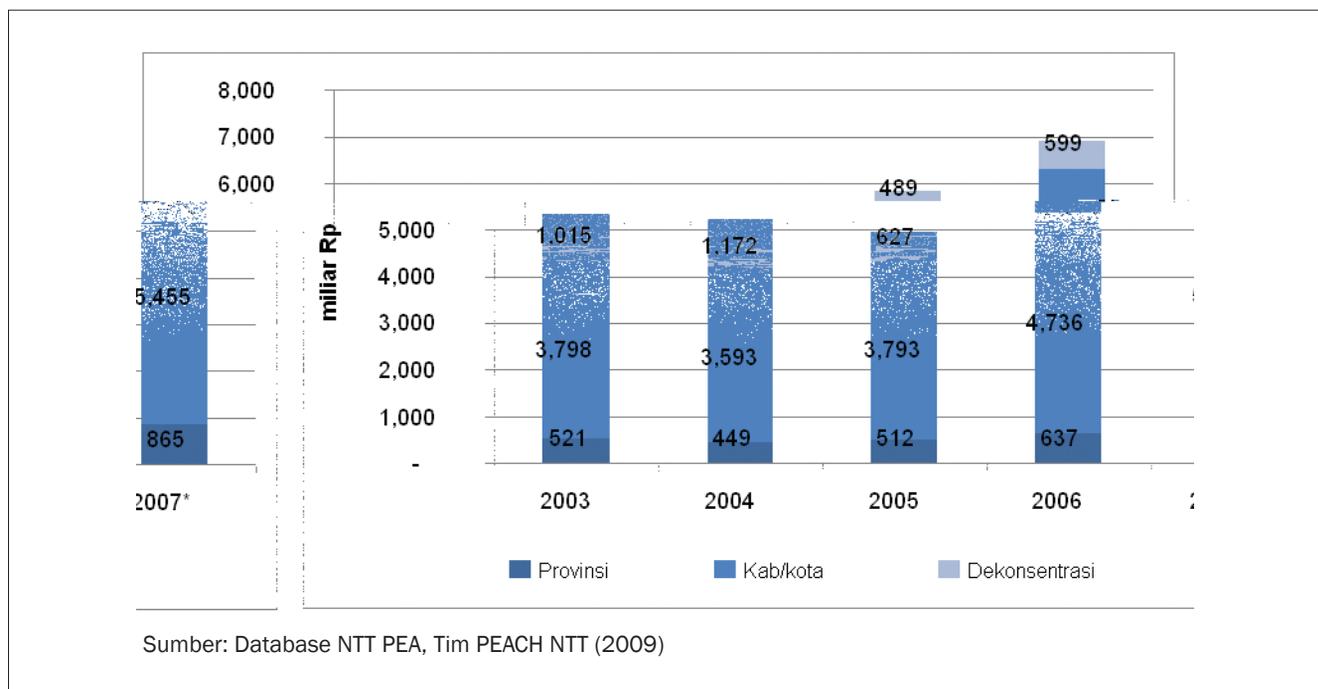
- **Upaya peningkatan kapasitas penerimaan daerah harus dilakukan oleh pemerintah NTT.** Upaya peningkatan kapasitas ini dapat dibedakan antara upaya jangka pendek dan upaya jangka panjang. Untuk jangka pendek dapat difokuskan pada peningkatan kapasitas fiskal secara tidak langsung, dengan memberikan regulasi yang memungkinkan pengembangan sumber-sumber pajak dan perekonomian daerah daripada menciptakan regulasi yang menambah beban usaha. Upaya ini harus dilakukan melalui peningkatan PAD terutama dari sumber-sumber retribusi daerah dan pajak daerah, yang berasal dari aktivitas ekonomi lokal. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bagian dari kebijakan fiskal daerah dan dimaksudkan untuk memperkuat fondasi fiskal daerah. Penguatan fondasi fiskal daerah merupakan salah satu tuntutan otonomi daerah, yang pada dasarnya telah memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus diri sendiri, termasuk di dalamnya memperkuat fondasi fiskalnya. Sampai sejauh ini, sejak diberlakukannya otonomi daerah, rasio PAD terhadap pendapatan daerah secara total maupun terhadap dana perimbangan relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal daerah masih relatif tinggi. Karena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan PAD adalah bagian strategis untuk memperkecil tingkat ketergantungan fiskal daerah.
- **Peningkatan PAD harus dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan layanan publik yang semakin baik.** PAD harus dipahami sebagai resultante dari kemampuan ekonomi masyarakat; semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat, semakin tinggi kemampuan masyarakat untuk membayar layanan publik yang disediakan pemerintah. Karena itu, upaya-upaya peningkatan PAD harus terintegrasi dengan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
- **Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dasar pengenaan pajak dan usaha pengumpulan pajak yang tepat.** Untuk kepentingan ini, diperlukan suatu pengkajian untuk merumuskan secara tepat, peluang-peluang yang mungkin bagi pemerintah untuk meningkatkan PAD.

3

Pengeluaran

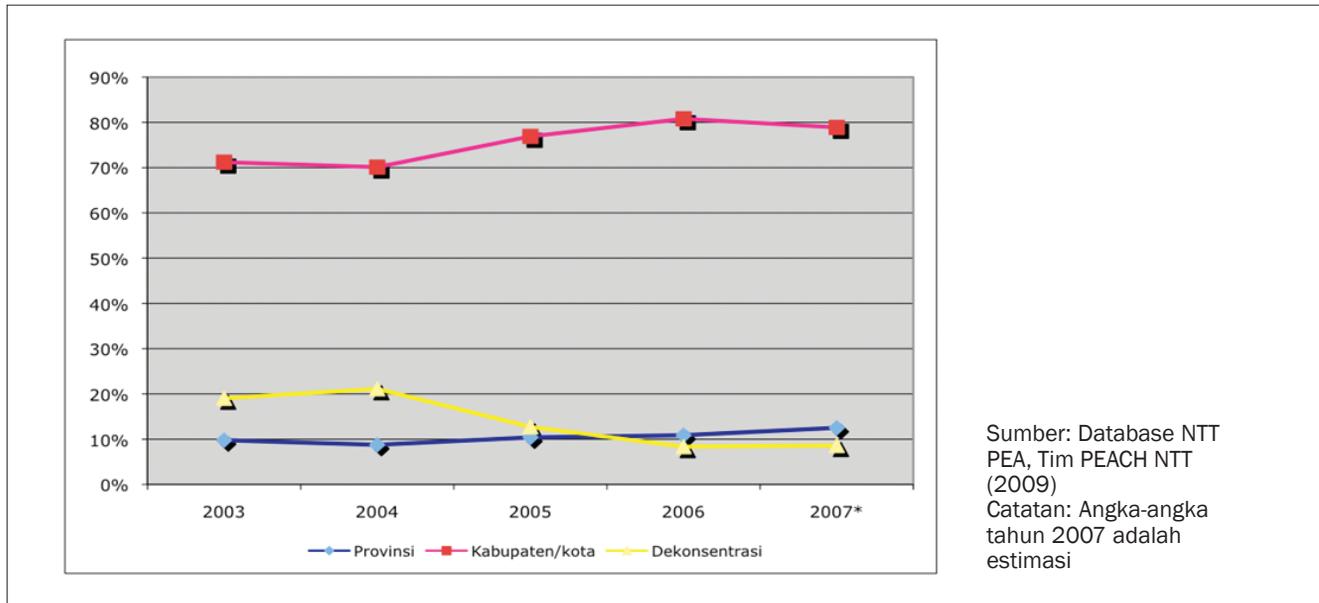
Dalam periode 2003-2007, pengeluaran di tingkat daerah di NTT meningkat sebanyak 30%. Perubahan ini didorong oleh peningkatan penerimaan yang saling terkait, khususnya pada penambahan jumlah transfer DAU dan DAK dari pemerintah pusat. Sementara itu, sejak tahun 2003 belanja pemerintah pusat (melalui dana dekonsentrasi) secara berangsur-angsur berkurang.

GAMBAR 12. Pengeluaran riil NTT meningkat pada periode 2006-2007 terutama didorong oleh peningkatan DAU dan DAK



Pemerintah kabupaten/kota secara terus-menerus menguasai porsi yang sangat besar dari pengeluaran publik di NTT (Gambar 12). Pada tahun 2007 pemerintah kabupaten/kota menguasai 79% dari seluruh pengeluaran pemerintah di NTT (meningkat dari 71% pada tahun 2003). Pada kurun waktu yang sama porsi belanja dekonsentrasi berkurang dari 19% total belanja di tahun 2003 menjadi hanya 9% di tahun 2007. Sementara itu, DAK meningkat sebanyak tiga kali lipat sepanjang periode ini, yang menandakan bahwa peran pemerintah pusat tetap penting dalam pengeluaran publik di NTT, meski peran pemerintah pusat tersebut kini dilakukan dengan mekanisme yang berbeda.

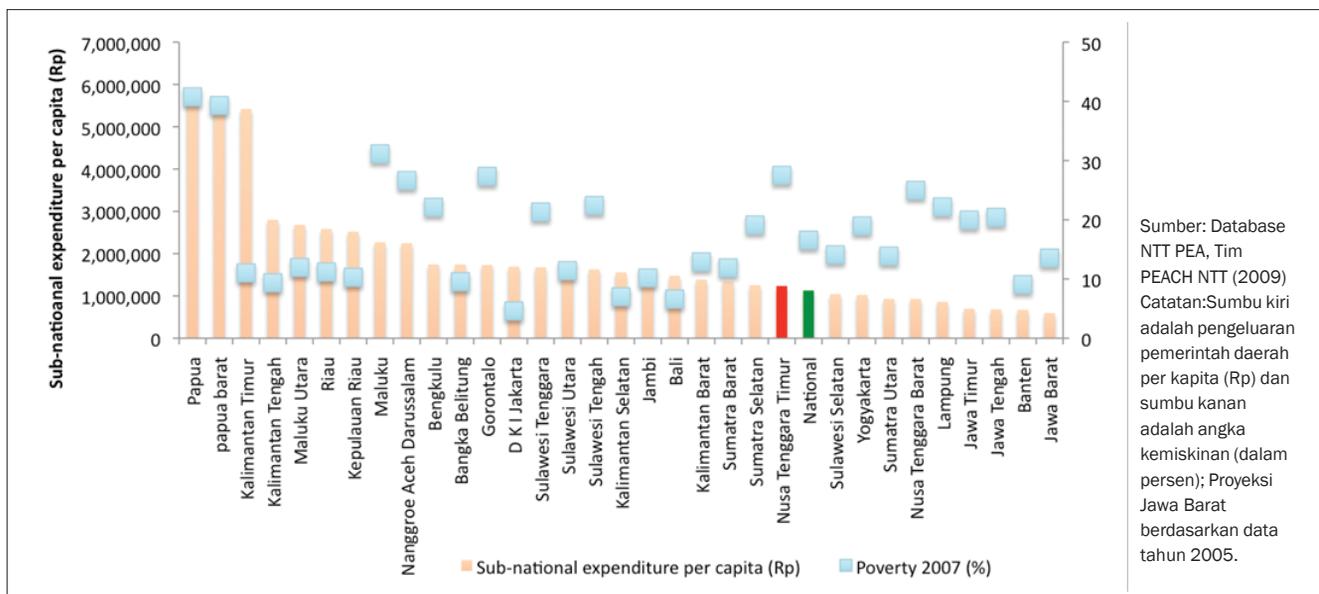
GAMBAR 13. Porsi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pengeluaran publik di NTT.



Pengeluaran per kapita NTT berada pada peringkat 10 terendah dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia, dengan jumlah Rp 1,23 juta (Gambar 14). Mirip dengan penerimaan per kapita, pengeluaran per kapita antar provinsi di Indonesia juga menunjukkan variasi yang sangat mencolok. Sebagai contoh, Provinsi Papua membelanjakan Rp 5,9 juta per individu, jumlah yang tertinggi antar provinsi di Indonesia dan hampir 5 kali lebih banyak dari pengeluaran perkapita NTT. Sebaliknya, Provinsi Banten hanya memiliki pengeluaran perkapita sebesar 55% dari pengeluaran perkapita NTT. Adanya variasi antar provinsi ini sebenarnya merupakan konsekuensi dari penerimaan per kapita wilayah, yang pada gilirannya dihitung setelah dibandingkan dengan sejumlah faktor, antara lain kepadatan penduduk dan dukungan ketersediaan sumber daya alam.

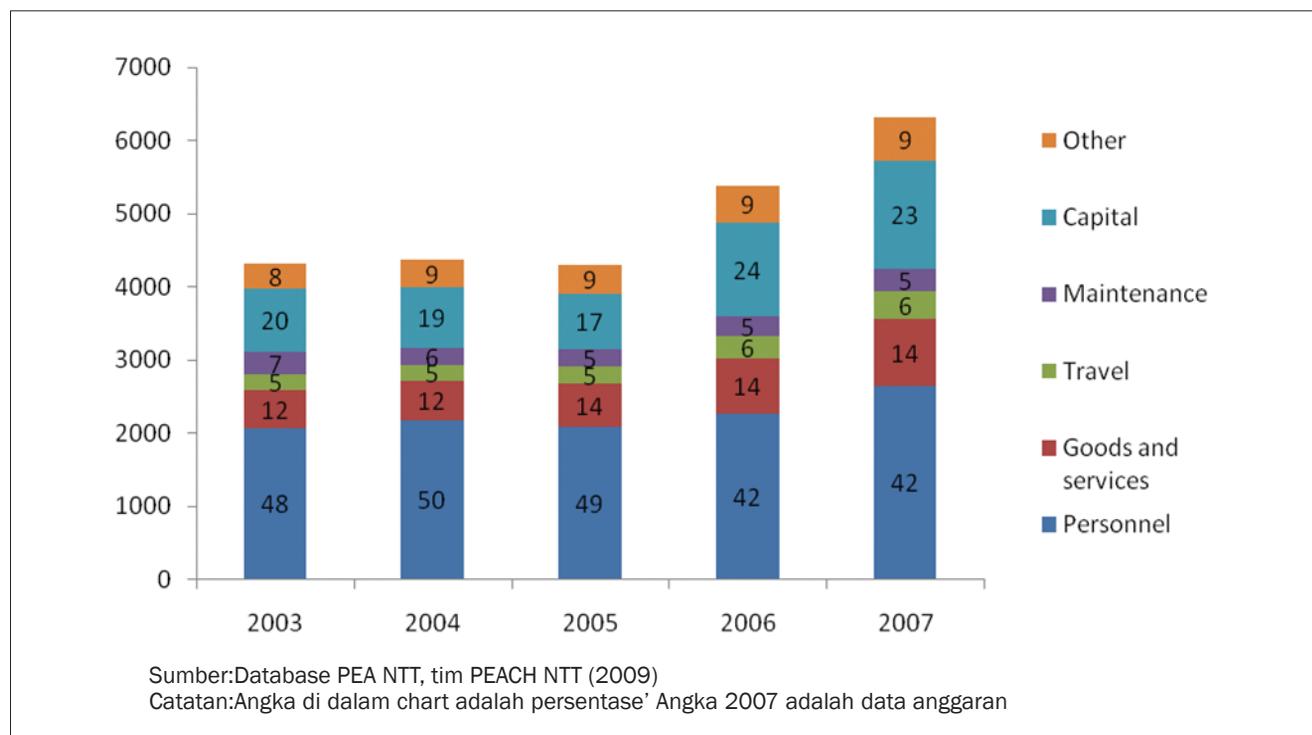
Dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Timur Indonesia yang memiliki ciri semi arid. Provinsi Maluku memiliki belanja perkapita dua kali lebih besar dari Provinsi NTT. Sementara Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki nilai belanja perkapita lebih rendah dari Provinsi NTT. Sebagai perbandingan pada tahun 2006 populasi penduduk Provinsi NTT 4,35 juta jiwa, provinsi NTB 4,25 juta jiwa, sementara Provinsi Maluku hanya sebesar 1,27 juta jiwa (BPS: Indikator Kunci 2007). Dengan demikian walapun jumlah nominal belanja APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tertinggi diantara ketiga provinsi yang berciri *semi arid* tersebut namun belanja perkapita provinsi Maluku menjadi paling tinggi diantara ketiga provinsi tersebut, karena populasi penduduk yang relatif sedikit.

GAMBAR 14. Pengeluaran Perkapita NTT adalah urutan 10 terendah di Indonesiadi 2006.



Pada tahun 2003 hingga 2005 terhitung setengah dari total pengeluaran NTT dibelanjakan untuk gaji pegawai. Jumlah ini sedikit mengalami penurunan menjadi sekitar 42% pada tahun 2006 dan 2007 (Gambar 15). Sementara itu, pada periode yang sama, proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk belanja modal mengalami sedikit peningkatan dari 20% menjadi 23%. Hampir mirip dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, pengeluaran untuk belanja pemeliharaan di NTT sangatlah kecil, hanya 5% dari total pengeluaran. Sebagai perbandingan, di tahun 2007 belanja perjalanan dinas NTT bahkan sedikit lebih tinggi dibanding belanja pemeliharaan.

GAMBAR 15. Pengeluaran gaji menghabiskan hampir setengah dari total pengeluaran pemerintah daerah di NTT.



Di seluruh kabupaten / kota di NTT, belanja pegawai paling dominan. Pada tahun 2007 diperkirakan porsi belanja pegawai mencapai 43% dari keseluruhan belanja semua kabupaten/kota dan provinsi di NTT. Belanja modal yang secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat menempati urutan kedua dengan porsi 23%. Komponen belanja modal, sesuai dengan hakekatnya, ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang manfaatnya dinikmati oleh masyarakat³. Karena itu semakin besar pengeluaran belanja modal akan memberi manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Belanja barang dan jasa menempati urutan ketiga dengan alokasi sebesar 14%. Sisanya dialokasikan pada belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja lain-lain dan belanja tidak termasuk bagian lain yang memperoleh porsi relatif kecil.

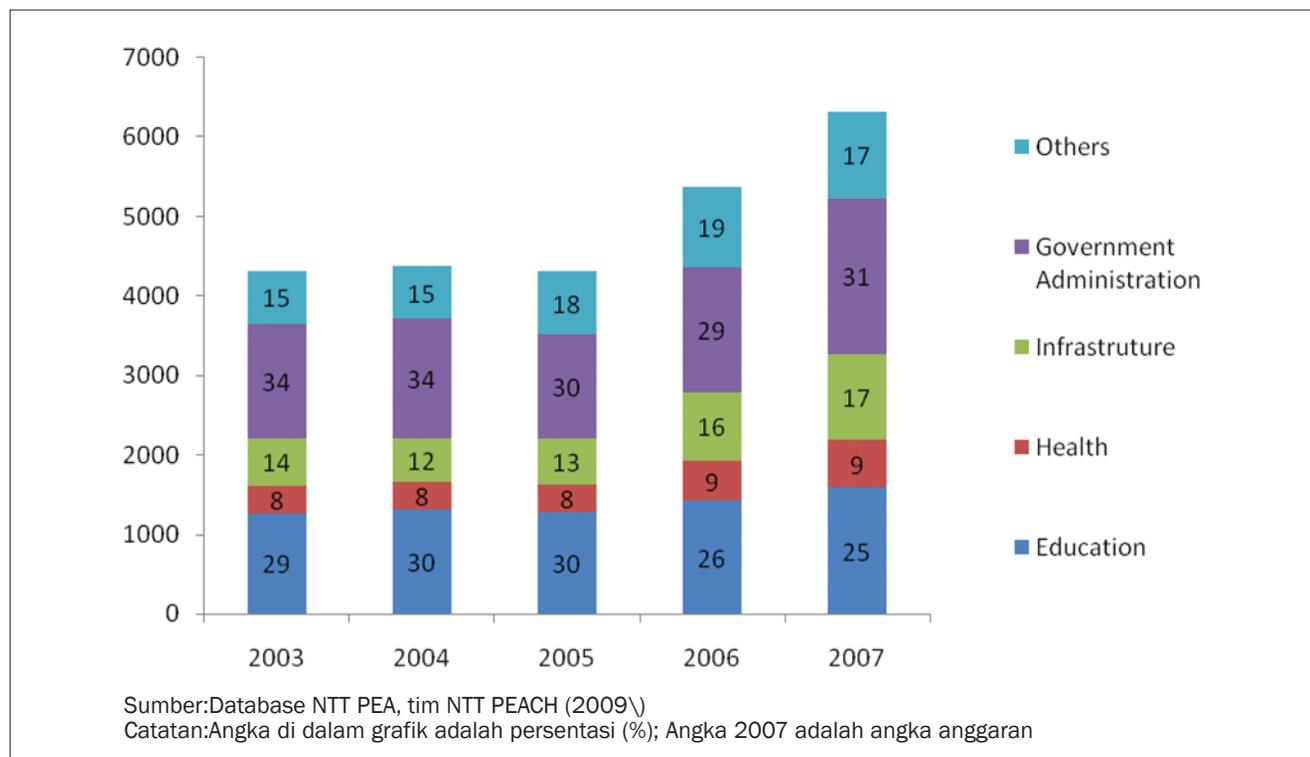
Sekitar sepertiga dari total pengeluaran NTT dibelanjakan untuk administrasi umum, ini merupakan alokasi belanja sektoral yang terbesar di NTT. Belanja sektoral terbesar kedua adalah pengeluaran pendidikan, sebesar 25% dari total anggaran di tahun 2007. Pengeluaran sektoral lainnya yang signifikan adalah pengeluaran pada sektor infrastruktur (15% dari total pengeluaran 2007) dan sektor kesehatan (9% dari total anggaran). Selanjutnya, tren belanja aparatur maupun pendidikan mengalami sedikit penurunan sejak 2003, sedangkan sektor kesehatan dan sektor infrastruktur terus naik meskipun peningkatannya sedikit.

Belanja untuk sektor strategis meliputi sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Ketiga sektor ini merupakan

³ Menurut Perdirjen Perbendaharaan tersebut, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila: (i) pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas; (ii) pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah; dan (iii) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

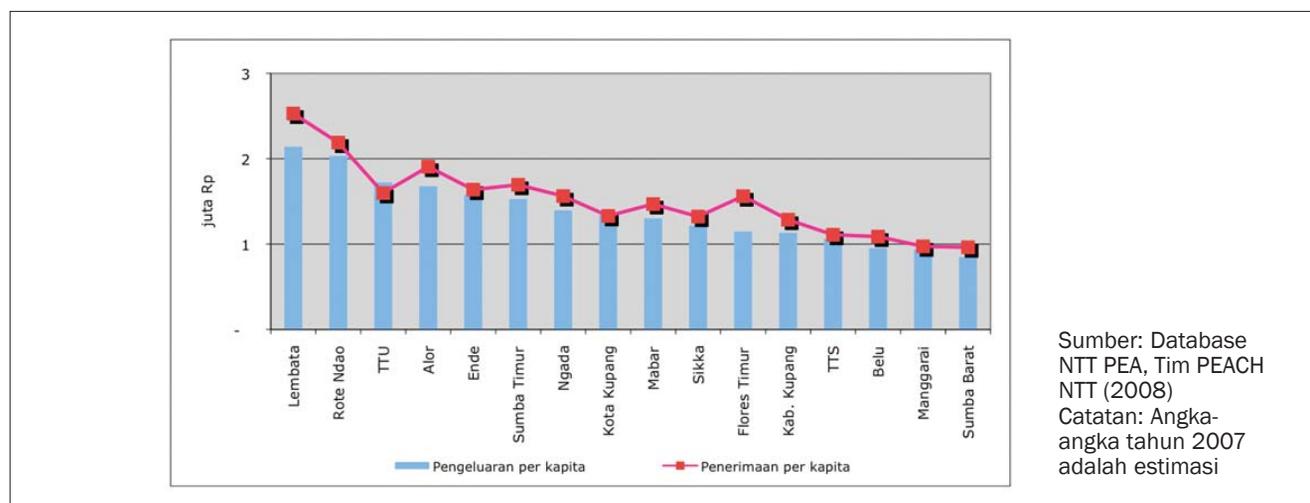
bidang yang terkait langsung dengan pelayanan kebutuhan dasar publik dan memiliki dampak sosial yang signifikan. Sektor infrastruktur meliputi bidang pekerjaan umum dan perhubungan, sedangkan sektor pendidikan dalam struktur APBD propinsi dan kabupaten / kota meliputi belanja untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan, Museum, dan pengeluaran untuk UPTD teknis terkait lainnya yang berhubungan dengan bidang pendidikan. Belanja sektor kesehatan meliputi pengeluaran untuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan UPTD teknis yang terkait dengan bidang kesehatan, seperti misalnya UPT Laboratorium Daerah atau lainnya.

GAMBAR 16. Sekitar 30% dari total pengeluaran digunakan untuk administrasi pemerintahan.



Tingkat pengeluaran antar kabupaten/kota menunjukkan variasi yang signifikan. Kabupaten Lembata adalah kabupaten yang memiliki pengeluaran perkapita tertinggi, sebesar Rp 2,1 juta, jumlah ini 2 kali lipat lebih tinggi dari pengeluaran perkapita Kabupaten Sumba Barat yang hanya Rp 847.478. Diduga tingginya pengeluaran perkapita ini diakibatkan oleh tingginya juga penerimaan perkapitanya (Gambar 17). Mengingat DAU menyumbang sekitar tiga perempat dari total penerimaan perkapita tingkat kabupaten/kota, sebagai konsekuensinya, pengeluaran pada tingkat kabupaten/kota juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan alokasi DAU (lihat Bab 2).

GAMBAR 17. Terdapat variasi yang sangat besar dalam pengeluaran perkapita antar kabupaten/kota di NTT.



Sejak tahun 2003, tingkat penyerapan anggaran NTT mengalami peningkatan. Pada tahun 2003, hanya 88% dari anggaran yang dianggarkan dapat dibelanjakan (tabel 2). Sejak tahun 2003, tingkat realisasi anggaran mengalami peningkatan hingga mencapai 103% di tahun 2006. Analisa lebih jauh perlu dilakukan untuk mempertimbangkan kapan belanja-belanja tersebut sebaiknya dilakukan, terutama mengingat adanya kecenderungan di berbagai daerah dimana sebagian besar belanja baru dilakukan DI tiga bulan terakhir dari tahun anggaran tersebut.

TABEL 2. Tingkat realisasi anggaran

Klasifikasi ekonomi	2003	2004	2005	2006
Personil (%)	92.43	96.11	90.16	95.56
Barang dan Jasa (%)	88.00	98.09	96.51	105.17
Perjalanan Dinas (%)	90.20	97.26	103.66	111.93
Pemeliharaan (%)	93.11	106.41	103.05	96.87
Modal (%)	78.76	104.42	94.92	102.22
Lain-lain (%)	88.95	100.69	104.61	106.90
Total Pengeluaran (%)	88.56	100.50	98.82	103.11

Sumber: Database NTT PEA, Tim PEACH NTT (2009)

Kesimpulan:

Dengan sumber daya yang terbatas, antara 2003 dan 2007 NTT telah berusaha membuat komposisi pengeluarannya menjadi lebih baik. Kecenderungan ini tidak saja ditunjukkan oleh belanja gaji pegawai yang menurun, namun, yang lebih penting lagi, keseluruhan belanja aparatur juga menurun. Pada saat yang bersamaan pengeluaran untuk pelayanan publik – terutama pendidikan, kesehatan dan infrastruktur – tidak berkurang alokasinya atau bahkan meningkat. Sangatlah penting bagi pemerintah-pemerintah daerah di NTT untuk terus meningkatkan alokasi dana untuk pelayanan publik dan sebaliknya mengurangi belanja aparatur.

Rekomendasi:

- **Pemerintah NTT mesti mengatur kembali pola alokasi anggaran belanja agar sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.** Realokasi anggaran diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya fiskal yang terbatas telah dialokasikan pada seluruh bidang secara tepat. Untuk menjamin kesesuaian antara tujuan pembangunan, prioritas pembangunan dan alokasi anggaran yang tepat diperlukan kemampuan perencanaan yang memadai.
- **Peningkatan kapasitas aparatur perencana diperlukan untuk menjamin adanya kesesuaian antara tujuan pembangunan dan alokasi anggaran.** Upaya peningkatan kapasitas aparatur dapat dilakukan misalnya melalui pelatihan pengendalian perencanaan dan pelatihan penggunaan data base untuk perencanaan.
- **Belanja dekonsentrasi mesti disinkronisasi dengan belanja APBD.** Agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi pada belanja daerah, diperlukan perencanaan yang dapat mensinkronkan sumber-sumber belanja dari pemerintah pusat (misalnya melalui dana Dekonsentrasi) dan belanja yang menggunakan sumber APBD. Dengan demikian kemungkinan duplikasi anggaran pada suatu jenis program atau kegiatan akan dapat diminimalkan.
- **Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memperbaiki standar akuntansi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik kepada masyarakat.** Dalam hal ini upaya peningkatan kapasitas dibutuhkan untuk menjamin bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan publik telah dilakukan secara cermat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

4

Pendidikan

Program pembangunan sektor pendidikan aras provinsi diarahkan pada peningkatan kualitas, relevansi dan pemerataan kesempatan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas dan terampil menguasai dan menerapkan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni), memiliki sikap profesional, mampu memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia bagi kesejahteraan bersama masyarakat sekitarnya.

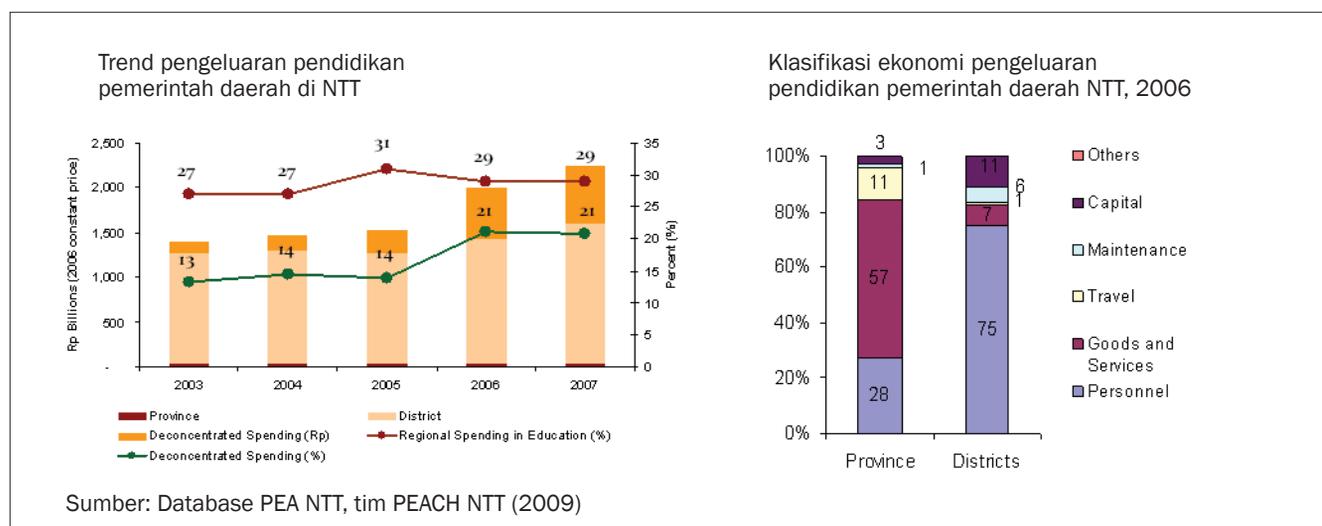
Penjabaran dari arah pembangunan pendidikan tersebut dinyatakan dalam 5 (lima) program utama bidang pendidikan, yaitu:

- * Pembangunan Pendidikan Dasar
- * Pembangunan Pendidikan Menengah (SMU/SMK, MA)
- * Pembangunan Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal)
- * Revitalisasi Manajemen Pendidikan
- * Pengembangan, Penyebaran dan Pemanfaatan IPTEKS

Total pengeluaran NTT di bidang pendidikan (provinsi, kabupaten/kota dan dekonsentrasi) meningkat sebesar 39% dari Rp 1,46 milyar di tahun 2003 menjadi Rp 2,04 milyar di tahun 2007. Proporsi pengeluaran pendidikan dari total pengeluaran NTT yang berkisar pada jumlah 29% (Gambar 18) – kecuali peningkatan kecil pada tahun 2005 – menunjukkan bahwa pemerintah-pemerintah daerah di NTT terus memposisikan sektor pendidikan sebagai sektor prioritas. Pemerintah kabupaten/kota berkontribusi sebesar 75% dari total pengeluaran NTT di sector pendidikan. Sedangkan sisanya dibagi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat melalui belanja dekonsentrasi.

Dari segi pemanfaatannya, sebagian besar belanja pendidikan digunakan untuk belanja modal, kemudian belanja pemeliharaan dan belanja pegawai. Komponen belanja modal mengalami kenaikan dari 64,38 persen (2003) menjadi 75,97 persen (2007); sementara itu komponen belanja pemeliharaan mengalami penurunan dari 18,11 persen (2003) menjadi 10,83 persen (2007), demikian juga belanja pegawai mengalami penurunan dari 11,31 persen (2003) menjadi 7,30 persen (2007).

GAMBAR 18. Trend dan komposisi pengeluaran pendidikan di NTT.



Lebih dari 80% jumlah pengeluaran di sektor pendidikan (provinsi dan kabupaten/kota) digunakan untuk belanja personil dan penyediaan pelayanan (melalui belanja barang dan jasa). Pada tingkat provinsi perhatian lebih banyak diberikan pada penyediaan layanan, terlihat dari jumlah sebesar 57% yang dibelanjakan untuk barang dan jasa. Pada tingkat kabupaten/kota, perhatian lebih banyak diberikan pada pemberi jasa, terlihat dari 75% total pengeluaran tingkat kabupaten/kota digunakan untuk belanja personil, terutama pembayaran gaji guru. Belanja pemeliharaan sendiri tergolong sangat kecil, hanya berjumlah 1% pada tingkat provinsi dan 6% pada tingkat kabupaten/kota (Gambar 18). Sebagai gambaran umum, memang kondisi ruang belajar pada berbagai sekolah di Indonesia tergolong buruk. Ini merupakan akibat dari rendahnya alokasi dana untuk pemeliharaan aset-aset.

KOTAK 2: DANA BOS MEMBANTU MENINGKATKAN MUTU PEDIDIKAN DI NTT

Program BOS merupakan bukti komitmen pemerintah untuk menyediakan pendidikan dasar gratis berkualitas bagi para siswa. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional menekankan bahwa semua warga Indonesia berhak atas pendidikan (Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 31:2) dan Pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai pendidikan dasar tanpa mengenakan biaya (Undang-Undang No. 20/2003, Pasal 34).

Alokasi BOS per siswa telah meningkat dari Rp235.000 pada tahun 2007 menjadi Rp276.000 per siswa sekolah dasar pada tahun 2008, bahkan akan menjadi Rp 397.000 pada tahun 2009. Sedangkan untuk siswa sekolah menengah meningkat dari Rp324.500 menjadi Rp376.000 kemudian bertambah menjadi Rp 570.000 per siswa. Dana BOS untuk setiap siswa pada 2009 nantinya akan disatukan dengan BOS Buku dan besarnya berbeda antara di kota dan kabupaten.

SD GMTI Manulai I di Desa Manulai I Kecamatan Kupang Barat, merupakan salah satu sekolah yang merasakan manfaat yang positif dari kebijakan pemerintah ini. Pada tahun 2008 menerima bantuan dana BOS sebesar Rp 42.300.000,- Menurut **Ny. Aleida Yovita, STh**, Ketua Komite Sekolah SD GMTI Manulai I dana bantuan ini mampu mengatasi masalah pendanaan di sekolah mereka yang merupakan salah satu sekolah milik yayasan swasta. Sekolah ini selalu mengalami masalah pendanaan karena terbatasnya kemampuan finansial pihak yayasan, sementara 90% siswa berasal dari keluarga kurang mampu sehingga sulit bagi pihak sekolah untuk mengandalkan pendanaan dari pungutan siswa “*Dana BOS telah menolong kita untuk memperbaiki mutu pendidikan. Hasil kesepakatan antara Komite Sekolah dan pihak Sekolah yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) menyepakati dana BOS tahun 2008 diperuntukkan bagi; beasiswa untuk siswa tidak mampu, pengadaan kostum olah raga bagi siswa kurang mampu, program remedial bagi siswa yang kurang memiliki kemampuan akademis, bantuan bagi anak perempuan yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan SMP, pengadaan alat peraga, buku penunjang, alat olah raga, dan berbagai program pengembangan guru*” Ujar Ketua Komite.

Sementara menurut kepala sekolah **Bpk Daniel Sanu**, dana BOS juga telah mampu mengurangi beban orang tua untuk membayar biaya sekolah “*Dengan adanya BOS, pihak sekolah tidak perlu memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa yang umumnya berasal dari petani yang kurang mampu. Bahkan biaya pendaftaran murid baru tidak dipungut sama sekali, sehingga orang tua yang kurang mampu saat ini tidak mengalami kesulitan untuk menyekolahkan anaknya.*”

Untuk menjamin keberhasilan program ini, pihak sekolah dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana BOS. Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi NTT, **Drs. Aloysius Min** yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Seksi Kurikulum Sub Dinas TK/SD Dinas Pendidikan Provinsi NTT mengatakan : “*agar supaya dana bantuan itu dapat dikelola secara baik, maka pihak komite sekolah, para guru bahkan orang tua murid dapat mengontrol pelaksanaan program dari setiap sekolah. Peran serta semua pihak tersebut diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu dan kinerja pendidikan*”.

Fokus yang berkelanjutan terhadap sektor pendidikan sebagai prioritas di NTT telah memberikan dampak meningkatnya akses terhadap sekolah dan guru. Dalam periode 2003 dan 2005 rasio jumlah murid per sekolah berkurang pada semua jenjang pendidikan, dan secara tetap menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Ini merupakan hasil dari pembangunan sekolah-sekolah baru dalam jumlah yang besar dalam kurun waktu 2000-2005. Selama periode ini jumlah sekolah bertambah sebanyak 6% untuk pendidikan dasar, 20% untuk pendidikan menengah pertama dan 12% untuk pendidikan menengah atas. Rasio jumlah murid per sekolah sedemikian menandakan bahwa sebagian besar sekolah melayani jumlah penduduk yang kecil, akibat isolasi geografis, selain angka partisipasi yang kecil dengan lebih sedikit jumlah anak yang bersekolah.

TABEL 3.

Rasio jumlah murid per sekolah yang menurun, sementara rasio murid dan guru hampir menyamai rata-rata nasional

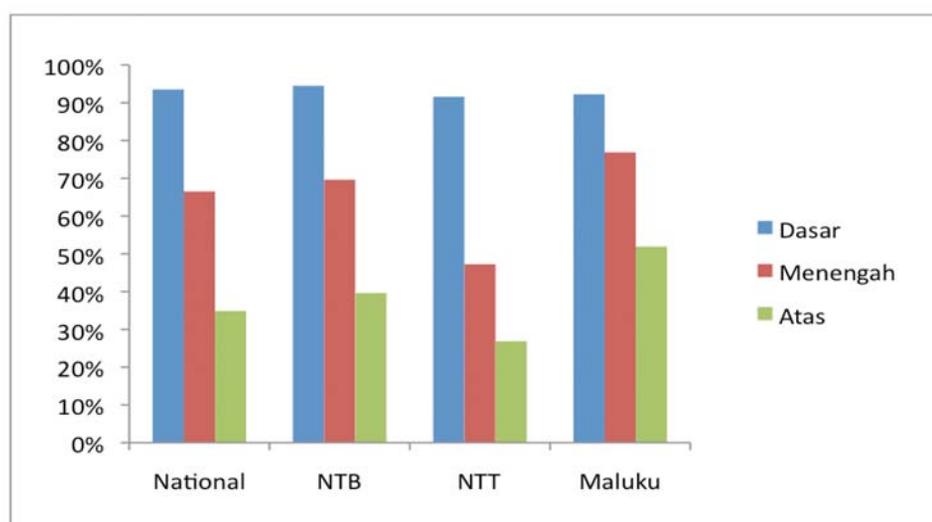
Provinsi		Rasio murid – sekolah			Rasio murid – Guru		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005
NTT	SD	161	152	150	21	20	23
	SMP	242	234	238	15	15	14
	SMA	342	318	325	12	13	14
NTB	SD	157	156	161	20	21	21
	SMP	466	393	418	17	14	15
	SMA	442	424	393	15	15	13
Maluku	SD	134	129	120	18	21	21
	SMP	205	202	189	10	9	9
	SMA	362	360	382	15	17	17
Rata-rata Nasional	SD	178	176	175	21	22	22
	SMP	354	339	366	16	15	15
	SMA	395	382	375	14	14	14

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat (2006)

Meskipun akses terhadap sekolah dan guru terkesan mencukupi, namun ini belum meningkatkan taraf pendidikan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pendidikan. NTT tercatat memiliki proporsi penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan formal pada peringkat kedua tertinggi secara nasional (setelah Papua). Lebih dari 74% total penduduk berumur di atas 10 tahun tercatat tidak menyelesaikan pendidikannya, dan dari jumlah tersebut umumnya hanya menyelesaikan sekolah dasar. Kecenderungan ini sejalan dengan Angka Partisipasi Murni (APM) di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas. APM untuk pendidikan dasar berada 2% di bawah rata-rata nasional. Namun untuk SMP dan SMA kesenjangan cukup mencolok. APM untuk SMP di NTT sebesar 47% sementara di tingkat nasional rata-rata 66%. Sedangkan APM untuk SMA sebesar 27%, atau 8% dibawah rata-rata nasional (Gambar 19). Alasan terjadinya kasus putus sekolah umumnya adalah alasan untuk membantu ekonomi keluarga dan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan.

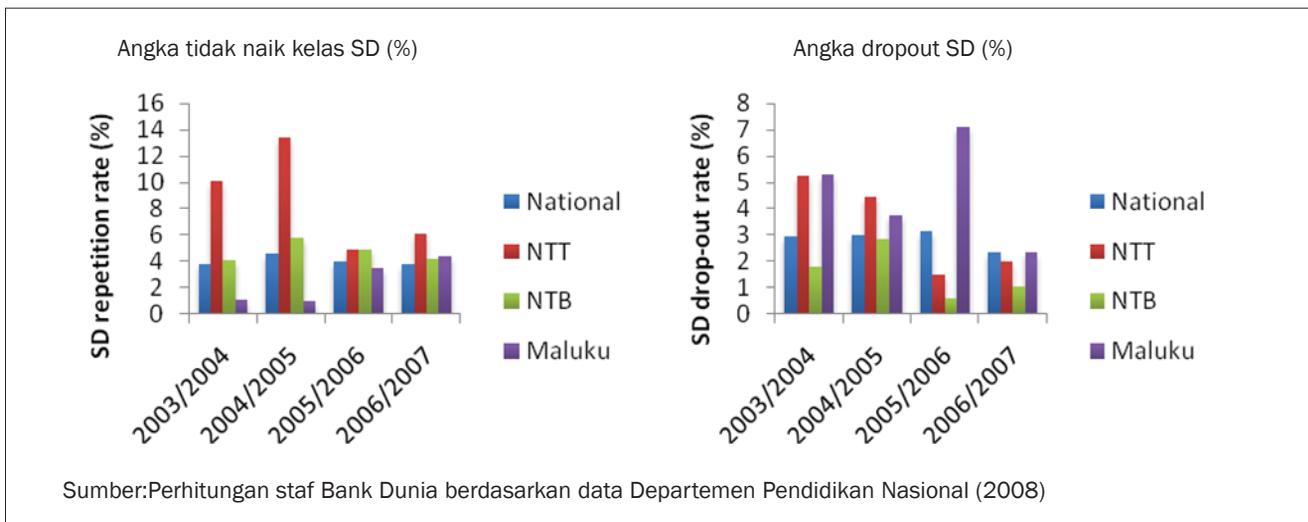
GAMBAR 19.

Angka partisipasi murni untuk sekolah dasar hampir mendekati rata-rata nasional, namun untuk sekolah menengah pertama dan atas masih jauh tertinggal di bawah rata-rata nasional



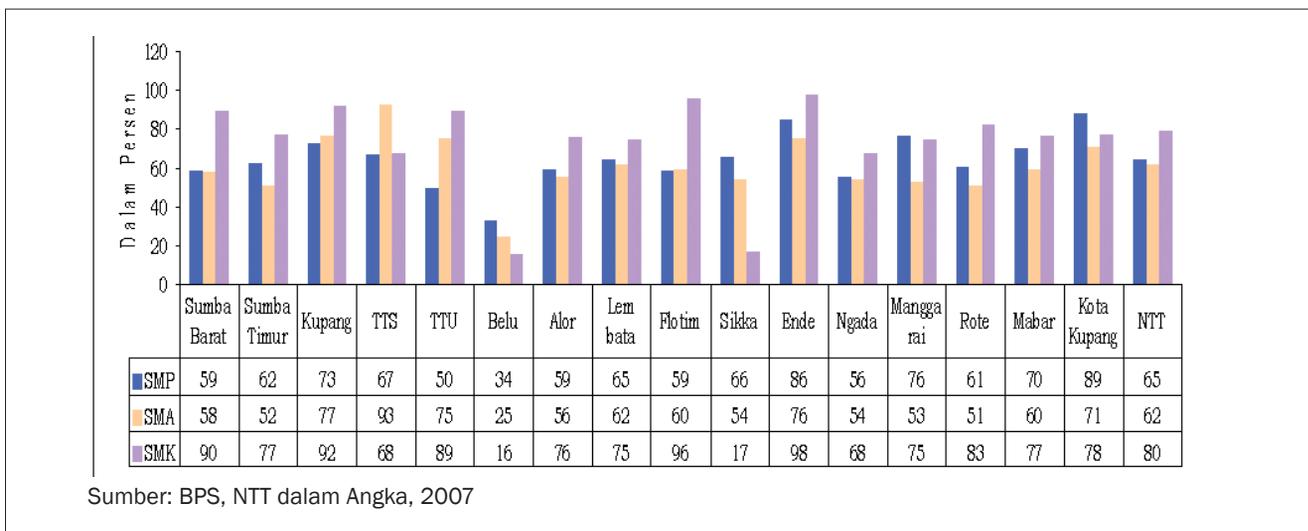
Sumber:
Perhitungan staf
Bank Dunia
berdasarkan data
Susenas (2006)

GAMBAR 20. Kualitas pendidikan dasar (SD) mengalami peningkatan.



Tingkat kelulusan Ujian Nasional jenjang pendidikan SMP, SMA dan SMK pada kabupaten/kota di NTT sangat bervariasi. Pada tingkat SMP, rata-rata tingkat kelulusan pada tingkat provinsi tahun 2006/2007 sebesar 65%. Terdapat 9 kabupaten dengan persentase kelulusan di bawah rata-rata provinsi dan terdapat 7 kabupaten/kota dengan tingkat kelulusan di atas rata-rata provinsi (Gambar 21). Persentase kelulusan SMP tertinggi terdapat di Kota Kupang (89%) dan persentase paling rendah di Kabupaten Belu (34%). Pada tingkat SMA, rata-rata tingkat kelulusan pada tingkat provinsi sebesar 62%. Terdapat 10 kabupaten dengan persentase kelulusan di bawah rata-rata provinsi dan terdapat 6 kabupaten/kota dengan persentase kelulusan di atas rata-rata provinsi. Pada jenjang pendidikan SMA, Kabupaten TTS memiliki persentase kelulusan tertinggi (93%) dan Kabupaten Belu memiliki persentase kelulusan paling rendah (25%). Pada jenjang pendidikan SMK, rata-rata tingkat kelulusan pada tingkat provinsi sebesar 80%. Terdapat 10 kabupaten/kota yang memiliki persentase kelulusan di bawah rata-rata provinsi dan 6 kabupaten di atas rata-rata provinsi. Pada jenjang SMK, persentase kelulusan tertinggi terdapat di Kabupaten Flores Timur dan persentase kelulusan paling rendah di Kabupaten Belu dan Sikka.

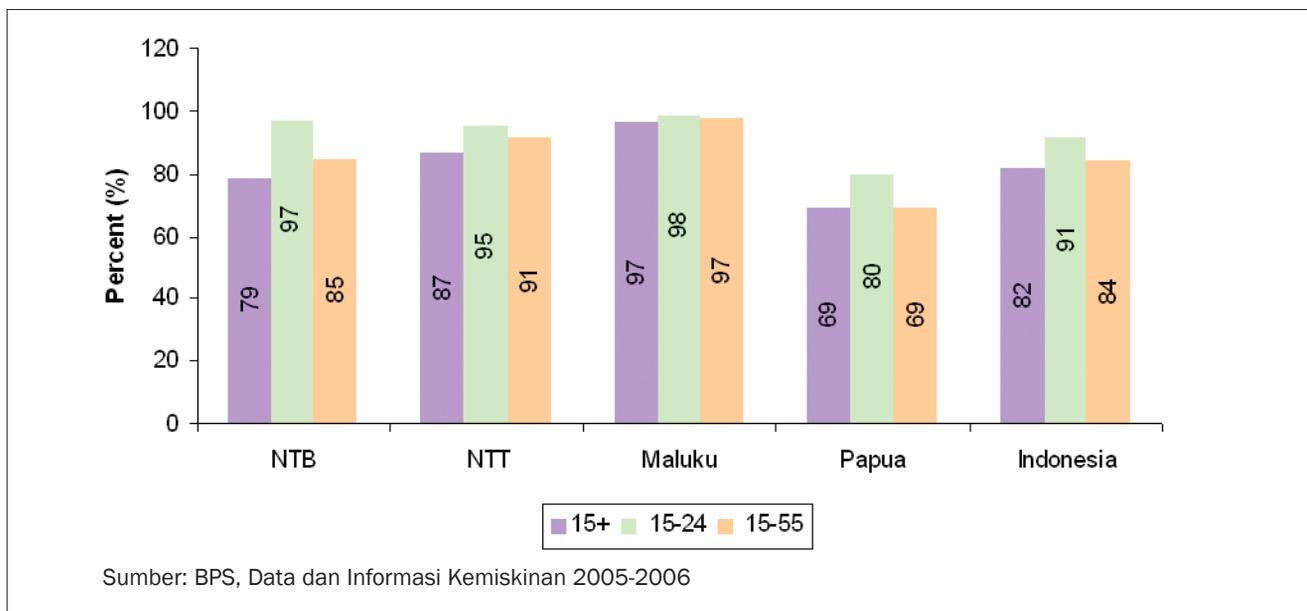
GAMBAR 21. Tingkat kelulusan Ujian Nasional SMP, SMA, dan SMK Kab/Kota di NTT, 2006/2007.



Persentase penduduk melek huruf di NTT relatif baik dibanding NTB, Papua dan rata-rata nasional, walaupun lebih rendah dari Maluku. Gambaran ini menunjukkan bahwa betapapun NTT tercatat memiliki proporsi penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan formal pada peringkat kedua tertinggi secara nasional (setelah Papua), namun dalam hal melek huruf prestasi NTT cukup baik, untuk kategori penduduk usia 15 tahun ke atas, 15-25 tahun dan 15-55 tahun (gambar 22). Hal ini diduga berkaitan dengan keberhasilan program pendidikan luar sekolah pemberantasan buta huruf.

GAMBAR 22.

Persentase penduduk melek huruf NTT cenderung lebih baik dibandingkan NTB, Papua, dan rata-rata nasional



Kesimpulan:

Anggaran pendidikan yang relatif besar sebagian besar digunakan untuk belanja personil serta barang dan jasa. Pada tingkat provinsi perhatian lebih banyak diberikan pada penyediaan layanan (belanja barang dan jasa); sementara pada tingkat kabupaten/kota, perhatian lebih banyak diberikan pada belanja personil, terutama pembayaran gaji guru.

Peningkatan dalam pengeluaran pendidikan di NTT telah memperlihatkan hasil yang baik berupa meningkatnya akses terhadap sekolah dan guru, yang ditunjukkan oleh perbaikan rasio murid per sekolah serta rasio murid dan guru serta persentase penduduk melek huruf yang relatif tinggi, meskipun ini belum cukup untuk memperkuat *outcomes* pendidikan secara menyeluruh. NTT berada pada peringkat kedua dalam banyaknya jumlah penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Kecenderungan ini sejalan dengan APM sekolah dasar yang mendekati rata-rata nasional, namun APM untuk SMP dan SMA masih tertinggal secara signifikan di bawah rata-rata nasional. Dengan demikian, fokus pemerintah NTT perlu diberikan untuk memastikan bahwa anak usia sekolah dapat meneruskan dan menyelesaikan pendidikan formal.

Persentase kelulusan siswa pada aras SMP, SMU dan SMK bervariasi di antara kabupaten/kota di NTT. Jumlah kabupaten/kota dengan persentase kelulusan di bawah rata-rata provinsi lebih besar dibanding jumlah kabupaten dengan persentase kelulusan di atas rata-rata provinsi. Hal ini mengisyaratkan tentang belum meratanya penyelenggaraan pendidikan pada kabupaten/kota di NTT.

Rekomendasi:

- **Persentase anggaran pendidikan yang relatif besar (di atas 20%) perlu diikuti dengan perubahan struktur belanja.** Alokasi untuk belanja modal dan pemeliharaan perlu ditingkatkan, terutama pada kabupaten/kota.
- **Pemerintah provinsi NTT harus memprioritaskan upaya perbaikan *outcomes* sektor pendidikan.** Perbaikan *outcomes* dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas belanja untuk sektor pendidikan terutama lewat perbaikan kualitas pendidikan dasar (SD dan SMP), penyebaran SMU/SMK yang lebih merata serta upaya pemberantasan buta huruf di beberapa daerah.
- **Diperlukan upaya penataan kembali kewenangan antara dinas pendidikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi NTT.** Penataan kewenangan ini penting untuk memperbaiki layanan publik di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan serta pengendalian terhadap kualitas proses belajar mengajar.

5

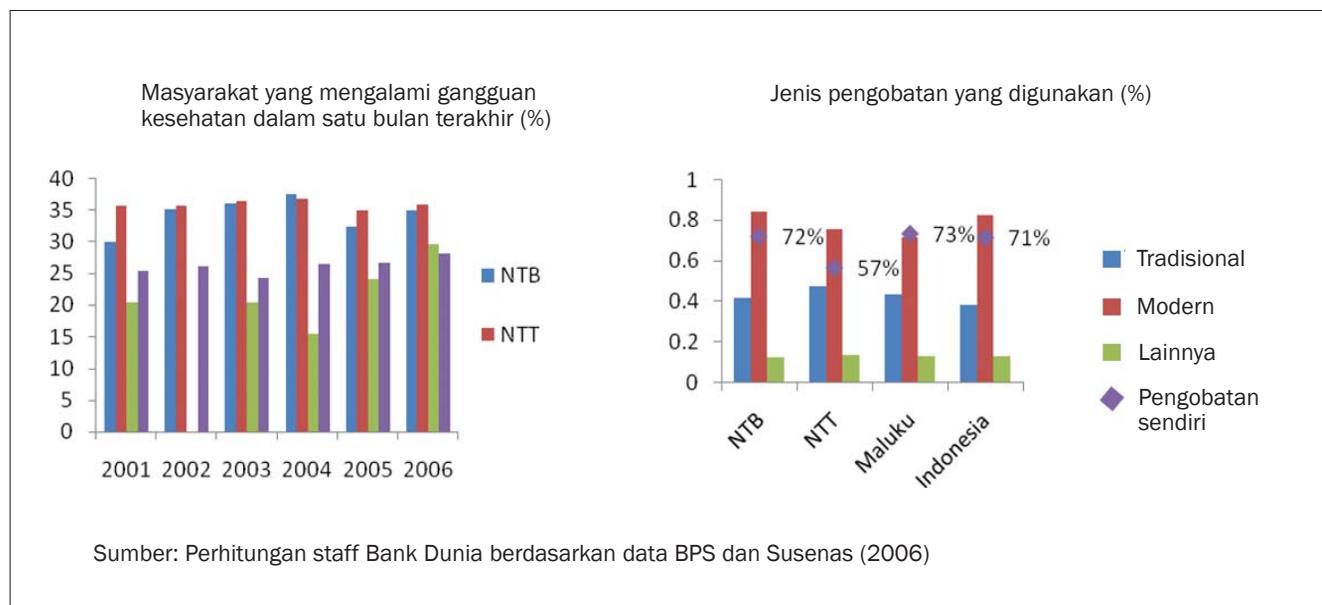
Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada penciptaan sumber daya manusia yang sehat fisik, mental dan sosial, yang mempunyai pola perilaku hidup sehat, dengan secara merata dan menjangkau seluruh warga masyarakat, peningkatan penyuluhan pola perilaku sehat dan peningkatan kualitas penduduk serta peningkatan kinerja lembaga kesehatan. Arah kebijakan pembangunan kesehatan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa program pokok sebagai berikut.

- * Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan
- * Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat
- * Peningkatan Kualitas Layanan Medik
- * Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Kesehatan
- * Penyuluhan Kesehatan dan Pengembangan Swadaya Masyarakat
- * Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pembangunan Kesehatan

NTT menghadapi persoalan yang signifikan di bidang kesehatan dan nutrisi, termasuk tingginya angka kekurangan gizi dan jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Kasus-kasus kelaparan dan kekurangan gizi selalu terjadi di NTT, terutama pada saat musim kering dan minim atau gagal panen. Pada gilirannya, kekurangan gizi menjadi kondisi yang memudahkan terjadinya penyakit lain. Pada tahun 2006, satu dari tiga orang di NTT menderita sakit pada tiap bulannya. Angka ini lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang jumlahnya satu dari empat. Jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan juga lebih tinggi dibandingkan provinsi tetangganya, NTB dan Maluku.

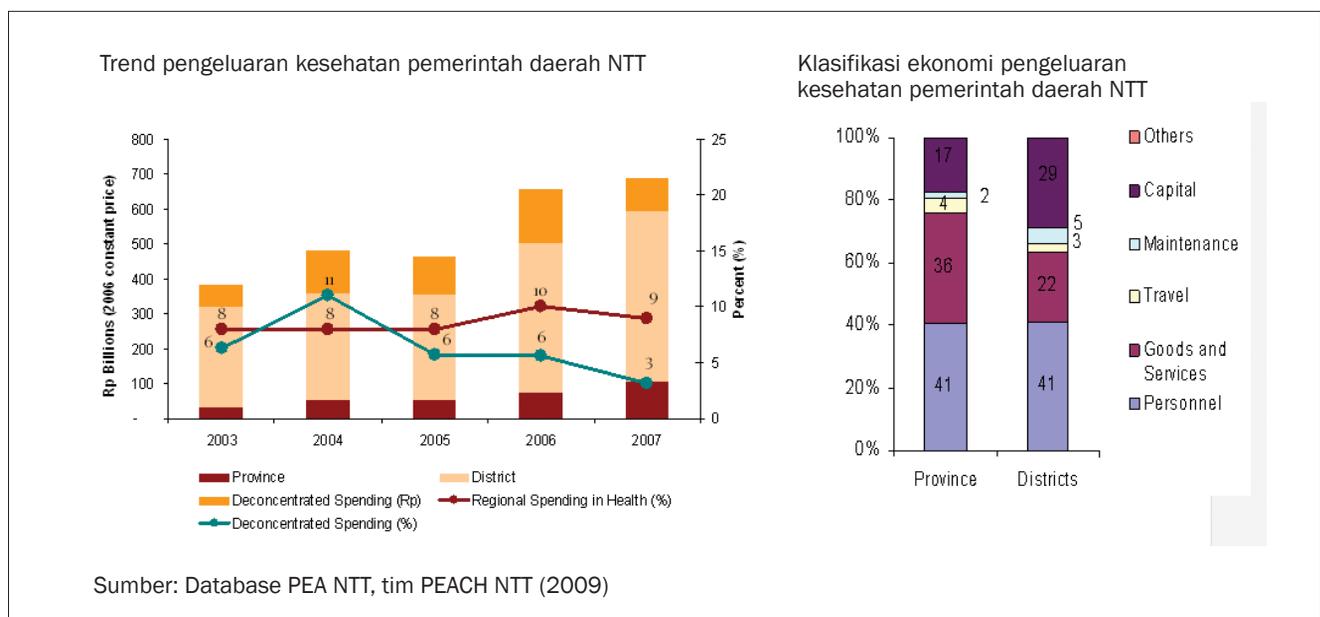
GAMBAR 23. Masyarakat NTT lebih sering mengalami gangguan kesehatan namun cenderung menghindari pengobatan sendiri.



Meskipun tingkat masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan di NTT tinggi, namun lebih sedikit penduduk NTT yang menggunakan metode pengobatan sendiri (*self-treatment*), misalnya menetapkan sendiri jenis obat yang dipakai. Angka tingkat penanganan sendiri sebesar 57% sangatlah rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional (71%) dan provinsi tetangganya (Gambar 23). Salah satu penyebabnya adalah akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan gratis yang relatif lebih baik di NTT.

Pada kurun waktu 2003 dan 2007, total pengeluaran daerah NTT untuk kesehatan (provinsi, kabupaten/kota dan dekonsentrasi) meningkat sebanyak 40%. Diperkirakan sekitar 9% dari total pengeluaran publik di daerah dibelanjakan untuk sektor kesehatan, dan proporsi ini relatif stabil dalam periode tersebut. Berdasarkan perhitungan perkapita, pengeluaran di sector kesehatan meningkat sebesar 87%, dari Rp 84.000 di tahun 2003 menjadi Rp 157.000 di tahun 2007 (Gambar 24).

GAMBAR 24. Trend dan komposisi pengeluaran kesehatan pemerintah daerah NTT



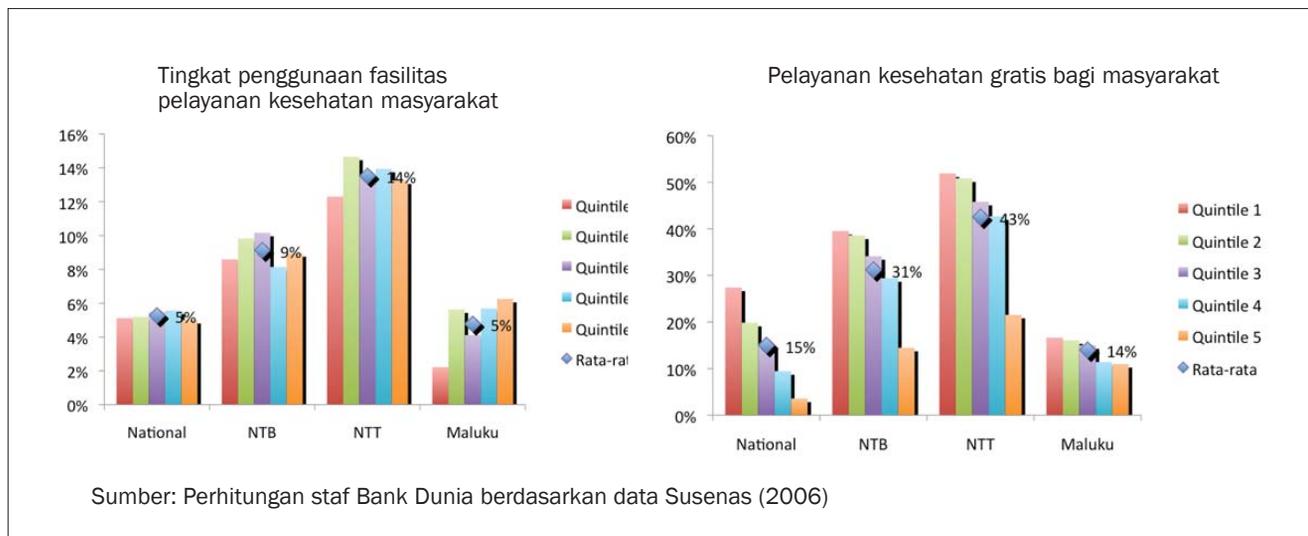
Komponen terbesar pengeluaran pemerintah daerah untuk kesehatan adalah untuk gaji, sedangkan porsi untuk pemeliharaan sangat kecil. Porsi terbesar dari pengeluaran pemerintah daerah untuk kesehatan (provinsi dan kabupaten/kota) – sekitar 40% – adalah untuk membayar gaji yang mencakup gaji untuk staf kesehatan dan staf administrasi. Pada saat yang sama, kurang dari 5% dibelanjakan untuk pemeliharaan (gambar 24). Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran terbanyak kedua, dimana pemerintah provinsi membelanjakan sebanyak 36% dari total pengeluarannya untuk belanja barang dan jasa ini, sementara pemerintah kabupaten/kota 22% dari total pengeluaran kesehatannya. Belanja modal, yang membiayai sebagian besar infrastruktur kesehatan, terhitung berjumlah 17% di tingkat provinsi dan 29% di tingkat kabupaten/kota. Untuk belanja pemeliharaan, yang jumlahnya hanya 2% dari total pengeluaran kesehatan di tingkat provinsi dan 5% di tingkat kabupaten kota, dikuatirkan akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari, karena terlalu sedikit jumlahnya untuk menjaga agar kondisi infrastruktur kesehatan tetap baik.

Meningkatnya pengeluaran di sektor kesehatan telah mendorong terciptanya akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan di NTT. Pada tahun 2006, rata-rata 14% dari penderita sakit di NTT telah menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah, baik rawat jalan maupun rawat inap (gambar 25). Fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang dimaksud ini meliputi Rumah Sakit, Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu (Pustu). Tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tersebut lebih tinggi 5% dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi tetangganya, NTB (9%) dan Maluku (5%).

Penduduk NTT memiliki akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan gratis dibandingkan tingkat rata-rata penduduk Indonesia. Rata-rata 43% rumah tangga di NTT menerima salah satu bentuk pelayanan kesehatan gratis ini. Jumlah ini hampir tiga kali lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yang jumlahnya 15% dan lebih

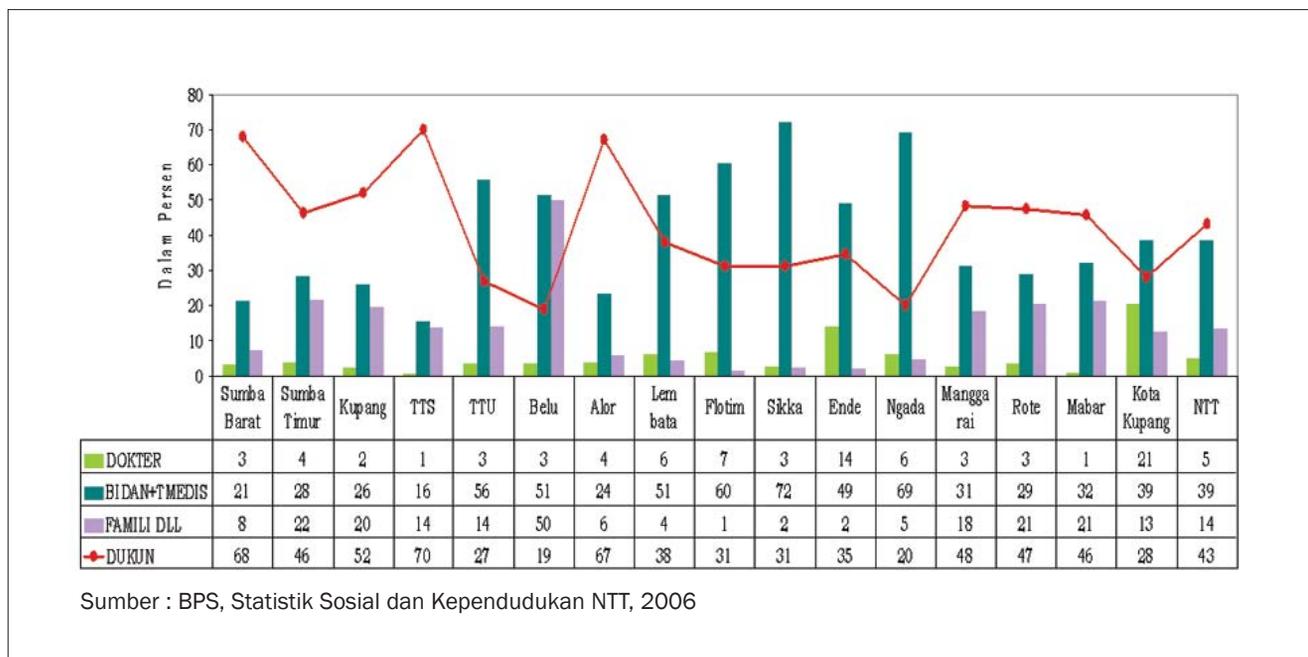
baik dibandingkan provinsi tetangganya, NTB (31%) dan Maluku (14%). Pelayanan kesehatan gratis ini dapat berbentuk pelayanan kesehatan dasar secara gratis di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan asuransi untuk masyarakat miskin (ASKESKIN), penyediaan Kartu Miskin, atau perlakuan-perlakuan khusus lainnya kepada masyarakat miskin. Akses terhadap pelayanan gratis ini juga menunjukkan adanya kecenderungan keberpihakan yang besar terhadap masyarakat miskin. Diperkirakan setengah dari kelompok berpendapatan paling rendah menerima pelayanan kesehatan gratis ini. Sementara itu tingkat pemanfaatan pelayanan seperti ini semakin berkurang bersamaan dengan meningkatnya pendapatan.

GAMBAR 25. Meningkatnya pengeluaran sektor kesehatan mendorong terciptanya akses yang lebih tinggi terhadap pelayanan kesehatan



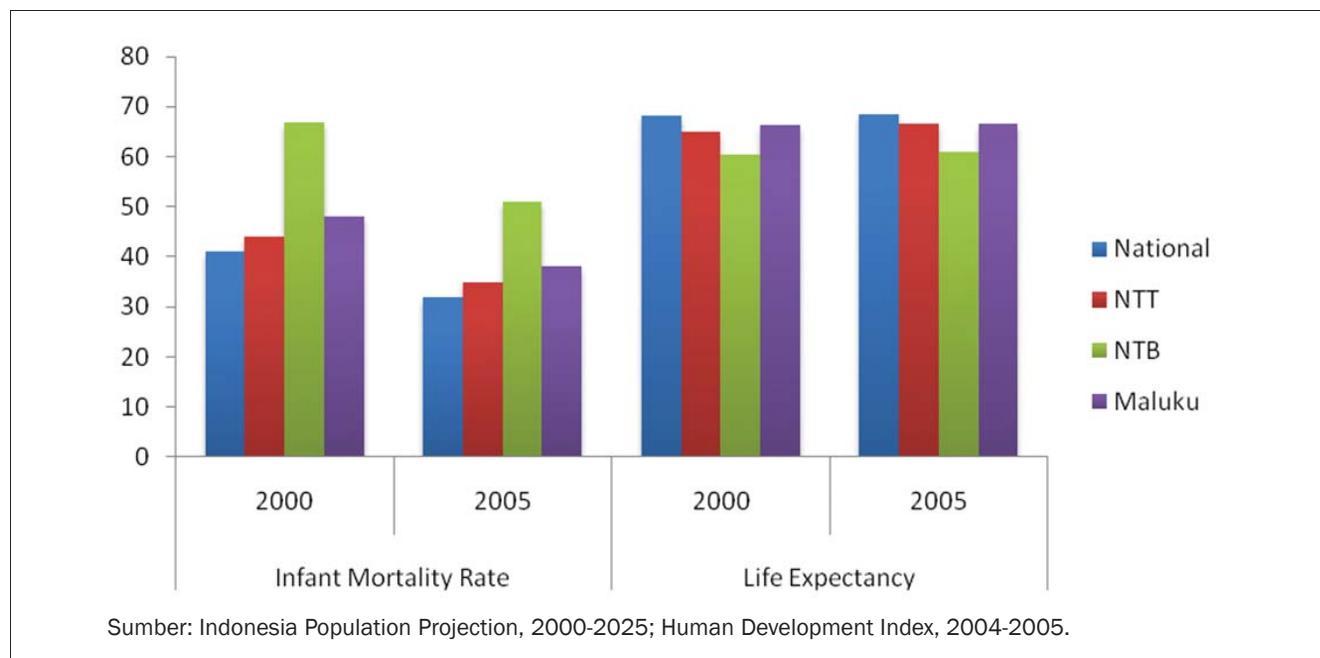
Dibanding dengan NTB dan Maluku, angka kematian bayi NTT lebih rendah, namun masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran mengalami penurunan dari 44 (2000) menjadi 35 (2005) dan diestimasi oleh Biro Pusat Statistik (BPS) akan turun menjadi 31 per 1000 kelahiran pada tahun 2007. Kondisi seperti ini antara lain dipengaruhi oleh pertolongan kelahiran pada saat melahirkan. Sebagaimana nampak pada gambar 26 bahwa penolong kelahiran yang paling dominan adalah bukan tenaga medis yaitu dukun dan famili (keluarga) sebesar 56,65 persen; sementara tenaga medis (dokter dan bidan) hanya sebesar 43,35 persen.

GAMBAR 26. Persentase Balita di NTT, menurut Dukun, 2006.



Angka harapan hidup masyarakat NTT lebih baik dari rata-rata angka harapan hidup provinsi NTB, namun sedikit lebih rendah daripada rata-rata angka harapan hidup tingkat nasional. Kualitas hidup yang baik dan layanan kesehatan yang memadai akan menyebabkan rata-rata umur hidup manusia lebih lama. Kondisi yang ada saat ini membuktikan bahwa kualitas hidup dan layanan kesehatan di Provinsi NTT cukup baik hampir sama dengan keadaan di provinsi Maluku, bahkan lebih baik daripada provinsi NTB.

GAMBAR 27. Tingkat kematian bayi dan angka harapan hidup



Kesimpulan:

Sebagian besar belanja kesehatan digunakan untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Sementara itu belanja pemeliharaan sangat kecil. Belanja modal, yang membiayai sebagian besar infrastruktur kesehatan, terhitung berjumlah 17% di tingkat provinsi dan 29% di tingkat kabupaten/kota. Untuk belanja pemeliharaan, yang jumlahnya hanya 2% dari total pengeluaran kesehatan di tingkat provinsi dan 5% di tingkat kabupaten/kota, dikuatirkan akan menimbulkan kesulitan di kemudian hari, karena terlalu sedikit jumlahnya untuk menjaga agar kondisi infrastruktur kesehatan tetap baik.

Peningkatan dalam alokasi pengeluaran sektor kesehatan telah berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan. Dibandingkan dengan rata-rata nasional maupun provinsi tetangganya, NTB dan Maluku, NTT memiliki jumlah penderita sakit yang melakukan pengobatan sendiri (*self-treatment*) yang lebih sedikit (sebagai contoh mereka yang membeli obat sendiri dibanding pergi ke dokter). Selain itu, NTT juga memiliki tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih tinggi serta juga proporsi rumah tangga penerima pelayanan kesehatan gratis yang lebih banyak.

Meskipun demikian, peningkatan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap membaiknya outcome bidang kesehatan secara menyeluruh. Tingkat morbiditas (*morbidity rate*), yaitu proporsi penderita sakit dalam satu bulan terhadap total penduduk, masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Malnutrisi juga terus menjadi masalah, dan rendahnya nutrisi ini diduga berkontribusi terhadap terjadinya banyak masalah kesehatan di NTT. Mencapai indikator kesehatan yang lebih baik (misalnya tingkat morbiditas) membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan dukungan pemerintah untuk tidak saja memperkuat akses terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga kualitas pelayanan tersebut.

Rekomendasi:

- **Alokasi Belanja bidang kesehatan sebaiknya diarahkan pada upaya peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat.** Restrukturisasi belanja bidang kesehatan mesti dilakukan dalam kaitan dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Alokasi belanja pegawai yang mendominasi belanja bidang kesehatan mesti diprioritaskan pada pengeluaran untuk tenaga-tenaga fungsional (dokter, dokter ahli / spesialis, tenaga medis dan perawat) dengan demikian ratio layanan untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan dapat terus diperbaiki.
- **Pemerintah provinsi NTT harus meningkatkan layanan kesehatan pada daerah-daerah terpencil, pedesaan dan wilayah perbatasan.** Masalah *morbidity rate* yang relatif tinggi terutama terjadi pada daerah-daerah yang jauh dari kota, karena itu upaya memperbaiki masalah ini sekaligus perbaikan layanan kesehatan mesti dilakukan terutama pada wilayah wilayah terpencil, pedesaan dan perbatasan.
- **Koordinasi antara dinas kesehatan pada aras provinsi dan kabupaten / kota mesti ditingkatkan agar upaya peningkatan layanan kesehatan dapat dimaksimalkan.** Peningkatan layanan kesehatan melalui sarana dan prasarana kesehatan mesti ditunjang dengan tersedianya tenaga fungsional bidang kesehatan yang umumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota. Karena setiap tambahan fasilitas fisik bidang kesehatan (misalnya pustu, puskesmas) hanya akan efektif berfungsi bila tersedia tenaga medis yang cukup untuk melengkapinya.

6

Infrastruktur⁴

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk menunjang pengembangan kegiatan ekonomi pada sektor-sektor produksi andalan serta menghubungkan wilayah ekonomi yang satu dengan lainnya sehingga tercipta kesatuan ekonomi yang memungkinkan meningkatnya mobilitas faktor produksi, barang dan jasa. Program pokok yang dilaksanakan adalah:

- * Peningkatan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan Udara
- * Peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan propinsi.
- * Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi.
- * Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman

Program pembangunan infrastruktur lebih ditekankan pada upaya meningkatkan produksi komoditas pertanian, namun hasil yang didapatkan belum memadai. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2004-2006, produksi 8 komoditas tanaman pangan yang paling menonjol di NTT justru mengalami penurunan.

TABEL 4. Luas Panen, Rata-rata Hasil dan Produksi Tanaman Pangan, 2004-2006.

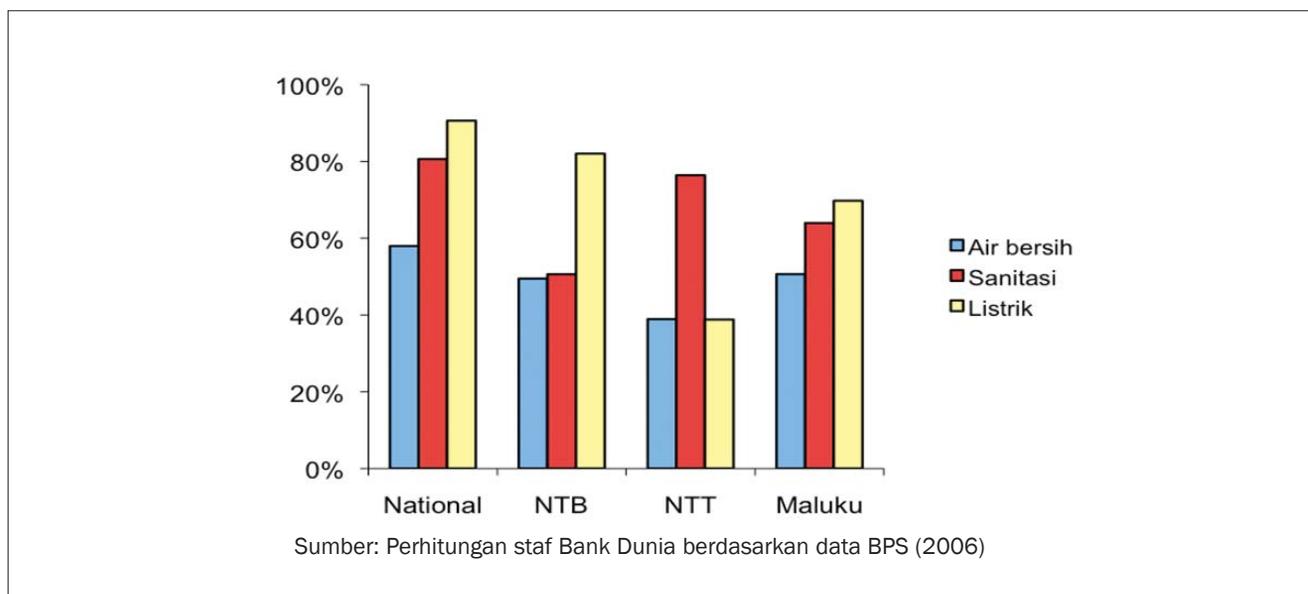
No	Komoditas	2004			2005			2006		
		Luas Panen (ha)	Rata-2 Hasil (kw/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Rata-2 Hasil (kw/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Rata-2 Hasil (kw/ha)	Produksi (ton)
1	Padi	183,728	30	552,205	162,539	28	461,008	173,208	30	511,910
2	Jagung	264,907	24	622,812	239,588	23	552,439	252,410	23	582,964
3	Ubi Kayu	99,498	105	1,041,280	86,464	103	891,783	89,591	105	938,010
4	Ubi Jalar	16,257	78	126,406	12,930	77	99,748	14,480	77	111,006
5	Kacang Tanah	17,225	10	17,680	14,374	10	14,518	17,356	10	17,832
6	Kacang Kedelai	2,308	10	2,369	2,093	10	2,118	2,694	10	2,786
7	Kacang Hijau	24,012	8	19,896	20,010	8	16,695	22,598	8	19,534
8	Sorghum	6,690	9	5,863	4,100	8	3,449	7,362	8	6,002

Sumber: NTT dalam Angka, 2005-2007

NTT memiliki akses terhadap sanitasi lebih baik dibandingkan provinsi-provinsi tetangganya dan sedikit dibawah angka rata-rata nasional. Diperkirakan 76% rumah tangga di NTT memiliki akses terhadap salah satu bentuk fasilitas sanitasi. Jumlah ini hanya 5% di bawah rata-rata nasional, namun jauh lebih baik dibandingkan provinsi tetangganya, NTB dan Maluku (gambar 28). Selain itu, juga lebih dari 60% rumah tangga di NTT memiliki fasilitas sanitasi sendiri. Jumlah ini 2% di atas rata-rata nasional serta 20% dan 10% lebih tinggi dari NTB dan Maluku di tahun 2006. Kendatipun demikian, sebagian dari fasilitas-fasilitas sanitasi ini masih sangat sederhana dan bersifat semi-permanen.

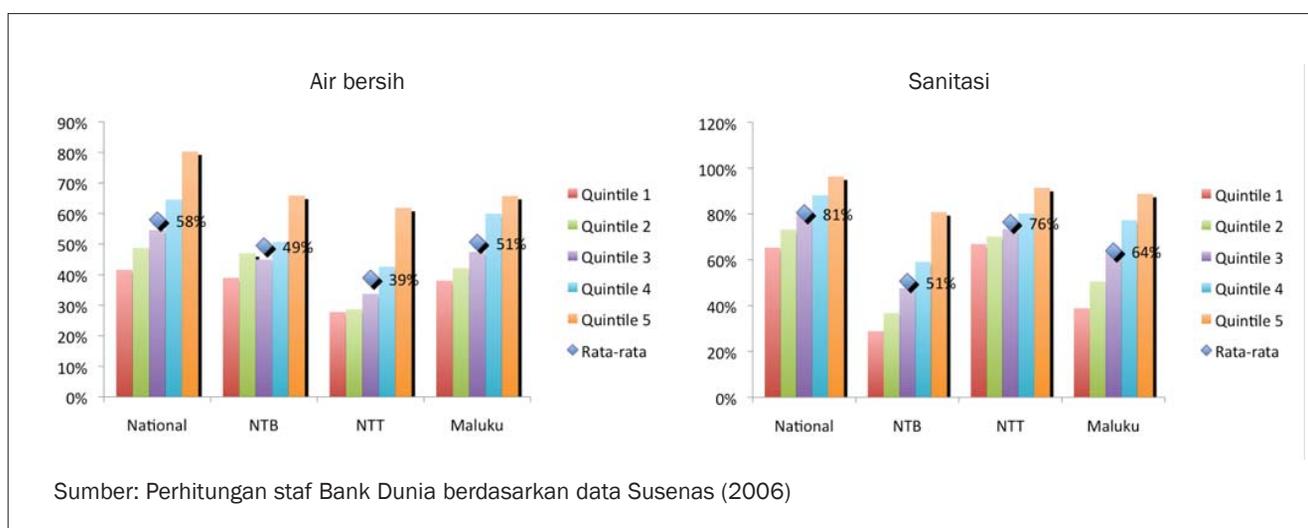
⁴ Pengeluaran pemerintah daerah di sektor infrastruktur mencakup perumahan, air dan sanitasi, serta transportasi. Pengeluaran untuk listrik dibiayai dan merupakan urusan pemerintah pusat. Data-data yang dianalisa dalam laporan ini hanya mencakup data transportasi, air bersih, sanitasi dan penerangan/listrik, mengingat kendala yang ditemui dalam memperoleh data yang lebih rinci.

GAMBAR 28. NTT memiliki kinerja yang baik dalam penyediaan akses terhadap sanitasi, namun kurang untuk air bersih dan penerangan/listrik



Jika akses terhadap sanitasi tergolong tinggi, akses terhadap air bersih justru rendah, apalagi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional (gambar 29). Pada tahun 2006, lebih dari 39% rumah tangga tidak memiliki akses terhadap air bersih. Angka ini 20% di bawah rata-rata nasional, dan juga lebih rendah dibandingkan dengan Maluku dan NTB. Minimnya curah hujan merupakan faktor yang mempengaruhi secara signifikan kelangkaan terhadap air bersih. Terdapat banyak kasus dimana orang harus berjalan sangat jauh hanya untuk mendapatkan air guna mencukupi kebutuhannya. Kelangkaan air bersih juga merupakan persoalan besar bagi kelompok miskin di NTT, karena kurang dari 30% kelompok berpendapatan paling rendah yang memiliki akses terhadap air, suatu perbedaan yang sangat mencolok jika dibandingkan dengan jumlah lebih dari 60% pada kelompok berpendapatan paling tinggi (gambar 29). NTT juga mengalami banyak kasus diare, yang diduga turut disebabkan oleh kelangkaan fasilitas penyediaan air.

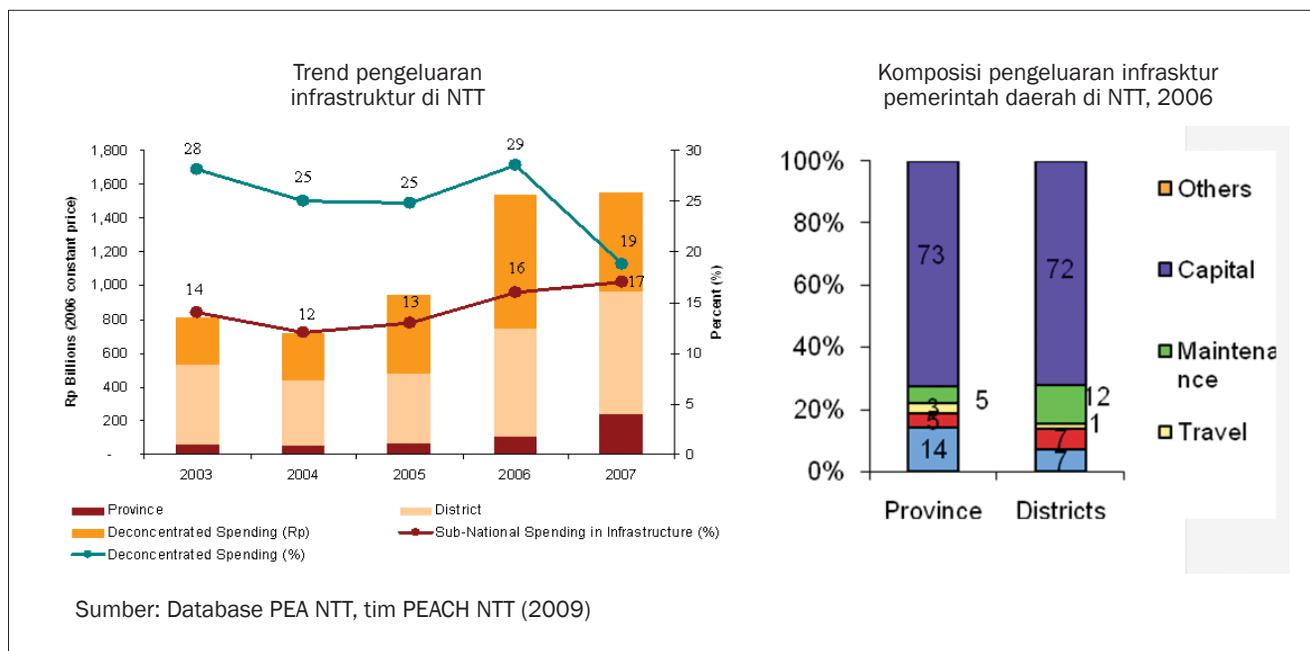
GAMBAR 29. NTT mengalami kesulitan dalam akses terhadap air bersih, meskipun memiliki sanitasi yang jauh lebih baik dibanding provinsi tetangganya.



Akses terhadap penerangan (listrik) adalah tantangan lain NTT. Hanya 36% rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan listrik Negara (PLN) pada tahun 2006. Jumlah ini sangat jauh berada di bawah rata-rata nasional dan provinsi tetangganya, Maluku dan NTB (gambar 28). Meski demikian, perlu dicatat bahwa pelayanan listrik dibiayai oleh pemerintah pusat.

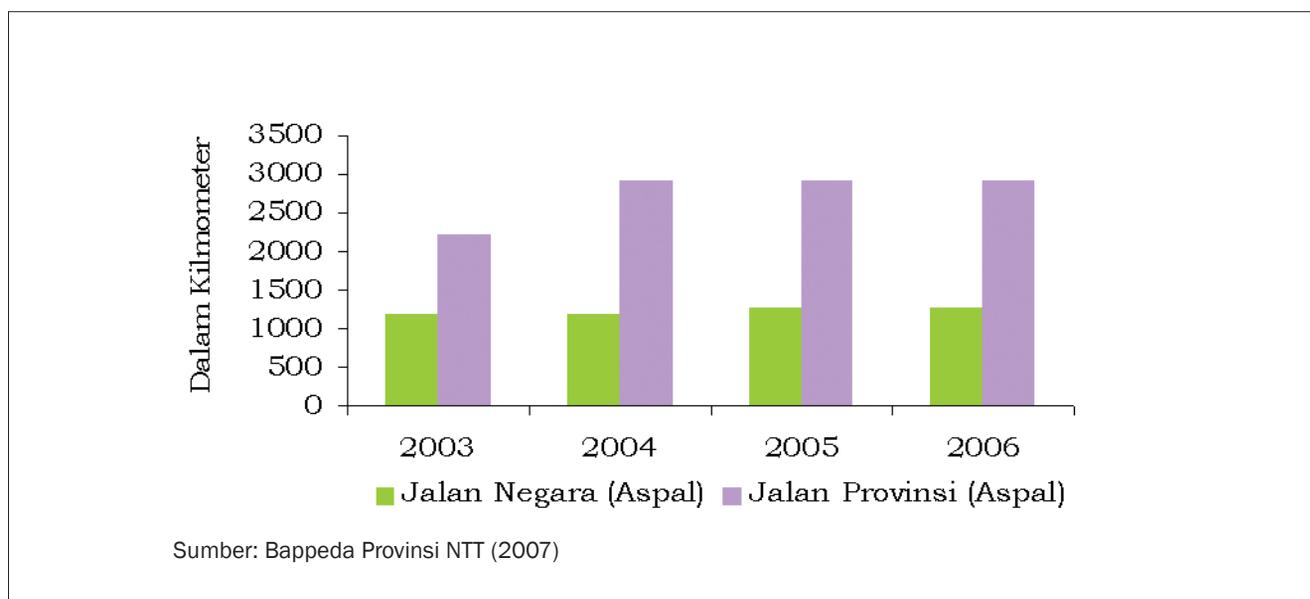
Pengeluaran NTT (provinsi dan kabupaten/kota) di bidang infrastruktur terus meningkat, baik jumlah nilainya maupun proporsinya. Setelah menurun jumlahnya di tahun 2004, proporsi alokasi pengeluaran NTT di sector infrastruktur meningkat kembali menjadi 17% di tahun 2007, dari sebelumnya yang hanya 14% di tahun 2003. Secara total, terjadi peningkatan jumlah pengeluaran infrastruktur sebanyak 60% dari tahun 2003 hingga 2007, dengan tingkat kenaikan rata-rata 14% per tahun. Pada tahun 2007, pemerintah kabupaten/kota menanggung 77% dari total pengeluaran infrastruktur NTT, namun sejak 2003 kontribusi provinsi secara berangsur-angsur meningkat.

GAMBAR 30. Trend dan komposisi pengeluaran infrastruktur di NTT



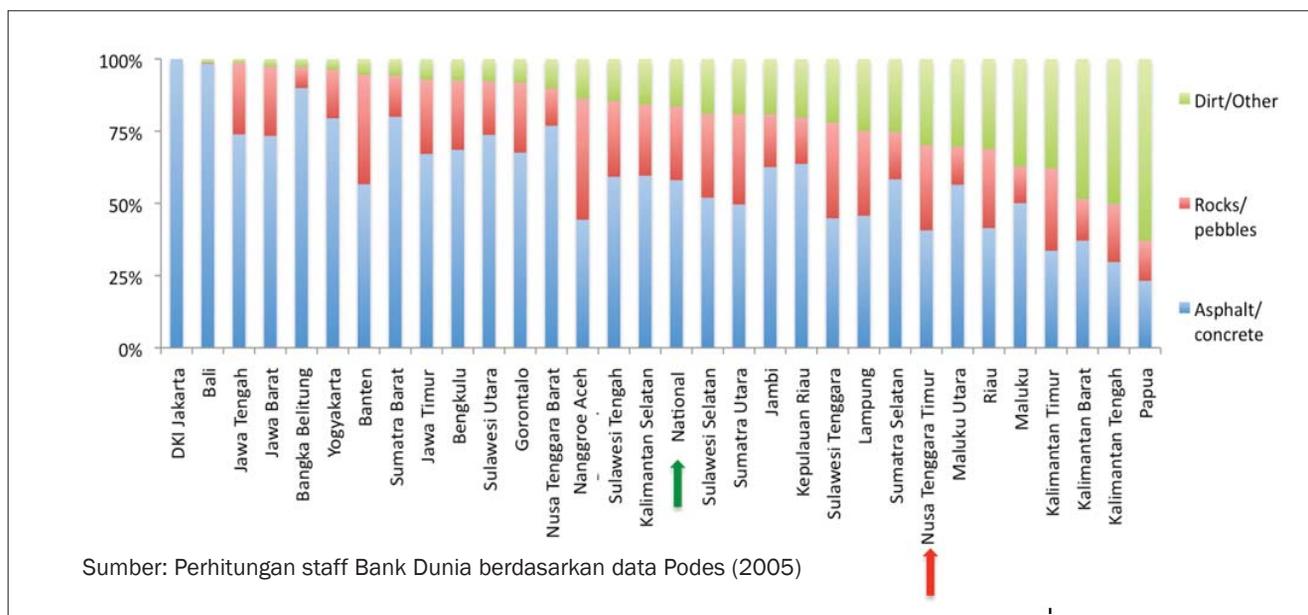
Mayoritas pengeluaran infrastruktur digunakan untuk membangun infrastruktur baru dan pemeliharaan. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, NTT membelanjakan sekitar 75% dari anggaran infrastrukturnya untuk membangun fasilitas infrastruktur baru. Pengeluaran untuk belanja modal ini berjumlah 77% pada tingkat provinsi dan 75% pada tingkat kabupaten/kota dari total pengeluaran infrastruktur. Belanja pemeliharaan adalah kelompok belanja terbesar kedua yang mencakup 12% dari total pengeluaran infrastruktur kabupaten/kota dan 5% pada tingkat provinsi (gambar 30).

GAMBAR 31. Perkembangan jalan negara dan provinsi di NTT



Pengeluaran infrastruktur yang semakin meningkat tersebut telah menambah panjang jalan aspal tingkat provinsi namun kondisi jalan di tingkat perdesaan masih didominasi jalan batu dan tanah. Karena itu secara nasional, NTT menempati peringkat 10 terbawah untuk provinsi dengan kondisi jalan perdesaan yang paling buruk (gambar 32). Buruknya kondisi jalan tingkat perdesaan menimbulkan kesulitan bagi penduduk desa untuk dapat mengakses jalan provinsi dan negara yang semakin baik.

GAMBAR 32. NTT berada di posisi kesepuluh dalam akses desa terhadap jalan yang aspal dan batu.



Kesimpulan:

Alokasi anggaran infrastruktur untuk belanja modal (provinsi dan kab/kota) lebih dari 70%, sebagian besar digunakan untuk pembangunan/perbaikan jalan. Kenyataan ini mendorong perbaikan yang cukup besar pada prasarana jalan provinsi, tetapi kualitas jalan tingkat perdesaan tidak mengalami perbaikan kualitas.

Pembangunan infrastruktur lainnya (sanitasi, air bersih, listrik) di NTT menunjukkan kinerja yang beragam. Pada satu sisi akses terhadap air bersih dan penerangan/listrik masih rendah, namun di sisi lain akses terhadap sanitasi tergolong tinggi. Akses terhadap air bersih yang rendah tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat mobiditas di NTT dibanding Maluku, NTB dan Nasional.

Rekomendasi:

- Mengingat sebagian besar dana dekonsentrasi dialokasikan untuk pembangunan prasarana jalan, maka pembangunan infrastruktur lainnya, terutama air bersih, perlu mendapat alokasi anggaran yang memadai melalui sumber APBD (provinsi dan kab/kota). Masalah utama yang dihadapi sebagian besar masyarakat provinsi NTT adalah ketersediaan air bersih. Struktur tanah dan ciri iklim kering (*semi arid*) menyebabkan persediaan air bagi kebutuhan masyarakat sangat terbatas, karena itu pemerintah seyogyanya mengalokasikan anggaran belanja sektor infrastruktur terutama pada upaya penyediaan air bersih bagi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Propeda/RPJMD pada umumnya dirumuskan berdasarkan permasalahan pokok yang dihadapi setiap daerah.

Hasil identifikasi Propeda/RPJMD dari kabupaten yang dikaji menunjukkan bahwa, secara umum, terdapat lima sektor prioritas, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta hukum dan pemerintahan. Jika ditelaah lebih lanjut, temuan ini tidaklah mengherankan. IPM NTT dan angka kemiskinan lebih buruk dari rata-rata nasional, yang menandakan besarnya permasalahan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di samping sektor-sektor kunci ini, prioritas daerah mencakup penegakkan hukum, penguatan kelembagaan pemerintah daerah, penataan kota/wilayah, dan keamanan dan ketertiban. Prioritas ini merupakan pilihan yang relevan dengan kondisi domestik masing-masing daerah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, dari sisi perencanaan pembangunan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, telah berupaya untuk merumuskan prioritas pembangunan daerah yang tepat di dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Di dalam Propeda/RPJMD provinsi dan kabupaten/kota yang dikaji, belum dirumuskan secara jelas target dan indikator kinerja pembangunan selama lima tahun, kecuali pada tingkat Provinsi NTT. Ketidakjelasan rumusan target dan indikator kinerja antara lain disebabkan karena ketersediaan data yang tidak memadai, di mana hampir semua pemerintah kabupaten/kota belum memiliki sistem pendataan yang terorganisasi baik.

Mayoritas realisasi belanja publik atau langsung selalu dilakukan dalam waktu yang relatif singkat menjelang akhir tahun anggaran. Hal ini disebabkan karena siklus anggaran yang tidak ditepati secara baik, di mana selalu terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD, APBD tambahan, dan Perhitungan/ Pertanggungjawaban APBD. Keterlambatan ini menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi SKPD dalam melaksanakan programnya, karena ketersediaan waktu yang relatif sempit. Akibatnya banyak program yang dilaksanakan hanya untuk mengejar target penyerapan anggaran, sementara aspek proses dan kinerja program kurang mendapat perhatian.

Peraturan perundangan terkait pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan terus-menerus hanya dalam beberapa tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah pusat telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundangan baru terkait perencanaan dan penganggaran daerah, antara lain tentang keuangan negara (UU No. 17/2003), perbendaharaan negara (UU No. 1/2004), sistem perencanaan pembangunan nasional (UU No. 25/2004), otonomi daerah (UU. No 32/2004) dan perimbangan keuangan (UU No. 33/2004). Berbagai peraturan perundangan ini, berikut peraturan-peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan dan Keputusan Menteri, telah merubah secara mendasar berbagai aspek pelaksanaan pengelolaan

keuangan daerah, baik dalam aspek perencanaan dan penganggaran, manajemen kas, maupun dalam aspek pengadaan, manajemen aset.

Di NTT, seluruh pemerintah daerah yang dikaji menampakkan kesulitannya dalam merespons perubahan-perubahan cepat dalam berbagai peraturan perundangan di tingkat nasional tersebut. Sebagai contoh, sampai pada pertengahan tahun 2008 hanya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berhasil menyelesaikan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sesuai yang dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No 58/2005 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pada umumnya, pemerintah daerah di NTT (provinsi dan kabupaten/kota) telah berupaya menurunkan porsi alokasi belanja aparatur dalam lima tahun terakhir. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Bab 3, porsi alokasi belanja aparatur turun dari 48% pada tahun 2003 menjadi 42% pada tahun 2007.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 41/2007 terbukti dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi porsi alokasi belanja aparatur. PP 41/2007 tentang struktur organisasi pemerintah daerah mengatur tentang jumlah minimum dan maksimum unit kerja (SKPD) dalam suatu pemerintah daerah, berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan besar APBD pemerintah daerah yang bersangkutan. Sejauh ini, penerapan PP ini berdampak positif di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang merupakan kabupaten pertama yang mengimplementasikan PP ini melalui Perda No. 19 s/d No. 22 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja di pemerintah kabupaten. Penerapan PP No. 41/2007 berdampak pada penurunan jumlah struktur eselon dari 1106 menjadi 887 yang berimplikasi pada penurunan belanja gaji sebesar Rp 2 milyar atau sekitar 0,4% dari total pengeluaran (Tabel 5).

TABEL 5. Pengeluaran untuk Gaji Pegawai Negeri di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sebelum Pelaksanaan PP 41/2007				Setelah Pelaksanaan PP 41/2007			
Eselon	#	Jumlah Gaji (Bulanan)	Jumlah Total Gaji (Tahunan)	Eselon	#	Jumlah Gaji (Bulanan)	Jumlah Total Gaji (Tahunan)
II a	1	3,250,000	39,000,000	II a	1	3,250,000	39,000,000
II b	31	2,025,000	753,300,000	II b	28	2,025,000	680,400,000
III a	175	1,260,000	2,646,000,000	III a	66	1,260,000	997,920,000
III b	24	980,000	282,240,000	III b	125	980,000	1,470,000,000
VI a	798	540,000	5,171,040,000	VI a	619	540,000	4,011,120,000
VI b	77	480,000	443,520,000	VI b	48	480,000	276,480,000
Total	1106		9,335,100,000		887		7,474,920,000

Sumber: Bagian organisasi Pemda TTS

Kesimpulan:

- **Proses perencanaan dan penganggaran masih jauh dari efektif.** Walaupun dokumen perencanaan sudah memprioritaskan sektor-sektor tertentu, dokumen tersebut belum memberikan panduan yang jelas untuk melimplementasikan rencana-rencana tersebut. Selain itu, realisasi anggaran masih jauh dari efektif karena mayoritas belanja publik atau langsung dilakukan pada akhir tahun anggaran.
- **Sama halnya dengan daerah lain, pemerintah-pemerintah daerah di NTT juga menghadapi kesulitan dalam mengikuti perubahan berbagai peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah.** Hal ini terutama disebabkan oleh cepatnya pergantian peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang

tidak segera diikuti dengan perubahan regulasi pelaksanaannya, selain karena lemahnya kapasitas aparaturnya dalam menyiapkan peraturan turunannya di daerah (*legislative drafting*).

- **NTT telah membuat kemajuan penting dalam meningkatkan efisiensi birokrasinya.** Secara umum, NTT berhasil mengurangi proporsi pengeluaran aparaturnya. Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah siap secara *de jure* melakukan restrukturalisasi kelembagaannya dengan telah menetapkan regulasi daerah tentang organisasi dan tata kerja kelembagaannya bahkan dampaknya menunjukkan keberhasilannya mengurangi belanja gaji apabila baik secara *de jure dan de facto* menerapkan regulasi-regulasi daerah dimaksud sebagai implementasi lanjutan dari PP 41/2007.

Rekomendasi:

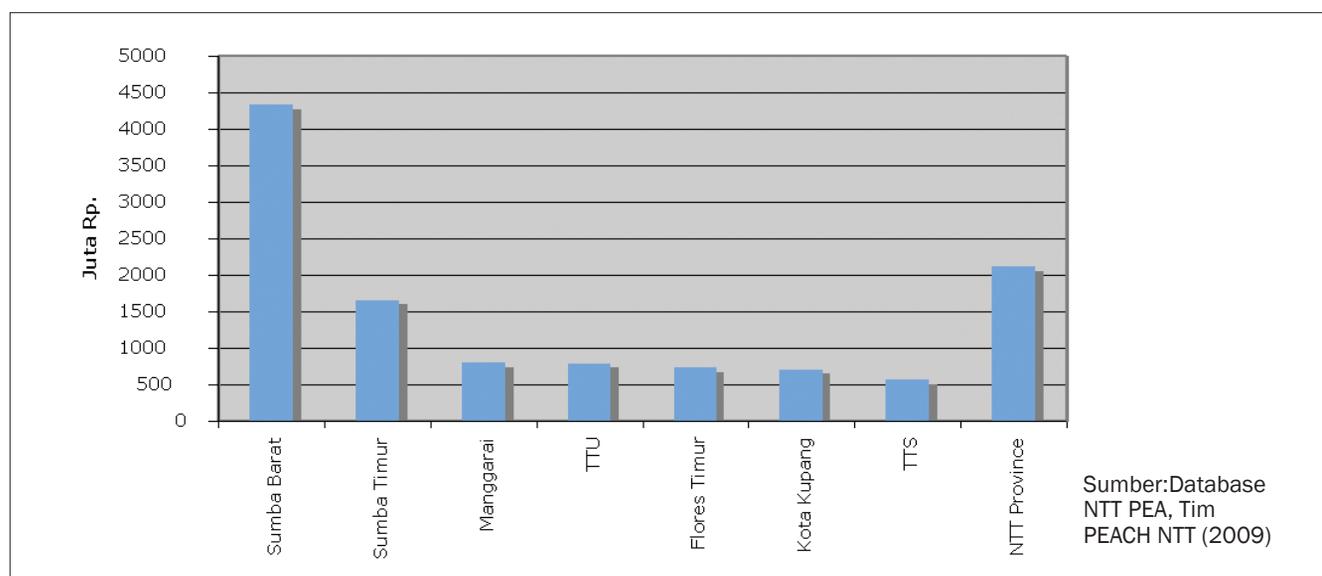
- **Pemerintah daerah di provinsi NTT perlu memperbaiki dokumen perencanaan dan siklus penganggaran.** Untuk dokumen perencanaan, perlu dibangun suatu rencana program dan kegiatan yang terpadu serta indikator-indikator terukur dan realistis yang dapat memonitor pelaksanaan. Langkah awal untuk memperbaiki siklus penganggaran adalah dengan menetapkan APBD sebelum dimulainya suatu tahun anggaran dan APBD Perubahan sebelum dimulainya kuartal keempat dari tahun anggaran yang bersangkutan.
- **Pemerintah Provinsi NTT harus merespons secara cepat perubahan regulasi nasional tentang pengelolaan keuangan Negara.** Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui upaya peningkatan kapasitas *legislative drafting* bagi aparaturnya, sehingga dapat secara cepat pula merubah atau menciptakan perda tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai perubahan regulasi nasional.
- **Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT disarankan segera mengimplementasikan PP no. 41/2007.** Sebagai langkah awal implementasi PP tersebut, dapat dilakukan suatu kajian akademis mengenai struktur dan tata kerja yang paling optimal berdasarkan kondisi daerah setempat untuk menciptakan regulasi daerah tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

Tantangan Pembangunan NTT

8.1. Gender

Meskipun pemerintah provinsi dan 7 pemerintah kabupaten/kota lokasi studi kasus memiliki program yang terkait dengan isu gender, hanya Pemerintah Kabupaten Sumba Barat yang menyebutkan secara spesifik materi tentang gender di dalam visi maupun tujuan-tujuan pembangunannya. Tantangan lain dalam mengarusutamakan gender dimana kebanyakan program-program pemerintah tidak mengukur dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang menyulitkan upaya untuk menilai siapa yang menerima benefit dari pengeluaran pemerintah yang tidak diarahkan secara khusus (*non-targeted spending*) yang umumnya meliputi sebagian besar dari pengeluaran. Memang pada semua lokasi studi kasus pemerintah mengalokasikan dana untuk program-program gender yang ditargetkan khusus (*gender targeted programs*), namun terdapat variasi yang cukup besar antar kabupaten/kota dalam jumlah yang dialokasikan. Dalam konteks ini Kabupaten Sumba Barat memiliki tingkat pengeluaran tertinggi, sebesar Rp 4,3 milyar dari belanja modalnya, sementara TTS memiliki alokasi terendah, hanya Rp 568 juta (gambar 33)⁵. Alokasi yang signifikan ini konsisten dengan komitmen eskplisit Kabupaten Sumba Barat yang tertuang dalam dokumen RPJMD.

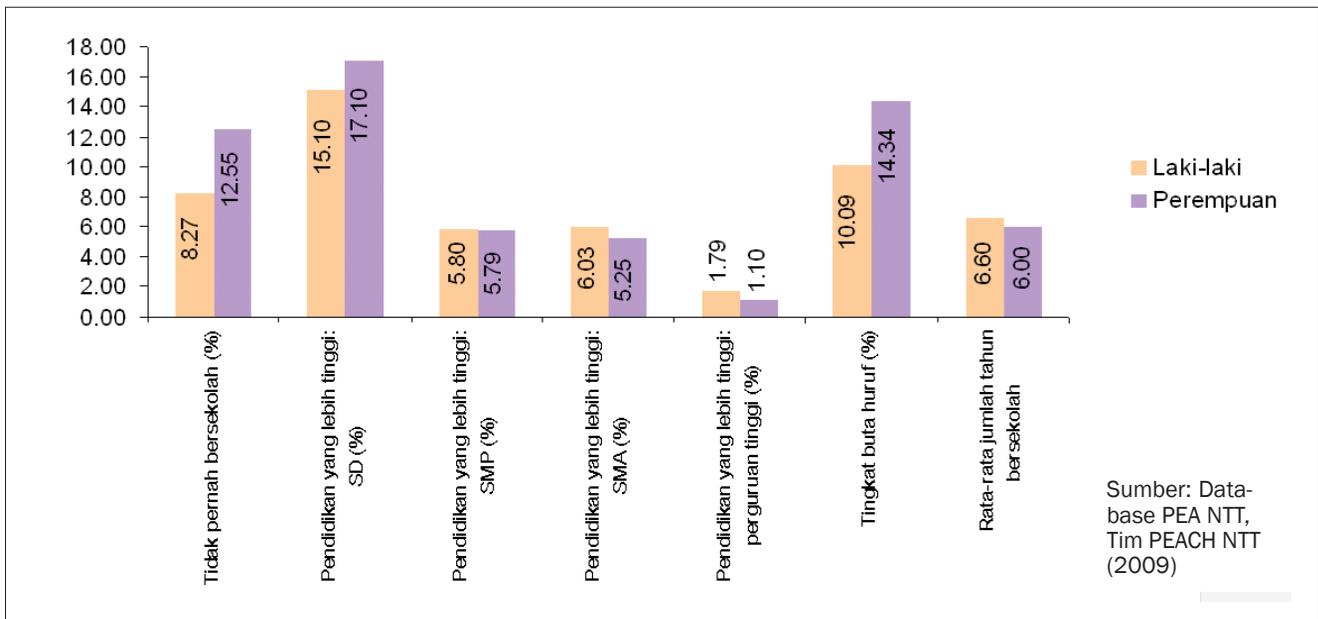
GAMBAR 33. Tingkat alokasi dana untuk program-program gender yang ditargetkan khusus yang sangat beragam antar kabupaten/kota di tahun 2006.



⁵ Program yang digolongkan sebagai program-program gender yang ditargetkan khusus (*targeted gender programs*) didasarkan pada rumusan penamaan program pada APBD 2006.

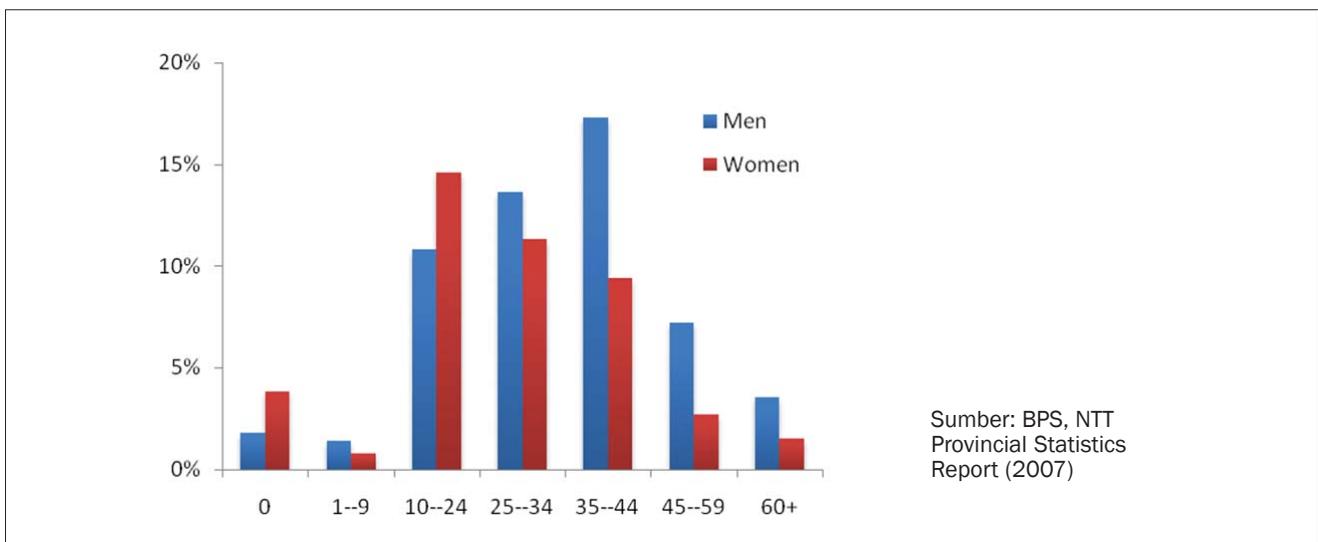
Di NTT, kelompok laki-laki memperoleh akses yang sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok perempuan, tetapi untuk jenjang pendidikan, kedua kelompok ini tidak menunjukkan banyak perbedaan. Prosentase perempuan yang tidak pernah bersekolah (13%) lebih tinggi daripada laki-laki (8%). Data ini mungkin dapat menjelaskan mengapa lebih banyak proporsi perempuan yang buta huruf (14%) dibandingkan laki-laki (10%). Secara umum, rata-rata laki-laki juga mengecap pendidikan yang lebih lama (6,6 tahun) dibandingkan perempuan (6 tahun). Tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan dapat dikatakan hampir sama untuk pendidikan dasar dan menengah pertama, meskipun kemudian perempuan agak sedikit lebih sedikit untuk pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi (gambar 34).

GAMBAR 34. Indikator terpilah sektor pendidikan (2006).



Walaupun tingkat pendidikannya tidak banyak berbeda, jumlah angkatan kerja perempuan jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Diperkirakan jumlah angkatan kerja perempuan hanya sebanyak 65%, perbedaan yang sangat signifikan dibanding proporsi laki-laki yang mencapai 85%. Perempuan juga cenderung bekerja dalam jumlah jam kerja yang lebih sedikit dibanding laki-laki, yang mengindikasikan pekerjaan mereka lebih bersifat paruh waktu. Gambar 31 menampilkan proporsi perempuan berusia di atas 15 tahun yang bekerja hingga 24 jam per minggu ternyata jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Sebagaimana terlihat pada gambar, dengan bertambahnya jam kerja, justru proporsi laki-laki yang bekerja bertambah dalam jumlah jauh lebih tinggi dari perempuan.

GAMBAR 35. Jam kerja perempuan dewasa (15 tahun keatas) lebih sedikit dari pada laki-laki.



Ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan pada angkatan kerja ini juga terlihat di dalam birokrasi pemerintah di NTT. Pada tahun 2007 jumlah perempuan pada posisi eselon 2, 3 dan 4 di seluruh jajaran birokrasi di NTT hanyalah 26%. Tabel 6 juga menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang eselon semakin sedikit pula jumlah perempuan pada posisi-posisi birokrasi tersebut.

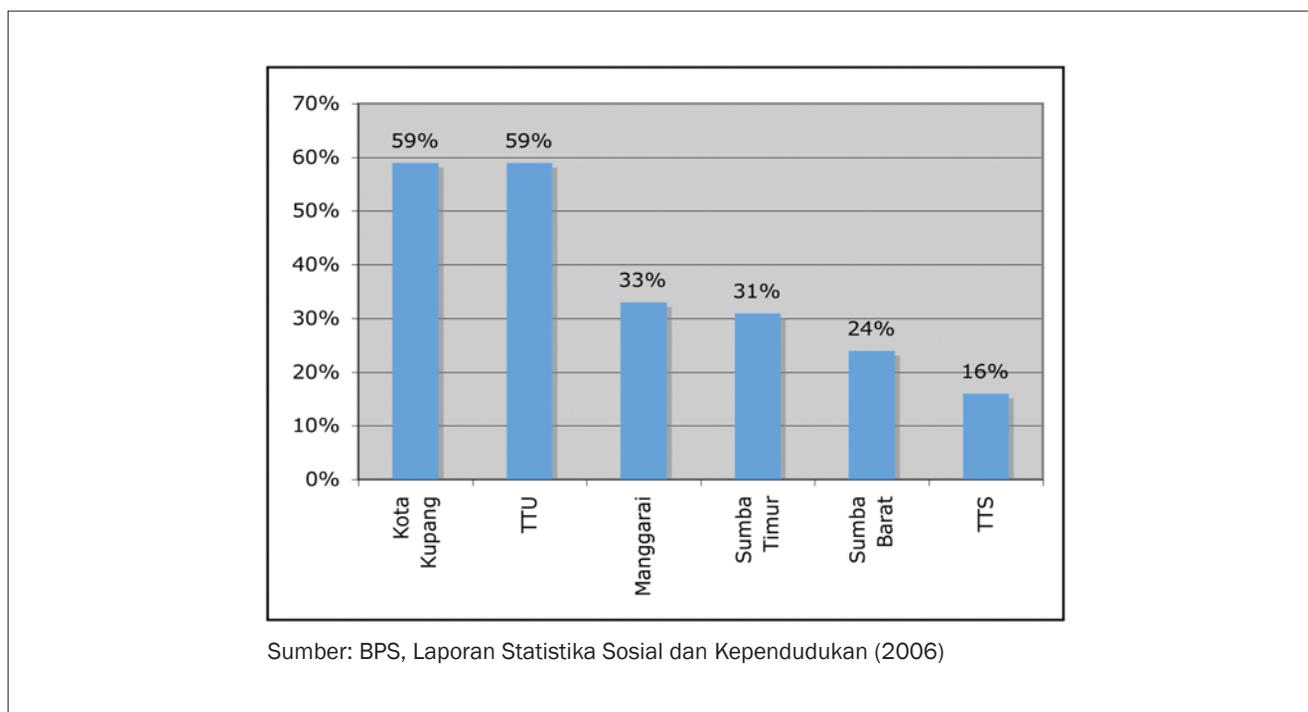
TABEL 6. Makin tinggi jenjang eselon makin sedikit pula jumlah perempuan

	Laki-Laki	Laki-Laki (%)	Perempuan	Perempuan (%)
Eselon 1	1	100	0	0
Eselon 2	43	88	6	12
Eselon 3	192	85	35	15
Eselon 4	476	70	205	30
Total	712	74	246	26

Sumber: BPS, NTT Dalam Angka, 2007

Secara rata-rata, hanya empat dari sepuluh wanita yang melahirkan di NTT dibantu oleh tenaga medis. Salah satu isu kesehatan yang penting bagi kelompok perempuan adalah hanya 43% jumlah kelahiran di NTT yang dibantu oleh tenaga medis. Jumlah ini sangat jauh dibawah rata-rata nasional dan provinsi tetangganya, NTB (62%) dan Maluku (46%). Jumlah tersebut juga sangat bervariasi antar kabupaten/kota. Sebagai contoh, jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis di Kota Kupang (60%) lebih tinggi hampir empat kali lipat dibanding TTS (16%) (gambar36). Angka ini konsisten dengan kecenderungan yang ditemukan pada provinsi lain, dimana tenaga medis lebih terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Analisa Pengeluaran Publik di Sektor Kesehatan yang dilakukan oleh Bank Dunia (2008) menemukan bahwa kebanyakan tenaga medis pemerintah di kawasan perkotaan juga mencari tambahan penghasilan dari praktek swasta. Hal ini disebabkan oleh peluang mencari tambahan penghasilan yang lebih baik di kawasan perkotaan yang memiliki permintaan yang lebih tinggi terhadap pelayanan kesehatan swasta.

GAMBAR 36. Proporsi kelahiran yang dibantu tenaga medis bervariasi secara signifikan antar kabupaten/kota.

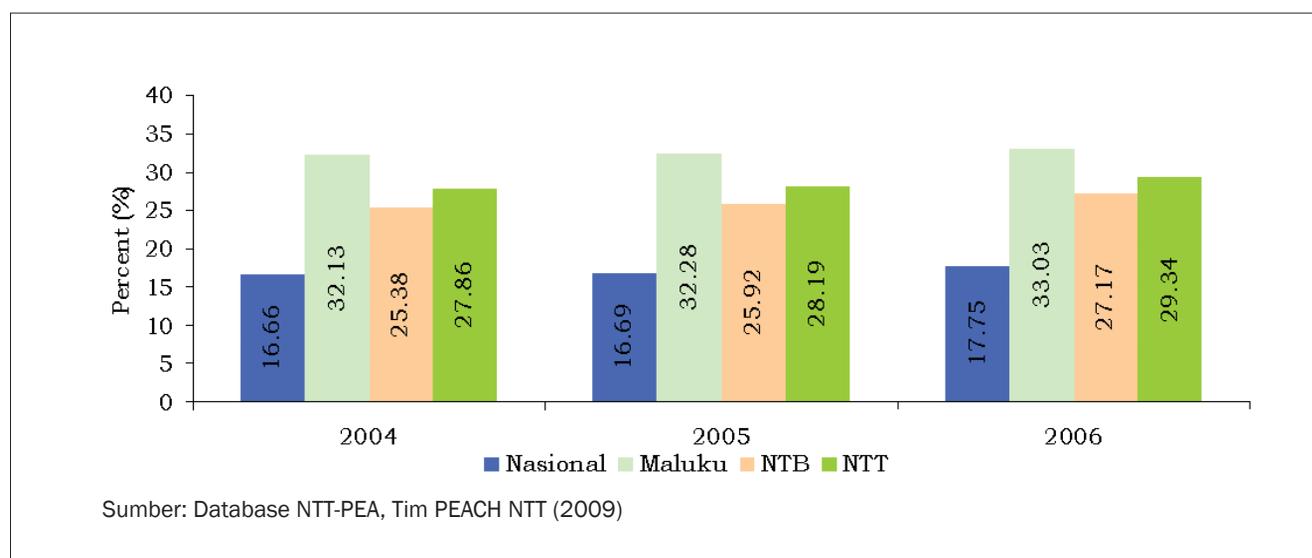


8.2. Kemiskinan, rawan pangan, dan pengangguran

Isu lokal yang mendapat perhatian Pemerintah Provinsi NTT melalui Belanja Daerah adalah Kemiskinan, Rawan Pangan dan Pengangguran. Pilihan terhadap tiga isu lokal tersebut terkait erat dengan kondisi riil NTT, di mana angka kemiskinan, kejadian rawan pangan dan pengangguran cukup menonjol setiap tahunnya.

Jumlah rumah tangga miskin di NTT dalam beberapa waktu terakhir ini cenderung meningkat. Pada tahun 2004 persentasi penduduk miskin di NTT lebih banyak dari provinsi NTB, namun sedikit lebih rendah dari prosentase penduduk miskin provinsi Maluku. Kondisi ini cenderung tidak berubah selama kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2006. Persentasi penduduk miskin provinsi NTT jauh lebih besar dari rata-rata persentase penduduk miskin pada tingkat nasional.

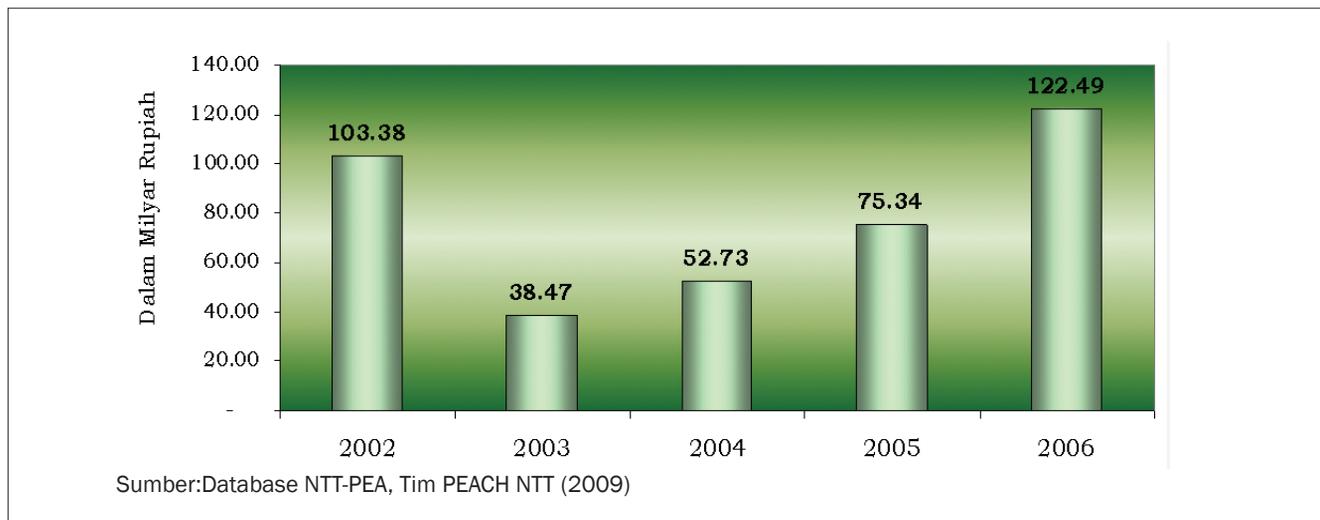
GAMBAR 37. Penduduk Miskin di NTT, NTB, Maluku dan Nasional, 2004-2006.



Pemerintah provinsi NTT berkomitmen menanggulangi kemiskinan secara melembaga di daerah ini. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Untuk itu Pemerintah Provinsi NTT membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi NTT sejak tahun 2002, yang namanya dirubah lagi menjadi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT dengan Keputusan Gubernur NTT No. 44/KEP/HK/2007 tanggal 2 Februari 2007.

Anggaran untuk membiayai berbagai program penanggulangan kemiskinan di NTT bersumber dari APBD Provinsi NTT dan dari pemerintah pusat melalui APBN. Dana dari APBD umumnya dipergunakan sebagai dana pendampingan, penguatan kelembagaan orang miskin, perjalanan dinas, akomodasi, honor para petugas SKPD yang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan berbagai program kemiskinan yang ada. Dengan kata lain dana APBD itu lebih banyak dipergunakan bagi keperluan para petugas dan bukan langsung solusi masalah masyarakat miskin. Ada juga SKPD menggunakan nomenklatur anggaran kemiskinan, namun peruntukannya bukan untuk solusi masalah tersebut, melainkan untuk perjalanan dinas, akomodasi, honor petugas monitoring pelaksanaan serta evaluasi program tersebut, dan sebagainya. Misalnya program pendataan keluarga miskin dari BPMD Prov. NTT.

GAMBAR 38. Belanja daerah untuk mengatasi kemiskinan Provinsi NTT.



Provinsi NTT merupakan salah satu daerah yang sering mengalami kekurangan atau rawan pangan. Keadaan ini berkaitan dengan kondisi alam NTT yang kering karena kekurangan sumber air, mengakibatkan para petani sering mengalami gagal tanam dan atau gagal panen. Sebagai akibat lanjutannya, masyarakat sering mengalami rawan pangan. Data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Badan Bimas Ketahanan Pangan Prov. NTT, menunjukkan bahwa jumlah produksi pangan di NTT dalam lima tahun terakhir secara agregat terjadi surplus. Di pihak lain, berdasarkan data yang ada memperlihatkan bahwa dalam lima tahun terakhir, penduduk NTT yang mengalami rawan pangan dan gizi buruk terus meningkat jumlahnya.

Masalah rawan pangan yang sering terjadi di NTT terutama di daerah perdesaan. Dengan demikian kebijakan pemerintah untuk diversifikasi pangan pokok di Indonesia termasuk di NTT belum sepenuhnya berhasil. Masyarakat sampai kini masih tetap menggunakan beras sebagai pangan pokok. Data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Badan Bimas Ketahanan Pangan Prov. NTT menunjukkan bahwa yang kekurangan pangan di NTT adalah pangan yang berasal dari padi (beras). Pergeseran pola konsumsi pangan pokok dari jagung menjadi beras, semata-mata karena faktor gengsi dan bukan terletak pada kandungan nilai gizi, energi, dan sebagainya.

Pemerintah Provinsi NTT telah mengambil berbagai kebijakan untuk penanggulangan rawan pangan dengan melakukan identifikasi dan pemetaan lokasi daerah yang sering mengalami bencana. Program yang dikembangkan yaitu pengembangan sarana dan prasarana usahatani, pengembangan teknologi dan optimalisasi lahan kering, pelatihan petani, diversifikasi usaha produktif, pengembangan, sosialisasi dan promosi pangan pangan lokal (umbi-umbian, pisang dan lain-lain), peningkatan pengendalian hama secara terpadu serta intervensi ke daerah yang terkena rawan pangan melalui bantuan langsung kepada masyarakat. Namun hasilnya belum memuaskan.

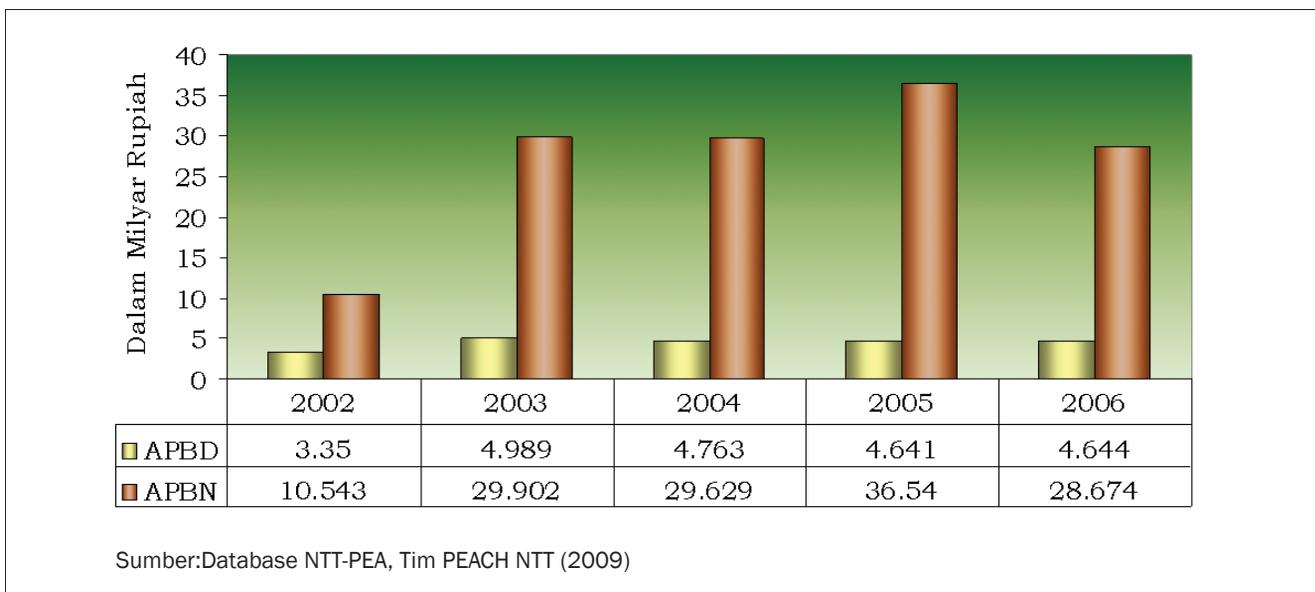
Dalam mengantisipasi rawan pangan Pemerintah Provinsi NTT telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTT sejak tahun 2002. Lembaga ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan. Dewan Ketahanan Pangan Prov. NTT dibentuk dengan Keputusan Gubernur NTT No. No. 93/KEP/HK/2002 kemudian diganti Keputusan Gubernur NTT No. 131/KEP/HK/2003 tanggal 26 Mei 2003. Dalam menjalankan tugasnya DKP dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai berikut: Sekretariat DKP secara ex-officio dilaksanakan oleh Badan Bimas Ketahanan Pangan Prov. NTT. Sedangkan Pokja-Pokja sebagai berikut :

1. Pokja Produksi Pangan diketuai oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. NTT dibantu sekretaris dan anggota sebanyak 15 unit kerja termasuk LSM.
2. Pokja Pengendalian Distribusi dan Pemantauan Harga diketuai oleh Kepala Dinas Perindag Prov. NTT dibantu sekretaris dan anggota sebanyak 13 unit dan subunit kerja pemerintah.
3. Pokja Diversifikasi Pangan dan Gizi diketuai oleh Kepala Dinas Kesehatan Prov. NTT dibantu sekretaris dan anggota sebanyak 8 sub unit kerja pemerintah termasuk Ketua PHRI NTT.
4. Pokja Pengawasan Mutu, Kewaspadaan Pangan dan Gizi diketuai oleh Kepala Dinas Sosial Prov. NTT dibantu sekretaris dan anggota sebanyak 14 sub unit kerja pemerintah termasuk Ketua YLKI Wilayah NTT

5. Pokja Prasarana dan Sarana Pendukung diketuai Kepala Dinas Kimpraswil Prov. NTT dibantu sekretaris dan anggota sebanyak 14 unit dan sub unit kerja pemerintah.

Anggaran untuk peningkatan ketahanan pangan di NTT berasal dari dua sumber yaitu : APBD Provinsi NTT dan APBN. Namun, dana dari APBD relatif kecil dibandingkan dengan dana dekonsentrasi (APBN). Kecilnya alokasi anggaran dari APBD berhubungan kemampuan keuangan daerah yang masih terbatas dan kurangnya komitmen pemerintah daerah membangun sektor pertanian sebagai tumpuan kehidupan mayoritas masyarakat. Sejak otonomi daerah diterapkan, pemerintah pusat telah menetapkan pertanian menjadi urusan pilihan, namun Pemerintah Provinsi NTT dapat saja tetap menempatkan pembangunan sektor pertanian menjadi prioritas utama agar daerah ini dapat memacu pertumbuhan produktivitas sektor pertanian, meningkatkan pendapatan petani dan tidak lagi bergantung kepada pangan (beras) dari daerah lainnya. Perlu dijelaskan bahwa tidak semua dana yang dialokasikan dari APBD dipergunakan untuk belanja publik, tetapi sebagian besar dari anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja aparatur, sehingga dana yang benar-benar sampai ke masyarakat lebih sedikit dari anggaran belanja publik yang dianggarkan.

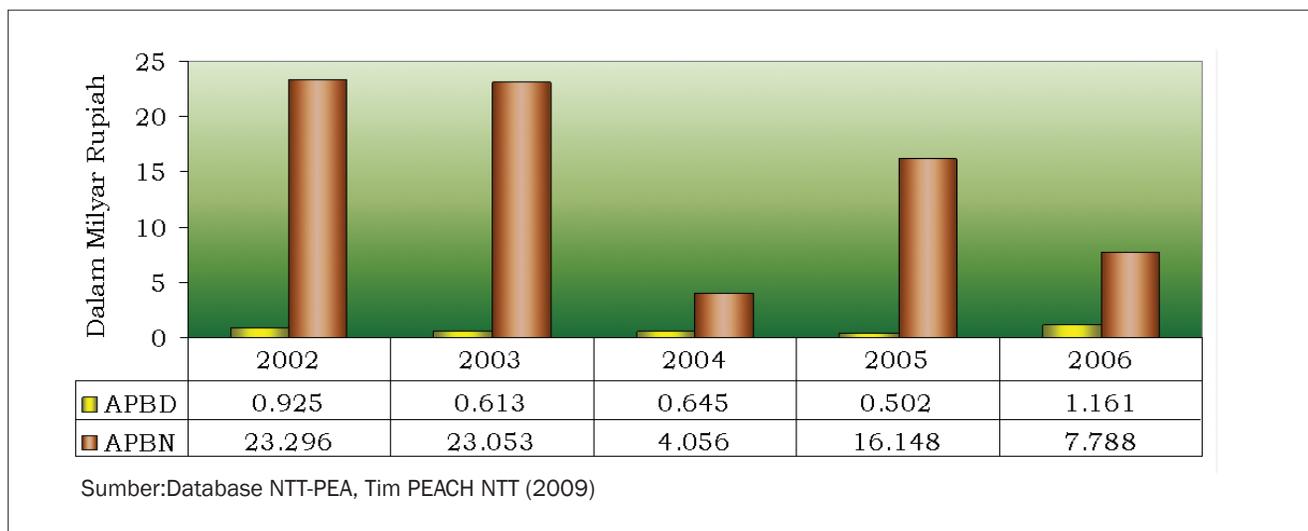
GAMBAR 39. Belanja daerah untuk rawan pangan Provinsi NTT.



Permasalahan ketenagakerjaan di NTT cukup kompleks menjadi beban bagi pemerintah NTT, sehingga memerlukan penanganan yang serius. Kehadiran bekas pengungsi Timor Timur di wilayah NTT sampai saat penelitian ini belum dapat diselesaikan secara tuntas. Untuk menanggulangi pengangguran terbuka ini, sesungguhnya bukanlah semata-mata merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah NTT saja, melainkan juga tanggung jawab semua komponen masyarakat di daerah ini. Namun, pemerintah harus tetap menjadi pelopor dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dengan mendorong bertumbuhnya investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Untuk membiayai program penanggulangan pengangguran, Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan dana APBD setiap tahunnya. Hal ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk penanggulangan pengangguran di daerah ini. Alokasi anggaran untuk penanggulangan pengangguran di Provinsi NTT. Sebagian besar anggaran untuk menanggulangi pengangguran di Prov. NTT berasal dari dana APBN. Sedangkan anggaran yang dialokasikan dari dana APBD relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT kurangnya perhatian dan prioritas terhadap tanggung jawab konstitusionalnya untuk memberi pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyatnya.

GAMBAR 40. Belanja daerah untuk mengatasi pengangguran Provinsi NTT.



Kesimpulan:

- **Permasalahan gender belum mendapatkan ruang yang memadai dalam dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota.** Pada umumnya masalah gender disebutkan dalam analisis, tetapi penjabarannya dalam program dan kegiatan sangat terbatas. KUA-APBD juga tidak menyebutkan gender sebagai area program yang perlu mendapat perhatian dalam belanja pembangunan.
- **Dalam rangka menentukan apakah anggaran pemerintah peka terhadap persoalan ketidakadilan gender, perlu segera untuk membuat sistem pengumpulan data yang terpilah yang mampu memperlihatkan perbedaan dampak program pemerintah terhadap kelompok laki-laki dan perempuan.** Hampir sama dengan wilayah lainnya di Indonesia, di NTT hampir tidak pernah dilakukan upaya untuk menghitung berapa proporsi anggaran yang bermanfaat bagi kelompok laki-laki dan perempuan. Dengan adanya data terpilah atas dasar laki-laki dan perempuan akan mempermudah pengembangan program-program pembangunan yang menargetkan perempuan, yang lebih terpinggirkan, sebagai sasarannya. Hampir sama dengan membuat program yang menempatkan orang miskin sebagai sasaran, program-program yang menargetkan perempuan sebagai sasaran tersebut justru akan turut memperbaiki tampilan indikator pembangunan manusia, lebih dari sekedar menciptakan manfaat yang hanya khusus bagi perempuan.
- **Kemiskinan, rawan pangan dan pengangguran masih merupakan masalah krusial yang dihadapi pemerintah dan masyarakat NTT.** TKPK dan DKP yang berwenang mengkoordinasikan semua program penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Karena status keduanya sebagai lembaga non struktural, sehingga sulit melakukan koordinasi dengan dinas/badan yang mempunyai kaitan tugas penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan. Program penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan serta pengangguran di Provinsi NTT belum pernah dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kelemahannya. Alokasi dana APBD dan APBN cukup besar untuk menanggulangi kemiskinan namun angka kemiskinan cenderung meningkat.

Rekomendasi

- **Gender perlu mendapat ruang yang cukup dalam rencana pembangunan, baik untuk jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD).** Untuk menjamin perhatian yang memadai terhadap persoalan

gender, maka pada tingkat SKPD, program yang disusun kemudian dihimpun menjadi RKPD perlu memberi perhatian yang lebih besar terhadap gender.

- **Pemerintah provinsi NTT perlu membangun sistim informasi / data terpilah untuk proses perencanaan.** Data terpilah tersebut mesti digunakan sebagai salah satu syarat penting dalam perencanaan dan penganggaran resnponsif gender. Data yang cukup memadai dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh setiap SKPD untuk memberikan layanan kepada publik yang responsif gender.
- **Indikator kinerja yang berbasis gender perlu secara spesifik ditetapkan sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan pembangunan.** Indikator semacam ini mestinya digunakan untuk melihat dampak keberhasilan pembangunan terhadap masyarakat secara lebih adil (baik terhadap kelompok laki-laki maupun perempuan).
- **Mentargetkan perbaikan tingkat melek huruf di kalangan perempuan merupakan strategi yang tepat dalam mengurangi tingkat buta huruf di NTT.** Walaupun tingkat pendidikan perempuan tergolong sama dengan laki-laki, mengingat proporsi perempuan yang tidak pernah mengecap pendidikan lebih tinggi daripada laki-laki, maka tingkat buta huruf lebih banyak terjadi di kalangan perempuan. Karena kelompok perempuan lebih terpinggirkan sebagaimana terlihat dalam indikator-indikator pendidikan, mentargetkan perbaikan tingkat melek huruf di kalangan perempuan ini akan memberikan tingkat keuntungan investasi di bidang pendidikan yang lebih tinggi.
- **Penelitian yang lebih mendalam dibutuhkan untuk menjelaskan mengapa tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja jauh lebih rendah secara signifikan dibanding laki-laki, diluar pertimbangan tingkat pendidikannya.** Kemungkinan-kemungkinan yang perlu diuji adalah harapan masyarakat, struktur lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi, diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, serta pilihan perempuan untuk lebih bekerja di rumah.
- **Pemerintah provinsi NTT harus melakukan upaya revitalisasi keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTT.** Sebagai lembaga non struktural dimana kewenangan koordinasi menyebabkan perannya kurang efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan rawan pangan di NTT.
- **Diperlukan koordinasi yang semakin baik antara TKPK dan DKP provinsi dan kabupaten/kota serta semua lembaga yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan di NTT.** Upaya peningkatan koordinasi yang efektif diperlukan, sehingga dapat menghindari tumpang tindih program antara provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga terkait, untuk menghasilkan sinergi.
- **Diperlukan evaluasi terpadu semua program dan pengeluaran untuk penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan di NTT.** Evaluasi ini harusnya dapat menilai sejauhmana efektivitasnya, sekaligus sebagai masukan untuk perbaikan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan di NTT selanjutnya.
- **Untuk menanggulangi kemiskinan dan rawan pangan secara terintegrasi, perlu dikembangkan strategi dan program yang komprehensif.** Hal ini disebabkan karena kedua masalah ini mencakup dimensi yang sangat luas dan karena itu penanggulangannya diperlukan strategi yang menyeluruh dan lintas instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik NTT, *Provinsi NTT Dalam Angka*, 2002- 2006
- , 2006. BPS NTT, *Indikator Ekonomi NTT*, 2006
- , 2006. *Indikator Kesejahteraan Rakyat NTT*, 2006
- , 2007. *Statistik Keuangan Daerah Prov NTT Tahun 2006*
- , 2004. *Profil pendidikan Provinsi NTT Tahun 2002-2004*
- Bank Dunia, 2007. *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, The World Bank Office Jakarta.
- , 2005. *Analisis Pengeluaran Publik Papua : Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik pada Wilayah Tertinggal di Indonesia*, The World Bank Office Jakarta.
- Badan Pusat Statistik NTT, 2006. *Indikator Ekonomi Provinsi NTT 2006*, Kupang
- Badan Pusat Statistik NTT, 2006. *Indikator Kesejahteraan Rakyat NTT 2006*, Kupang
- Badan Pusat Statistik NTT, 2006. *Provinsi NTT Dalam Angka 2006*, Kupang
- Badan Pusat Statistik, 2007. *Statistik Indonesia, 2007*
- Badan Pusat Statistik, 2007. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten di Indonesia 2005-2006*.
- Badan Pusat Statistik, 2008. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*.
- Bratakusumah, D.S., 2002. *Otonomi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dinas Pendidikan Nasional Provinsi NTT, 2006. *Statistik Pendidikan Tahun 2003/2004 dan 2005/2006*
- Dinas Pendidikan Nasional Provinsi NTT. *Profil Pendidikan NTT, 2006*
- Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2006. *Profil Kesehatan Provinsi NTT, 2006*, Kupang NTT
- Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 2005. *Profil Kesehatan Kabupaten/Kota se NTT*, Kupang NTT
- , 2005. *Profil Kesehatan Provinsi NTT*, Kupang NTT
- Suharto, E., 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Refika Aditama, Jakarta.
- Pemerintah Prov. NTT, 2004. *Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2004-2008*, Kupang NTT
- Pemerintah Provinsi NTT, 2004. *Program Pembangunan Daerah Provinsi NTT 2004-2008*, Kupang NTT
- Pemerintah Provinsi Gorontalo, 2008. *Penyediaan Layanan dan Pengelolaan Keuangan Daerah di Sebuah Provinsi Baru*, Gorontalo
- Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, 2006. *Analisis Pengeluaran Publik Aceh*, Banda Aceh
- Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, 2007. *Analisis Pengeluaran Publik Nias*, Nias

Pemerintah Prov. NTT, 2002-2006. *Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTT 2002-2006*, Kupang NTT

———, 2006. *Dokumen APBD Provinsi NTT Tahun 2002-2006*

———, 2007. *Laporan Biro Bina Penyusunan Program Sekretariat Daerah Provinsi NTT Tahun 2007*.

Biro Keuangan Sekda Provinsi NTT, 2007 *Statistik Keuangan Daerah Tahun anggaran 2003*

———, 2005. *Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2002*

———, 2007. *Statistik Keuangan Daerah Tahun anggaran 2004*

———, 2007. *Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2005*

———, 2007. *Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2006*

———, 2008. *Statistik Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2007*

Annex 1.

Matriks Temuan dan Rekomendasi

PERMASALAHAN KUNCI	REKOMENDASI	INSTANSI TERKAIT
PENDAPATAN		
Rasio PAD terhadap pendapatan daerah secara total maupun terhadap dana perimbangan relatif kecil.	Untuk memperkuat fondasi fiskal daerah, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian strategis kebijakan daerah. Diperlukan suatu kajian untuk merumuskan secara tepat peluang-peluang yang mungkin bagi pemerintah untuk meningkatkan PAD.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Terbatasnya jumlah usaha kecil, jumlah sektor hiburan (hotel dan restoran), jumlah kendaraan bermotor terdaftar dan lemahnya penyediaan layanan merupakan beberapa sebab yang menyumbang pada rendahnya PAD	Upaya-upaya peningkatan PAD harus terintegrasi dengan upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan layanan publik. Semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat, semakin tinggi kemampuan masyarakat untuk membayar layanan publik yang disediakan pemerintah dan atau pajak daerah	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
PENGELUARAN		
Dengan sumber daya yang terbatas, NTT telah berusaha membuat komposisi pengeluarannya menjadi lebih baik. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya belanja publik, efektivitas pengelolaan belanja pelayanan publik masih harus ditingkatkan.	Peningkatan kapasitas aparatur perencana untuk meningkatkan efektivitas belanja publik melalui peningkatan kesesuaian antara tujuan dan prioritas pembangunan dengan alokasi anggaran	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik untuk menjamin perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan publik dilakukan secara cermat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.	
Meskipun belanja dekonsentrasi cenderung menurun, belanja DAK meningkat sebanyak tiga kali lipat sepanjang periode 2003-2007, yang menandakan bahwa peran pemerintah pusat tetap penting dalam pengeluaran publik di NTT	Alokasi belanja dekonsentrasi dan DAK perlu disinkronisasi dengan belanja APBD agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi. Diperlukan strategi perencanaan yang dapat mensinkronkan program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan belanja yang menggunakan sumber APBD.	Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat
PENDIDIKAN		
NTT berada pada peringkat kedua dalam banyaknya jumlah penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan formal.	Fokus pemerintah NTT perlu diarahkan pada upaya untuk memastikan bahwa anak usia sekolah dapat meneruskan dan menyelesaikan pendidikan formal.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
APM untuk SMP dan SMA masih tertinggal secara signifikan di bawah rata-rata nasional	Perbaikan <i>outcomes</i> pendidikan perlu dilakukan dengan perbaikan kualitas pendidikan dasar (SD dan SMP), serta peningkatan akses masyarakat pada pendidikan SMU/SMK melalui penyebaran sarana pendidikan yang lebih merata	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Anggaran pendidikan yang relatif besar sebagian besar digunakan untuk belanja personal serta barang dan jasa.	Persentase anggaran pendidikan yang relatif besar (di atas 20%) perlu diikuti dengan perubahan struktur belanja. Alokasi untuk belanja modal dan pemeliharaan perlu ditingkatkan, terutama di tingkat kabupaten/kota.	Pemerintah Kabupaten/Kota
	Diperlukan upaya penataan kembali kewenangan (dan sinergi) antara dinas pendidikan pada tingkat provinsi dan kabupaten / kota di Provinsi NTT terutama yang terkait dengan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan serta pengendalian kualitas proses belajar mengajar.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PERMASALAHAN KUNCI	REKOMENDASI	INSTANSI TERKAIT
KESEHATAN		
Sebagian besar belanja kesehatan digunakan untuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa	Alokasi belanja pegawai yang mendominasi belanja bidang kesehatan perlu diprioritaskan pada pengeluaran untuk tenaga-tenaga fungsional (dokter, dokter ahli / spesialis, tenaga medis dan perawat) sehingga rasio layanan untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan dapat terdiperbaiki	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Belanja pemeliharaan di bidang kesehatan tidak sebanding dengan belanja modal untuk menjaga infrastruktur kesehatan tetap terpelihara dengan baik.	Restrukturisasi belanja bidang kesehatan harus difokuskan pada upaya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang diimbangi dengan belanja pemeliharaan infrastruktur kesehatan yang memadai	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Masalah <i>morbidity rate</i> dan <i>malnutrisi</i> relatif tinggi terutama di daerah-daerah yang jauh dari kota	Perbaikan layanan kesehatan perlu dilakukan terutama pada wilayah wilayah terpencil, pedesaan dan perbatasan.	Pemerintah Kabupaten/Kota
	Peningkatan layanan kesehatan melalui sarana dan prasarana kesehatan harus ditunjang dengan tersedianya tenaga fungsional bidang kesehatan yang umumnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten / kota. Koordinasi antara dinas kesehatan pada aras provinsi dan kabupaten / kota mesti ditingkatkan agar upaya peningkatan layanan kesehatan dapat dimaksimalkan.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
INFRASTRUKTUR		
Alokasi anggaran infrastruktur sebagian besar digunakan untuk pembangunan/perbaikan jalan, tetapi NTT masih menempati peringkat 10 terbawah untuk provinsi dengan kondisi jalan pedesaan yang paling buruk	Efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran infrastruktur, terutama di tingkat kabupaten/kota, harus lebih difokuskan pada pembangunan jalan pedesaan, terutama di daerah-daerah terpencil.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
Masalah utama yang dihadapi sebagian besar masyarakat provinsi NTT adalah ketersediaan air bersih, namun alokasi anggaran untuk hal tersebut masih sangat kecil.	Mengingat sebagian besar dana dekonsentrasi dialokasikan untuk pembangunan prasarana jalan, maka belanja infrastruktur di provinsi dan Kabupaten/Kota sebaiknya mulai memperhatikan pembangunan infrastruktur air bersih.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
TANTANGAN PEMBANGUNAN NTT		
Proses perencanaan dan penganggaran masih jauh dari efektif. Walaupun dokumen perencanaan sudah memprioritaskan sektor-sektor tertentu, dokumen tersebut belum memberikan panduan yang jelas untuk mengimplementasikan rencana-rencana tersebut. Selain itu, realisasi anggaran masih jauh dari efektif karena mayoritas belanja publik atau langsung dilakukan pada akhir tahun anggaran.	Pemerintah daerah di provinsi NTT perlu memperbaiki dokumen perencanaan dan siklus penganggaran. Untuk dokumen perencanaan, perlu dibangun suatu rencana program dan kegiatan yang terpadu serta indikator-indikator terukur dan realistis yang dapat memonitor pelaksanaan. Langkah awal untuk memperbaiki siklus penganggaran adalah dengan menetapkan APBD sebelum dimulainya suatu tahun anggaran dan APBD Perubahan sebelum dimulainya kuartal keempat dari tahun anggaran yang bersangkutan.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota
Sama halnya dengan daerah lain, pemerintah-pemerintah daerah di NTT juga menghadapi kesulitan dalam mengikuti perubahan berbagai peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini terutama disebabkan oleh cepatnya pergantian peraturan yang dibuat oleh	Pemerintah Provinsi NTT harus merespons secara cepat perubahan regulasi nasional tentang pengelolaan keuangan Negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui upaya peningkatan kapasitas <i>legislative drafting</i> bagi aparturnya, sehingga dapat secara cepat pula merubah atau menciptakan perda tentang pengelolaan keuangan daerah sesuai perubahan regulasi nasional.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota

PERMASALAHAN KUNCI	REKOMENDASI	INSTANSI TERKAIT
TANTANGAN PEMBANGUNAN NTT		
pemerintah pusat yang tidak segera diikuti dengan perubahan regulasi pelaksanaannya, selain karena lemahnya kapasitas aparatur daerah dalam menyiapkan peraturan turunannya di daerah (<i>legislative drafting</i>).		
NTT telah membuat kemajuan penting dalam meningkatkan efisiensi birokrasinya. Secara umum, NTT berhasil mengurangi proporsi pengeluaran aparaturnya. Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Timor Tengah Selatan telah siap secara <i>de jure</i> melakukan restrukturalisasi kelebagaannya dengan telah menetapkan regulasi daerah tentang organisasi dan tata kerja kelebagaannya bahkan dampaknya menunjukkan keberhasilannya mengurangi belanja gaji apabila baik secara <i>de jure dan de facto</i> menerapkan regulasi-regulasi daerah dimaksud sebagai implementasi lanjutan dari PP 41/2007	Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT disarankan segera mengimplementasikan PP no. 41/2007. Sebagai langkah awal implementasi PP tersebut, dapat dilakukan suatu kajian akademis mengenai struktur dan tata kerja yang paling optimal berdasarkan kondisi daerah setempat untuk menciptakan regulasi daerah tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Permasalahan gender belum mendapatkan ruang yang memadai dalam dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota.	<i>Gender</i> perlu mendapat ruang yang cukup dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Untuk menjamin perhatian yang memadai terhadap persoalan gender, maka dalam setiap penyusunan program, SKPD harus memberi perhatian khusus dampak suatu program terhadap perempuan.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Di NTT hampir tidak pernah dilakukan upaya untuk menghitung berapa proporsi anggaran yang bermanfaat bagi kelompok laki-laki dan perempuan.	Pemerintah provinsi NTT perlu membangun sistem informasi / data terpilah untuk proses perencanaan. Data terpilah tersebut mesti digunakan sebagai salah satu syarat penting dalam perencanaan dan penganggaran.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Indikator kinerja yang berbasis gender perlu secara spesifik ditetapkan sebagai acuan dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Dampak keberhasilan pembangunan baik terhadap kelompok laki-laki maupun perempuan harus senantiasa diukur.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Penelitian yang lebih mendalam dibutuhkan untuk menjelaskan mengapa tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja jauh lebih rendah secara signifikan dibanding laki-laki, diluar pertimbangan tingkat pendidikannya. Kemungkinan-kemungkinan yang perlu diuji adalah harapan masyarakat, struktur lapangan pekerjaan, kondisi ekonomi, diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, serta pilihan perempuan untuk lebih bekerja di rumah.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Walaupun tingkat pendidikan perempuan tergolong sama dengan laki-laki, namun proporsi perempuan yang tidak pernah mengecap pendidikan dan buta huruf lebih tinggi daripada laki-laki.	Mentargetkan perbaikan tingkat melek huruf dan peningkatan lama sekolah di kalangan perempuan. Upaya ini akan memberikan tingkat keuntungan investasi di bidang pendidikan yang lebih tinggi.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dirasa belum efektif dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan rawan pangan di NTT.	Pemerintah provinsi NTT harus melakukan upaya revitalisasi keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTT. Lembaga ini perlu lebih ditingkatkan dari sekedar lembaga non-struktural yang bersifat koordinatif.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PERMASALAHAN KUNCI	REKOMENDASI	INSTANSI TERKAIT
TANTANGAN PEMBANGUNAN NTT		
Tumpang tindih kegiatan penanggulangan kemiskinan dan lemahnya koordinasi	Diperlukan koordinasi yang semakin baik antara TKPK dan DKP provinsi dan kabupaten/kota serta semua lembaga yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan di NTT sehingga dapat menghindari tumpang tindih program antara provinsi dan kabupaten/kota serta lembaga terkait, untuk menghasilkan sinergi	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Kerangka evaluasi atas pengelolaan program/kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan belum berjalan dengan baik.	Diperlukan evaluasi terpadu baik program dan pengeluaran untuk penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan di NTT. Evaluasi ini harusnya dapat menilai sejauhmana efektivitasnya, sekaligus sebagai masukan untuk perbaikan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan rawan pangan selanjutnya.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
	Untuk menanggulangi kemiskinan dan rawan pangan secara terintegrasi, perlu dikembangkan strategi dan program yang komprehensif. Hal ini disebabkan karena kedua masalah ini mencakup dimensi yang sangat luas dan karena itu penanggulangannya diperlukan strategi yang menyeluruh dan lintas instansi.	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

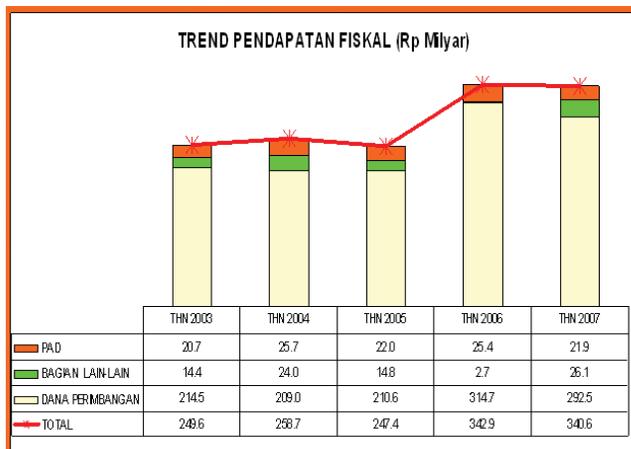
Annex 2.

Analisis Keuangan Publik di 7 Lokasi Studi Kasus

KOTA KUPANG

Dalam kurun waktu 2003 dan 2007 total penerimaan Kota Kupang meningkat sebesar 36%, namun peningkatan ini tidak merubah struktur penerimaan. Penerimaan ini mengalami penurunan pada tahun 2005. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2006 dan 2007. Peningkatan penerimaan terutama disebabkan karena adanya peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari dana perimbangan (DAU). Selama periode tersebut struktur penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen dana perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan (mencapai lebih dari 80%) sementara peranan PAD justru semakin berkurang dari 8% pada tahun 2003 menjadi 6% pada tahun 2007.

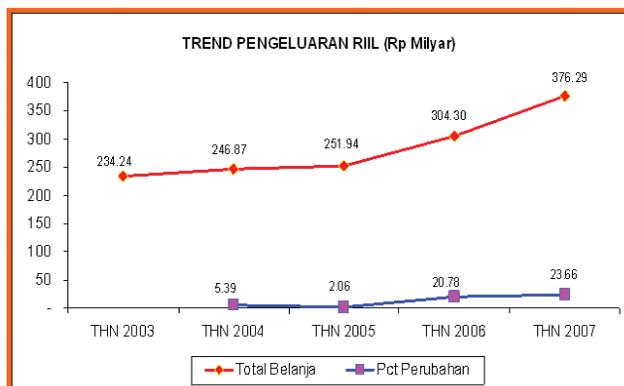
GAMBAR 1.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2009), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Dalam periode 2003-2007, pengeluaran pemerintah Kota Kupang meningkat sebanyak 52%. Peningkatan ini didorong oleh bertambahnya jumlah belanja daerah pada tahun 2006 sebesar 20% dan pada tahun 2007 sebesar 23%.

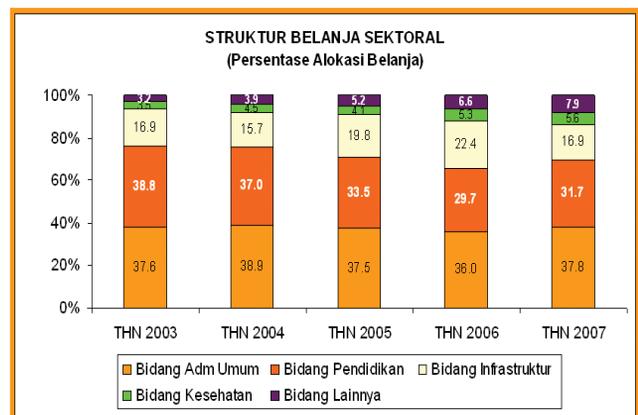
GAMBAR 2.



Sumber: Database PEA NTT, tim PEACH NTT (2009),

Lebih dari sepertiga (37%) pengeluaran Kota Kupang dibelanjakan untuk Administrasi Umum. Sektor ini dan sektor pendidikan merupakan dua sektor yang memperoleh alokasi belanja terbesar. Pengeluaran untuk sektor infrastruktur memperoleh porsi yang cenderung berfluktuasi, selama tahun 2003 sampai 2007 alokasi terbesar untuk bidang ini terjadi pada tahun 2006 sebesar 22,4%. Alokasi pengeluaran untuk sektor kesehatan di Kota Kupang memperoleh bagian yang relatif kecil, namun cenderung meningkat. Pada tahun 2003 sektor kesehatan memperoleh porsi 3,5% tetapi pada tahun 2007 bertambah menjadi 5,6%.

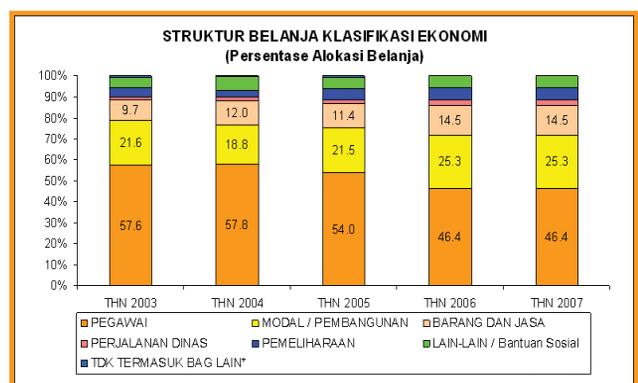
GAMBAR 3.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Pada Tahun 2003 hingga 2005 terhitung setengah dari total pengeluaran Kota Kupang dibelanjakan untuk gaji pegawai, walaupun demikian jumlah ini mengalami penurunan menjadi sekitar 46% pada tahun 2006 dan 2007. Pada periode yang sama, proporsi pengeluaran yang dialokasikan untuk Belanja Modal mengalami sedikit peningkatan dari 21% menjadi 25%. Hampir mirip dengan daerah lainnya di NTT, pengeluaran untuk Belanja Pemeliharaan di Kota Kupang sangatlah kecil.

GAMBAR 4.

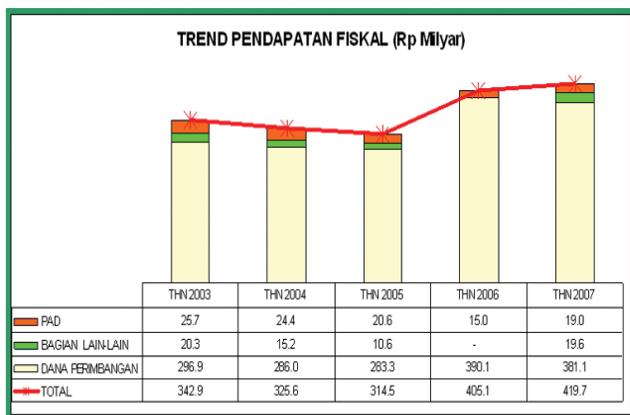


Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Dalam kurun waktu 2003 dan 2007 total penerimaan Kab.Timor Tengah Selatan meningkat sebesar 22%, namun peningkatan ini tidak merubah struktur penerimaan. Penerimaan ini mengalami penurunan pada tahun 2004 dan 2005. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2006 dan 2007. Peningkatan penerimaan terutama disebabkan karena adanya peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari dana perimbangan (DAU). Selama periode tersebut struktur penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen dana perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan bahkan terus bertambah besar (dari 87% menjadi 91%) sementara peranan PAD justru semakin berkurang dari 8% pada tahun 2003 menjadi 5% pada tahun 2007. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan ketergantungan fiskal yang terus meningkat.

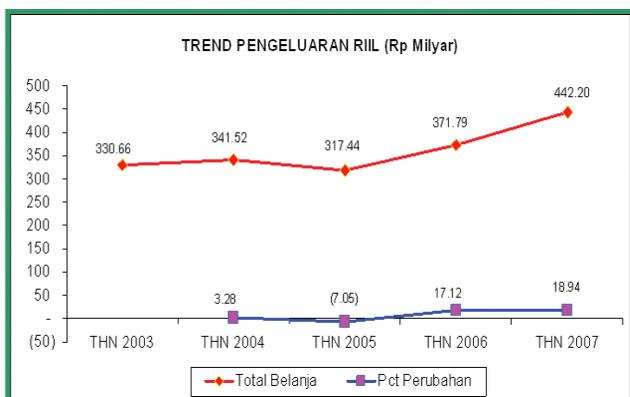
GAMBAR 1.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Dalam periode 2003-2007, pengeluaran pemerintah Kab.Timor Tengah Selatan meningkat sebanyak 32%. Namun pada tahun 2005 terjadi penurunan sebesar 7%. Penurunan jumlah pengeluaran ini disebabkan karena pada sisi penerimaan terjadi penurunan dalam jumlah yang relatif kecil.

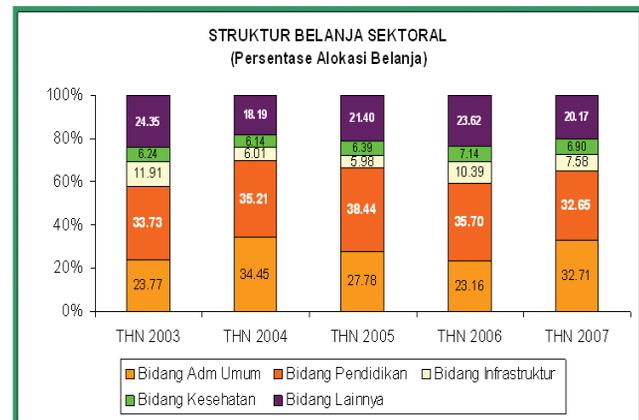
GAMBAR 2.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Pemerintah Kab Timor Tengah Selatan telah membuktikan perhatiannya pada pengembangan bidang pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2003 sampai 2007 alokasi anggaran terbesar diperuntukan bagi bidang pendidikan. Namun sektor kesehatan dan infrastruktur ternyata belum memperoleh alokasi anggaran yang cukup memadai. Sektor kesehatan bahkan hanya memperoleh porsi antara 6% sampai 7% selama periode tersebut.

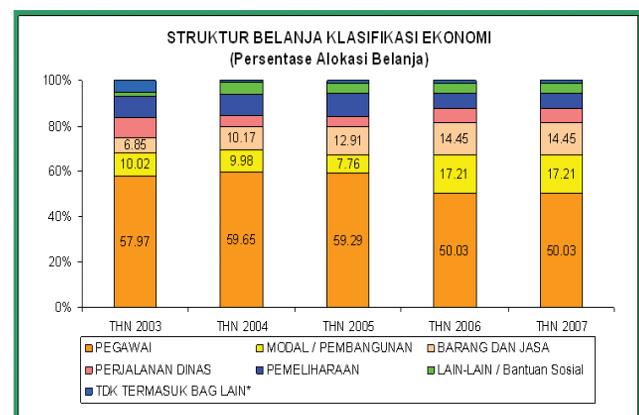
GAMBAR 3.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Belanja pegawai di kab. Timor Tengah Selatan menghabiskan setengah bagian dari total belanja APBD. Namun sejak tahun 2006 dan 2007 pemerintah kab.Timor Tengah Selatan telah berhasil mengurangi sedikit porsi belanja pegawai, menjadi 50% dari porsi semula sebesar 57% pada tahun 2003. Sementara porsi belanja modal meningkat dari 10% pada tahun 2003 menjadi 17% pada tahun 2007. Hal yang sama terjadi pula pada klasifikasi belanja barang dan jasa yang meningkat dari 6% menjadi 14% dari total belanja daerah. Namun sangat disayangkan bahwa porsi belanja pemeliharaan sedikit mengalami penurunan dari 9% pada tahun 2003 kemudian berkurang menjadi 6% pada tahun 2007.

GAMBAR 4.

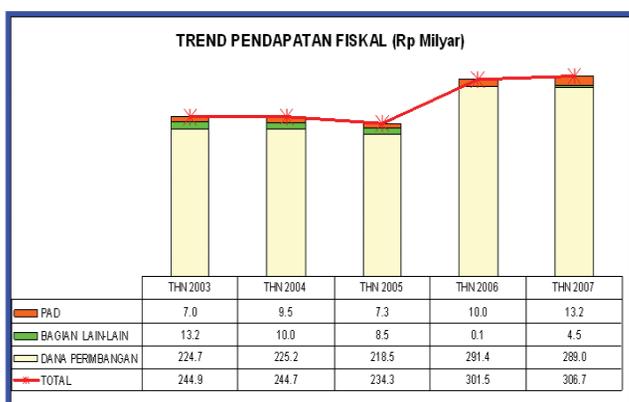


Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Dalam kurun waktu 2003 dan 2007 total penerimaan Kab. Timor Tengah Utara meningkat sebesar 25%, namun peningkatan ini tidak merubah struktur penerimaan. Pada tahun 2004 nyaris tidak terjadi perubahan pada penerimaan daerah ini. Ada penurunan pada tahun 2005, tapi kemudian meningkat lagi pada tahun 2006 dan 2007. Peningkatan penerimaan terutama disebabkan karena adanya peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari dana perimbangan (DAU). Selama periode tersebut struktur penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen dana perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan bahkan terus bertambah besar (dari 87% menjadi 91%) sementara peranan PAD justru semakin berkurang dari 8% pada tahun 2003 menjadi 5% pada tahun 2007. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan ketergantungan fiskal yang terus meningkat.

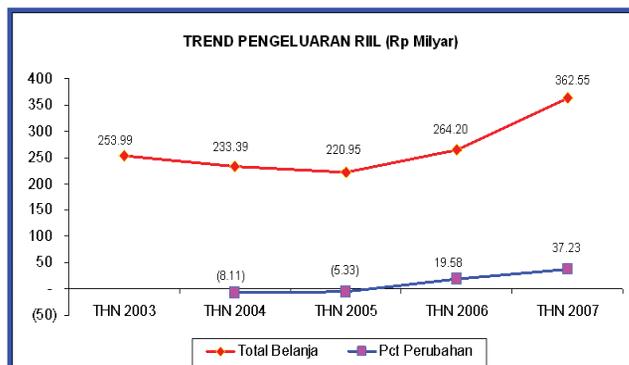
GAMBAR 1.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Pola perkembangan pengeluaran kab. Timor Tengah Utara berfluktuasi mengikuti pola perkembangan penerimaannya. Selama periode tahun 2003-2007, telah terjadi dua kali penurunan jumlah pengeluaran, yaitu pada tahun 2004 dan 2005. Namun sejak tahun 2006 jumlah pengeluaran meningkat sebesar 19% dan bertambah lagi 37% pada tahun 2007.

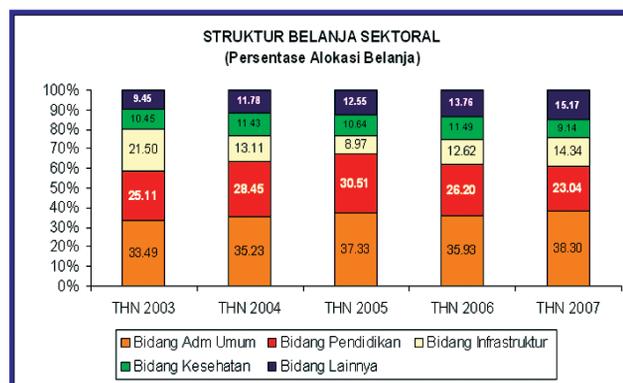
GAMBAR 2.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Sepuluh dari pengeluaran kab. Timor Tengah Utara digunakan untuk bidang administrasi umum dan bidang pendidikan. Bidang Administrasi umum mengambil sepertiga dari porsi belanja dan merupakan bidang yang memperoleh alokasi anggaran terbesar. Sementara pengeluaran untuk bidang pendidikan telah memenuhi ketentuan undang-undang, dimana alokasi pengeluaran mencapai lebih dari 20%. Pengeluaran bidang infrastruktur berfluktuasi dan menunjukkan trend semakin kecil. Sedangkan bidang kesehatan memperoleh porsi lebih kecil yaitu 9% s/d 11% dalam periode tahun 2003-2007.

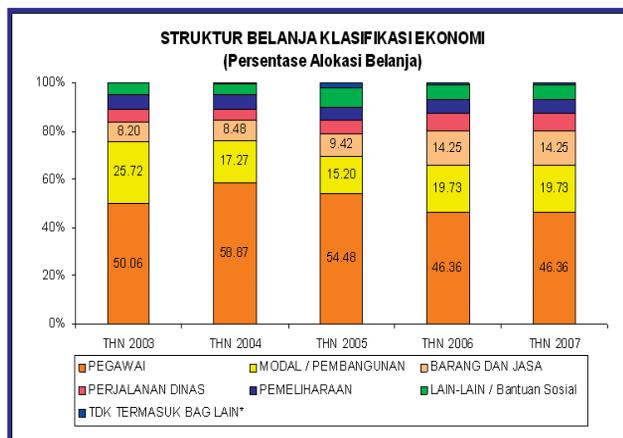
GAMBAR 3.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Sama seperti daerah lainnya, belanja pegawai di kab. Timor Tengah Utara menghabiskan setengah bagian dari total belanja APBD. Namun sejak tahun 2006 pemerintah daerah ini telah berhasil mengurangi sedikit porsi belanja pegawai, menjadi 46% dari porsi semula sebesar 50% pada tahun 2003. Sementara porsi belanja modal berkurang dari 25% pada tahun 2003 menjadi 19% pada tahun 2007. Pengeluaran untuk belanja barang dan jasa meningkat dari 8% menjadi 14% dari total belanja daerah. Sedangkan porsi belanja pemeliharaan cenderung tetap.

GAMBAR 4.

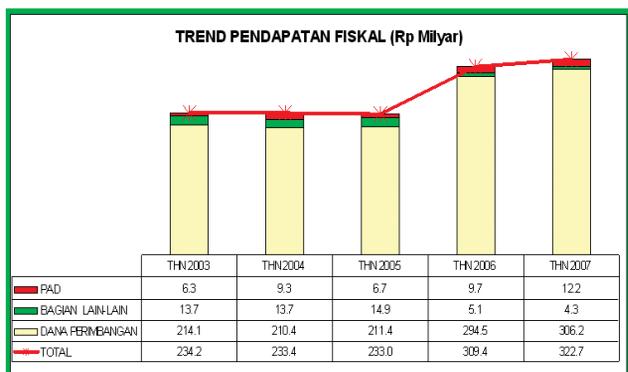


Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

KABUPATEN FLORES TIMUR

Dalam kurun waktu 2003 dan 2007 penerimaan Kab. Flores Timur telah meningkat sebesar 38%, namun peningkatan ini tidak merubah struktur penerimaan. Selama tahun 2003 sampai 2005 nyaris tidak terjadi perubahan pada penerimaan daerah ini, bahkan cenderung berkurang dalam jumlah relatif kecil. Namun pada tahun 2006 dan 2007, terjadi peningkatan yang disebabkan karena adanya peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari dana perimbangan (DAU). Selama periode tersebut struktur penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen dana perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan bahkan terus bertambah besar (dari 91% menjadi 95%) sementara peranan PAD cenderung tidak berubah. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan ketergantungan fiskal yang terus meningkat.

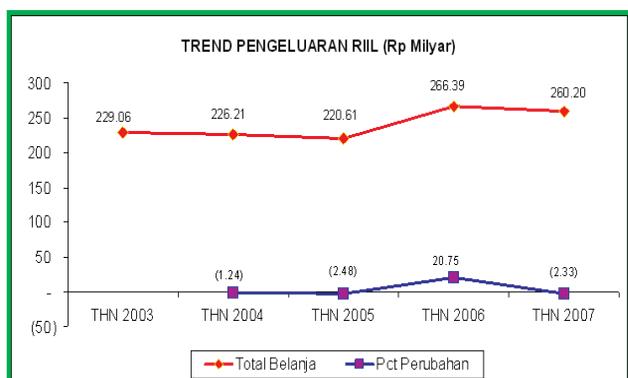
GAMBAR 1.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Pengeluaran kab.Flores Timur selama tahun 2003-2007 berfluktuasi bahkan cenderung menurun. Selama periode tersebut hanya tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah pengeluaran sebesar 20%. Secara riil pada tahun 2004, 2005 dan 2007 sebenarnya jumlah pengeluaran daerah ini telah mengalami penurunan walaupun dalam persentase relatif kecil.

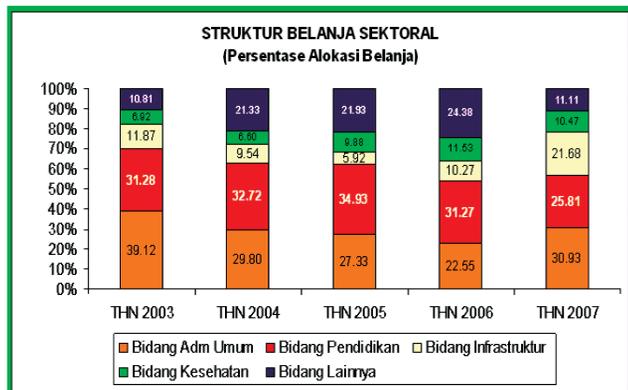
GAMBAR 2.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Separuh dari pengeluaran kab.Flores Timur digunakan untuk bidang administrasi umum dan bidang pendidikan. Bidang Administrasi umum merupakan bidang yang memperoleh alokasi anggaran terbesar, namun porsi pengeluarannya cenderung berkurang. Sementara pengeluaran untuk bidang pendidikan telah memenuhi ketentuan undang-undang, dimana alokasi pengeluaran mencapai lebih dari 20%. Pengeluaran bidang infrastruktur berfluktuasi dan menunjukkan trend semakin besar. Sedangkan bidang kesehatan memperoleh porsi lebih kecil namun juga cenderung bertambah porsinya, yaitu dari 6% pada tahun 2003 menjadi 10% dalam periode tahun 2007.

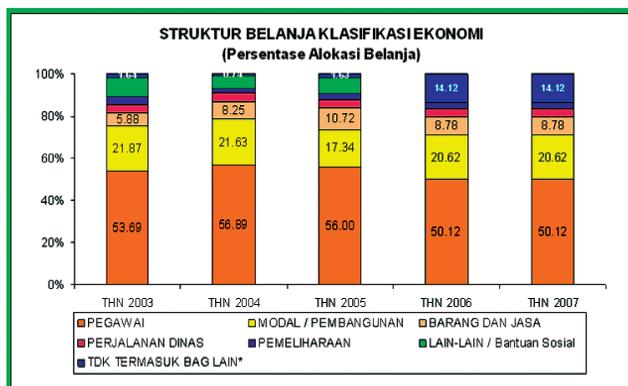
GAMBAR 3.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Sebagaimana kabupaten lainnya, Flores Timur menghabiskan separuh pengeluarannya untuk belanja pegawai. Jumlah porsi belanja pegawai tidak mengalami perubahan berarti selama tahun 2003-2007. Belanja modal memperoleh porsi relatif besar, yaitu antara 17% s/d 20% selama periode tersebut. Namun sangat disayangkan porsi belanja pemeliharaan secara riil ternyata memperoleh bagian yang sangat kecil bahkan cenderung berkurang, yaitu dari 4% pada tahun 2003 menjadi hanya 2% pada tahun 2007. Sementara belanja tidak termasuk bagian lain dalam tahun 2006 dan 2007 justru memperoleh porsi yang meningkat secara signifikan

GAMBAR 4.

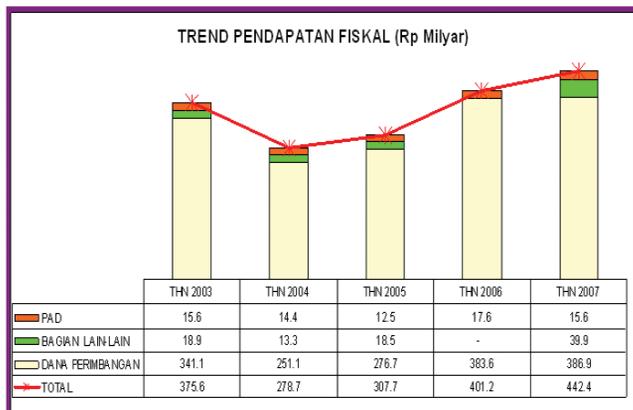


Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

KABUPATEN MANGGARAI

Dalam kurun waktu 2003 dan 2007 total penerimaan Kab. Manggarai secara riil meningkat sebesar 18%. Pada tahun 2004 terjadi penurunan penerimaan sebesar 26%. Pada tahun 2005 sedikit meningkat, kemudian meningkat lagi pada tahun 2006 dan 2007. Peningkatan penerimaan terutama disebabkan karena adanya peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari dana perimbangan (DAU). Selama periode tersebut struktur penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen dana perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan tetapi sedikit berkurang (dari 91% menjadi 87%) sementara peranan PAD cenderung tetap yaitu hanya 4%, kecuali pada tahun 2004 menjadi 5%.

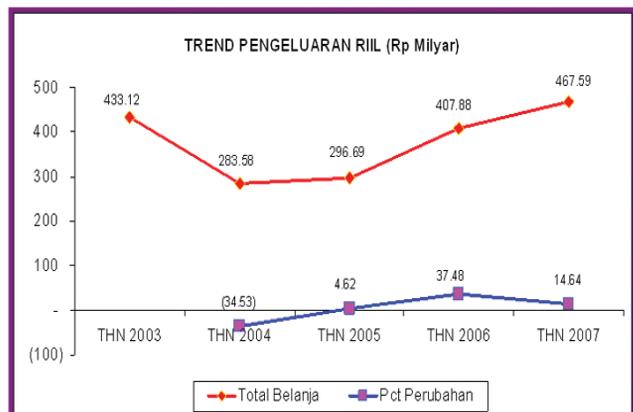
GAMBAR 1.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Pengeluaran kab. Manggarai selama tahun 2003-2007 berfluktuasi bahkan cenderung menurun. Selama periode tersebut hanya tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah pengeluaran sebesar 20%. Secara riil pada tahun 2004, 2005 dan 2007 sebenarnya jumlah pengeluaran daerah ini telah mengalami penurunan walaupun dalam persentase relatif kecil.

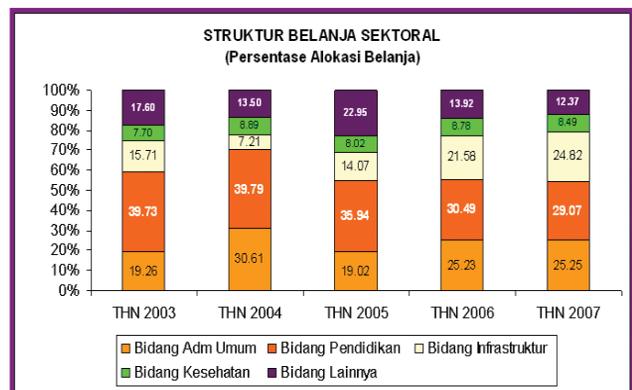
GAMBAR 2.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Lebih dari sepertiga pengeluaran kab. Manggarai digunakan untuk bidang pendidikan. Pendidikan memperoleh porsi hampir 40% pada tahun 2003, namun sejak tahun 2005 jumlah ini berkurang menjadi 35% dan pada akhirnya menjadi 29% pada tahun 2007. Sementara bidang administrasi umum merupakan bidang yang memperoleh alokasi anggaran terbesar kedua dengan porsi pengeluaran yang cenderung meningkat. Demikian pula sektor infrastruktur dimana jumlah pengeluaran dan porsinya mengalami peningkatan. Pada sisi lain sektor kesehatan hanya memperoleh porsi kurang dari 10% pengeluaran daerah.

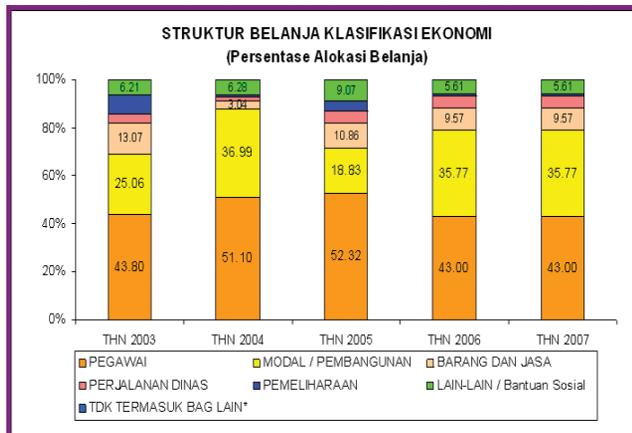
GAMBAR 3.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Seperti kabupaten lainnya, Manggarai menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk belanja pegawai. Jumlah porsi belanja pegawai berfluktuasi selama tahun 2003-2007. Belanja modal memperoleh porsi relatif besar dengan kecenderungan berfluktuasi. Namun sangat disayangkan porsi belanja pemeliharaan secara riil ternyata memperoleh bagian yang sangat kecil bahkan cenderung berkurang.

GAMBAR 4.

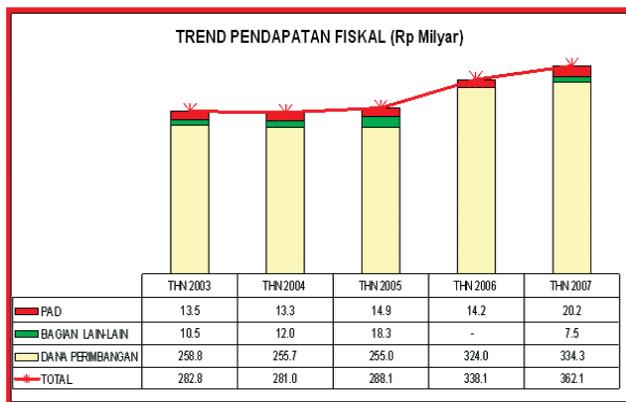


Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

KABUPATEN SUMBA BARAT

Total penerimaan Kab.Sumba Barat meningkat sebesar 28% selama tahun 2003-2007, namun peningkatan ini tidak merubah struktur penerimaan. Pada tahun 2003 sampai 2005 nyaris tidak terjadi perubahan pada penerimaan daerah ini. Kemudian meningkat pada tahun 2006 dan 2007. Peningkatan penerimaan terutama disebabkan karena adanya peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari dana perimbangan (DAU). Selama periode tersebut struktur penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen dana perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan (sekitar 92%) sementara peranan PAD justru cenderung tetap sebesar 5%. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan ketergantungan fiskal yang sangat besar terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat.

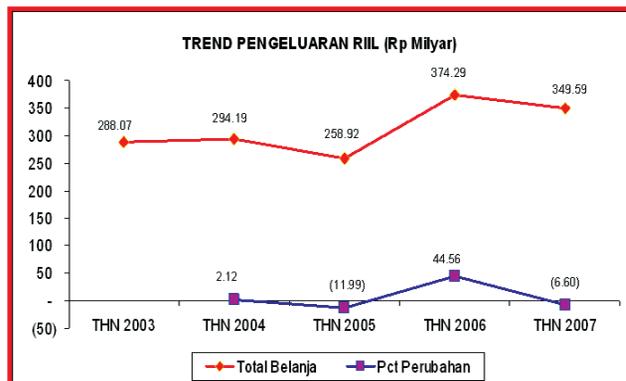
GAMBAR 1.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Pengeluaran kab. Sumba Barat selama tahun 2003-2007 berfluktuasi setiap tahunnya. Selama periode tersebut terjadi peningkatan pengeluaran hanya pada tahun 2004 dan 2006. Secara riil pada tahun 2005 dan 2007 sebenarnya jumlah pengeluaran daerah ini telah mengalami penurunan walaupun dalam persentase relatif kecil.

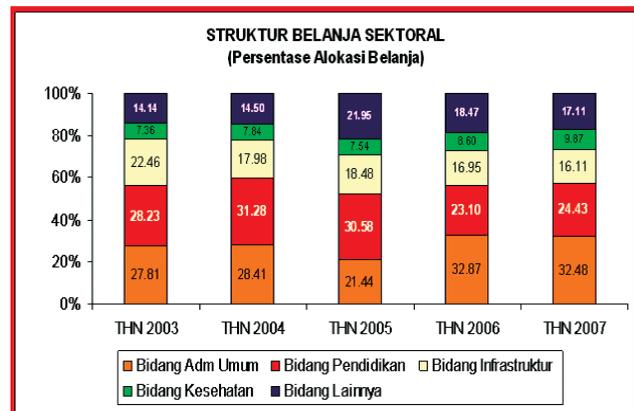
GAMBAR 2.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Sepertiga pengeluaran kab. Sumba Barat dibelanjakan untuk Administrasi Umum. Sektor ini dan sektor pendidikan merupakan dua sektor yang memperoleh alokasi belanja terbesar. Pengeluaran untuk sektor infrastruktur memperoleh porsi yang cukup besar, namun cenderung menurun. Alokasi pengeluaran untuk sektor kesehatan di kab. Sumba Barat memperoleh bagian yang relatif kecil, namun cenderung meningkat walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Pada tahun 2003 sektor kesehatan memperoleh porsi 7% tetapi pada tahun 2007 bertambah menjadi 9%.

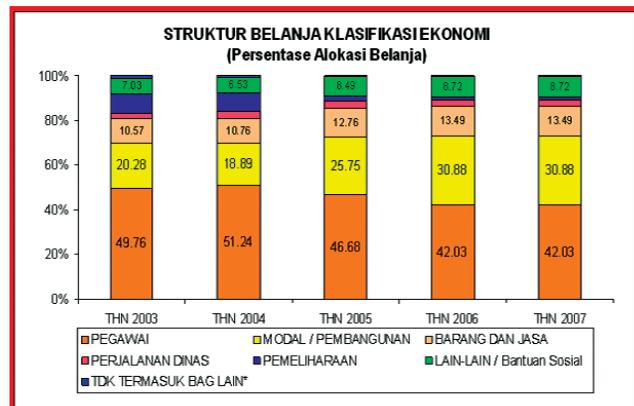
GAMBAR 3.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Seperti kabupaten lainnya, Sumba Barat menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk belanja pegawai. Namun pemerintah daerah ini telah berhasil mengurangi porsi belanja pegawai dari 49% pada tahun 2003 menjadi 42% pada tahun 2007. Sementara belanja modal memperoleh porsi relatif besar dengan kecenderungan semakin meningkat. Namun sangat disayangkan porsi belanja pemeliharaan secara riil ternyata memperoleh bagian yang sangat kecil bahkan cenderung berkurang dari semula 8% menjadi 1,4% saja pada tahun 2007.

GAMBAR 4.

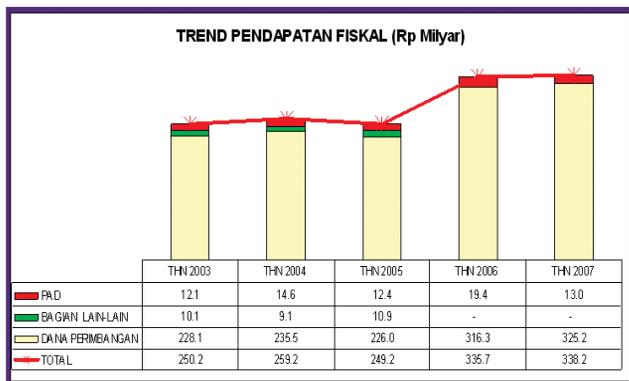


Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

KABUPATEN SUMBA TIMUR

Dalam kurun waktu 2003 dan 2007 total penerimaan Kab. Sumba Timur meningkat sebesar 35%. Namun pada tahun 2005 terjadi penurunan pada penerimaan daerah ini, sebesar 5%. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2006 dan 2007. Peningkatan penerimaan terutama disebabkan karena adanya peningkatan dalam jumlah yang cukup besar dari dana perimbangan (DAU). Selama periode tersebut struktur penerimaan tidak mengalami perubahan, komponen dana perimbangan tetap merupakan bagian yang dominan bahkan terus bertambah besar (dari 91% menjadi 96%) sementara peranan PAD justru semakin berkurang dari 5% pada tahun 2003 menjadi 4% pada tahun 2007. Kenyataan ini sekaligus menunjukkan ketergantungan fiskal yang terus meningkat.

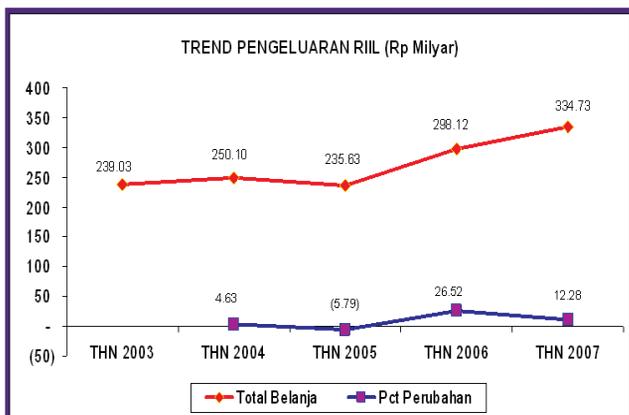
GAMBAR 1.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Pengeluaran kab. Sumba Timur selama tahun 2003-2007 berfluktuasi mengikuti pola penerimaan setiap tahunnya. Selama periode tersebut terjadi penurunan pengeluaran pada tahun 2005, sebesar 5,7%.

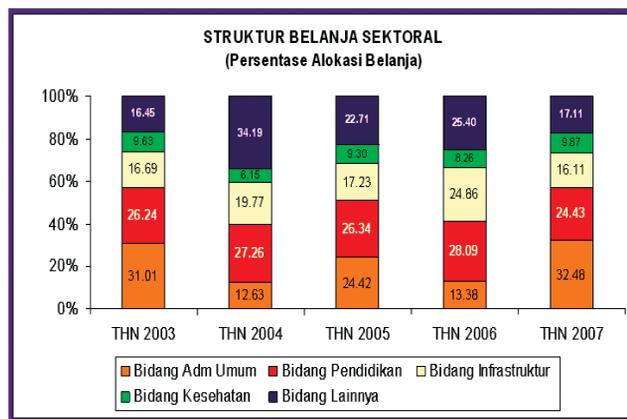
GAMBAR 2.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Pengeluaran kab. Sumba Timur untuk bidang pendidikan memperoleh porsi yang cukup besar. Sektor ini dan bidang administrasi umum merupakan dua sektor yang memperoleh alokasi belanja terbesar. Namun porsi bidang administrasi umum cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Demikian pula pengeluaran untuk sektor infrastruktur memperoleh porsi yang cukup besar, namun cenderung berfluktuasi. Alokasi pengeluaran untuk sektor kesehatan di kab. Sumba Timur memperoleh bagian yang relatif kecil, namun cenderung meningkat walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Pada tahun 2003 sektor kesehatan memperoleh porsi 7% tetapi pada tahun 2007 bertambah menjadi 9%.

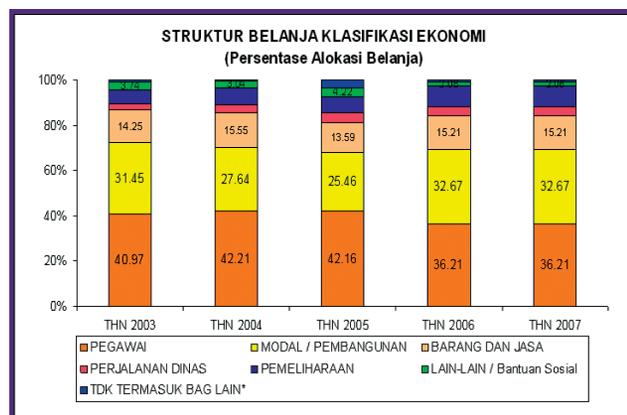
GAMBAR 3.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Seperti kabupaten lainnya, Sumba Timur menghabiskan sebagian besar pengeluarannya untuk belanja pegawai. Namun daerah ini telah berhasil mengurangi porsi belanja pegawai dari 40% pada tahun 2003 menjadi 36% pada tahun 2007. Sementara belanja modal memperoleh porsi relatif besar dengan kecenderungan berfluktuasi. Porsi belanja pemeliharaan secara riil ternyata memperoleh bagian yang sangat kecil tetapi terus bertambah besar porsinya. Pada tahun 2003 alokasi untuk biaya pemeliharaan sebesar 6% kemudian menjadi 9% pada tahun 2007.

GAMBAR 4.



Sumber : Data Base NTT PEACH, Tim Peneliti NTT PEACH (2008), angka tahun 2007 merupakan hasil estimasi

Annex 3.

Catatan Metodologi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah anggaran tahunan yang dialokasikan dan/atau dibelanjakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran tersebut terdiri dari dua kategori: rencana (untuk disetujui oleh DPR) dan realisasi (pengeluaran yang sebenarnya atau laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah).

Rentang data dari tahun 2003 hingga 2006, diperoleh dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTT. Data tahun 2007 dibuat berdasarkan data anggaran. Proyeksi dibuat untuk beberapa komponen pendapatan dalam anggaran untuk NTT tahun 2008-2009. Departemen Keuangan memberikan data sebagai perbandingan skala nasional.

Annex 4.

Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Penerimaan (harga konstan 2006, Rp miliar)

PROVINSI	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PENERIMAAN ASLI DAERAH	124.0	154.2	162.0	176.0	182.4	-	-
Pos Pajak Daerah	69.0	95.7	98.5	101.6	109.5	-	-
Pos Retribusi Daerah	15.2	20.8	23.0	27.1	30.8	-	-
Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	7.2	11.1	15.5	10.5	13.3	-	-
Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	32.7	26.6	25.0	36.8	28.7	-	-
DANA PERIMBANGAN	409.7	416.4	403.0	528.1	541.5	-	-
Pos Bagi Hasil Pajak	29.6	35.4	51.2	48.7	37.0	-	-
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	0.1	0.1	0.0	-	-	-	-
Pos Dana Alokasi Umum	372.2	380.9	351.8	479.4	504.6	516.1	494.2
Pos Dana Alokasi Khusus	7.9	-	-	-	-	-	-
Bagi Hasil Pajak dan Keuangan dari Provinsi	0.0	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0.0	-	-	-	-	-	-
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	11.6	12.5	8.8	-	-	-	-
Penerimaan Dari Pemerintah	11.6	12.5	8.8	-	-	-	-
Penerimaan Dari Provinsi	0.0	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dari Kabupaten/Kota Lainnya	0.0	-	-	-	-	-	-
Dana Darurat	0.0	-	-	-	-	-	-
Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang	0.0	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Adhoc	0.0	-	-	-	-	-	-
Bantuan Dana Pilkada dari APBN	0.0	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	0.0	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	545.4	583.2	573.8	704.1	724.0	771.0	738.4

KABUPATEN/KOTA	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PENERIMAAN ASLI DAERAH	193.5	233.0	188.9	239.5	227.7	-	-
Pos Pajak Daerah	32.3	30.6	29.5	33.5	35.7	-	-
Pos Retribusi Daerah	49.1	59.1	64.2	86.1	79.7	-	-
Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	8.3	14.8	10.1	12.2	15.6	-	-
Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	103.8	128.6	85.1	107.7	96.7	-	-
DANA PERIMBANGAN	3492.9	3,527.7	3,510.6	4,805.1	4,991.5	-	-
Pos Bagi Hasil Pajak	185.8	228.4	260.3	242.6	202.7	-	-
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	5.8	6.5	4.5	20.4	-	-	-
Pos Dana Alokasi Umum	3144.1	3,122.5	3,000.6	4,050.0	4,106.7	4,071.5	3,825.6
Pos Dana Alokasi Khusus	157.2	170.3	245.2	492.0	682.1	-	-
Bagi Hasil Pajak dan Keuangan dari Provinsi	0.0	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0.0	-	-	-	-	-	-
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	203.4	208.3	205.3	110.9	218.6	-	-
Penerimaan Dari Pemerintah	125.1	97.4	106.4	12.6	-	-	-
Penerimaan Dari Provinsi	25.5	59.7	56.3	86.8	-	-	-
Penerimaan Dari Kabupaten/Kota Lainnya	0.0	9.2	-	3.0	-	-	-
Dana Darurat	35.4	17.6	7.0	3.4	-	-	-
Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang	0.0	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Adhoc	0.0	-	-	-	-	-	-
Bantuan Dana Pilkada dari APBN	0.0	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	0.2	16.1	8.8	5.2	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	3889.8	3,969.1	3,904.8	5,155.5	5,437.8	5,267.7	4,986.0

Annex 4.

Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Pengeluaran (harga konstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)

PROVINSI	2003	2004	2005	2006	2007
Bidang Administrasi Umum Pemerintahan	287.0	252.8	250.3	298.5	339.9
Bidang Pertanian	10.2	23.5	24.0	24.4	39.0
Bidang Perikanan dan Kelautan	8.6	8.5	9.1	8.8	9.5
Bidang Pertambangan dan Energi	7.8	5.7	7.3	4.5	4.8
Bidang Kehutanan dan Perkebunan	11.7	11.9	12.1	14.9	7.4
Bidang Perindustrian dan Perdagangan	7.0	6.8	5.3	6.7	7.4
Bidang Perkoperasian	3.5	3.2	4.0	4.4	4.9
Bidang Penanaman Modal	2.4	2.4	2.8	2.9	2.8
Bidang Ketenagakerjaan	8.5	7.5	7.2	7.7	11.8
Bidang Kesehatan	52.2	52.8	53.1	72.9	103.4
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	31.5	32.4	34.9	47.7	48.1
Bidang Sosial	11.8	10.6	14.5	14.8	14.4
Bidang Penataan Ruang	0.0	-	-	-	7.7
Bidang Permukiman	0.0	-	-	-	-
Bidang Pekerjaan Umum	58.6	51.6	71.1	107.8	238.4
Bidang Perhubungan	8.3	6.2	5.5	7.5	9.7
Bidang Lingkungan Hidup	4.0	3.3	3.6	3.8	5.0
Bidang Kependudukan	0.0	-	-	-	-
Bidang Olah Raga	2.5	2.3	2.7	4.1	5.4
Bidang Kepariwisata	5.4	4.4	5.1	5.9	5.3
Bidang Pertanahan	0.0	-	-	-	-
Lain-Lain (Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan)	0.0	-	-	-	-
Lain-Lain (Belanja Tidak Tersangka)	-	-	-	-	-
TOTAL	520.9	485.8	512.5	637.3	864.9

KABUPATEN/KOTA	2003	2004	2005	2006	2007
Bidang Administrasi Umum Pemerintahan	1161.1	1,319.7	1,248.6	1,527.0	1,831.5
Bidang Pertanian	148.1	137.0	138.4	192.9	234.1
Bidang Perikanan dan Kelautan	36.0	47.7	57.6	72.4	81.3
Bidang Pertambangan dan Energi	32.3	34.9	21.0	39.1	42.7
Bidang Kehutanan dan Perkebunan	67.6	62.8	56.9	67.3	58.3
Bidang Perindustrian dan Perdagangan	32.0	29.2	25.8	30.5	38.4
Bidang Perkoperasian	28.5	24.0	20.3	23.3	24.7
Bidang Penanaman Modal	4.9	5.5	5.8	5.8	7.1
Bidang Ketenagakerjaan	22.5	23.7	24.0	33.6	42.3
Bidang Kesehatan	289.1	305.1	304.3	421.9	487.6
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1236.5	1,264.5	1,239.6	1,366.6	1,545.3
Bidang Sosial	20.8	19.9	17.3	21.5	23.9
Bidang Penataan Ruang	0.0	0.4	0.1	2.1	45.2
Bidang Permukiman	10.5	112.2	71.2	96.3	52.2
Bidang Pekerjaan Umum	471.0	317.1	354.5	544.8	699.1
Bidang Perhubungan	49.8	45.6	66.4	85.4	91.1
Bidang Lingkungan Hidup	21.8	23.2	26.5	36.7	41.7
Bidang Kependudukan	33.1	43.8	47.3	56.6	71.2
Bidang Olah Raga	3.1	1.0	1.8	1.8	4.0
Bidang Kepariwisata	24.8	24.2	25.1	26.3	29.4
Bidang Pertanahan	3.9	1.6	0.9	0.7	0.2
Lain-Lain (Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan)	68.4	14.5	29.9	-	-
Lain-Lain (Belanja Tidak Tersangka)	31.7	1.7	3.6	3.2	3.5
Total	3797.5	3,859.4	3,786.9	4,655.7	5,454.8

Annex 4.

Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Pengeluaran (harga konstan 2006, menurut klasifikasi ekonomi, Rp miliar)

PROVINSI	2003	2004	2005	2006	2007
Belanja Pegawai	182.2	177.8	167.6	189.1	256.6
Belanja Barang dan Jasa	86.4	81.5	101.8	121.5	164.9
Belanja Perjalanan Dinas	49.1	41.0	44.6	56.6	76.9
Belanja Pemeliharaan	12.3	11.4	11.9	15.5	21.0
Belanja Lain-Lain / Bantuan Sosial	105.3	-	-	-	-
Belanja Modal / Pembangunan	85.6	63.5	81.8	114.2	155.0
Pengeluaran Tdk Termasuk Bagian Lain*	0.1	110.6	104.7	140.4	190.6
Total	520.9	485.8	512.5	637.3	864.9

KABUPATEN/KOTA	2003	2004	2005	2006	2007
	2003	2004	2005	2006	2007
Belanja Pegawai	1892.6	2,013.1	1,917.1	2,040.5	2,403.0
Belanja Barang dan Jasa	427.7	466.7	487.0	628.8	733.1
Belanja Perjalanan Dinas	177.9	181.2	190.3	245.7	291.0
Belanja Pemeliharaan	282.9	237.5	222.0	258.8	305.4
Belanja Lain-Lain / Bantuan Sosial	201.8	54.6	21.4	17.2	21.3
Belanja Modal / Pembangunan	780.8	686.1	666.7	1,132.7	1,317.8
Pengeluaran Tdk Termasuk Bagian Lain*	33.7	220.1	282.4	331.8	383.2
Total	3797.5	3,859.4	3,786.9	4,655.7	5,454.8

Belanja dekonsentrasi (harga konstan 2006, menurut bidang, Rp miliar)

PROVINSI	2003	2004	2005	2006	2007
Bidang Kesehatan	194.4	205.1	273.3	301.2	443.7
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	110.5	107.7	24.0	93.4	40.1
Bidang Lainnya	709.7	859.5	329.8	94.2	110.5
Total	1,014.7	1,172.3	627.1	488.8	594.4

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT Penerimaan 2003 (harga nominal, Rp juta)

	Provinsi NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Rote Ndao
PENERIMAAN NASLI DAERAH	94,332	15,717	19,570	5,346	4,810	11,687	10,252	9,166	9,360	10,003	8,729	20,672	8,373	8,819	3,393	1,263
Pos Pajak Daerah	52,440	9,207	1,490	606	637	1,753	922	1,139	1,464	1,183	1,528	1,736	709	1,329	769	75
Pos Retribusi Daerah	11,541	3,937	3,173	1,326	2,022	3,606	2,517	1,461	2,902	3,635	4,057	1,359	2,410	3,028	744	1,188
Pos Laba Perusahaan																
Milik Daerah	5,496	30	392	259	304	374	267	1,011	512	607	221	1,509	421	248	172	-
Pos Lain-lain Pendapatan																
Asli Daerah Yang Sah	24,854	2,544	14,515	3,156	1,848	5,954	6,545	5,555	4,482	4,577	2,922	16,068	4,832	4,213	1,708	-
DANA PERIMBANGAN	311,585	173,460	225,801	170,856	162,852	270,421	194,711	171,694	169,394	199,498	176,423	214,709	180,479	161,191	130,265	54,506
Pos Bagi Hasil Pajak	22,487	8,903	11,122	10,387	9,762	11,289	11,438	9,202	10,060	9,187	8,519	5,519	9,815	8,772	11,915	5,441
Pos Bagi Hasil Bukan																
Pajak Sumber Daya Alam	58	3	450	289	-	582	553	344	434	191	444	814	-	339	-	-
Pos Dana Alokasi Umum	283,040	158,754	203,030	149,780	146,690	247,849	174,020	155,448	153,700	180,520	160,660	197,980	164,664	146,480	111,550	39,850
Pos Dana Alokasi Khusus	6,000	5,800	11,200	10,400	6,400	10,700	8,700	6,700	5,200	9,600	6,800	10,396	6,000	5,600	6,800	9,215
Bagi Hasil Pajak dan																
Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dana																
Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGIAN LAIN-LAIN																
PENERIMAAN YANG SAH	8,810	640	15,418	10,034	10,447	3,347	10,087	9,437	10,440	9,197	39,838	12,975	-	9,710	5,718	7,363
Penerimaan Dari Pemerintah	8,810	-	13,668	8,444	9,448	-	7,980	7,692	8,998	8,405	10,529	11,650	-	8,344	-	-
Penerimaan Dari Provinsi	-	640	1,749	1,590	999	3,347	2,107	1,745	1,442	676	2,401	1,325	-	1,366	-	-
Penerimaan Dari																
Kabupaten/Kota Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,909	-	-	-	-	-
Bantuan Dana																
Kontingensi/Perseimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Adhoc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Dana Plikada																
dari APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	414,727	189,818	260,789	186,236	178,109	285,455	215,050	190,297	189,194	218,699	224,990	248,356	188,852	179,720	139,375	63,132

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Pengeluaran 2003 (harga nominal, menurut bidang, Rp juta)

	Provinsi NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembala	Rote Ndao
Administrasi Umum																
Pemerintahan	218,218	67,061	59,775	64,684	68,148	63,452	60,920	56,362	55,751	73,117	80,233	66,636	56,367	43,291	48,675	18,515
Pertanian	7,778	1,376	12,273	4,181	5,403	13,207	11,566	9,645	4,394	12,773	3,076	13,998	6,876	6,404	4,757	2,667
Perikanan dan Kelautan	6,559	56	2,024	1,389	3,968	1,517	3,581	2,510	2,151	1,899	2,238	1,052	1,276	1,859	1,356	517
Pertambangan dan Energi	5,907	65	8,550	950	-	2,195	1,254	4,195	1,794	1,354	1,213	860	-	-	1,289	815
Kehutanan dan Perkebunan	8,886	-	6,221	2,441	2,392	7,975	6,223	3,707	4,733	4,005	3,309	-	4,586	2,459	3,367	-
Perindustrian dan Perdagangan	5,313	902	2,004	1,677	653	1,772	511	1,793	1,070	1,492	1,983	1,191	3,348	1,865	3,243	829
Perkoperasian	2,645	151	1,412	-	796	1,305	2,658	1,915	997	2,473	1,646	4,678	884	912	1,013	840
Penanaman Modal	1,841	62	-	575	-	1,271	-	521	-	-	-	796	505	-	-	-
Ketengakerjaan	6,446	94	1,147	1,931	884	2,401	576	1,161	635	1,250	1,248	1,053	1,980	1,199	963	598
Kesehatan	39,712	6,246	15,686	20,185	12,061	25,345	16,123	17,498	12,859	19,038	16,369	7,973	12,950	23,963	10,313	3,265
Pendidikan dan Kebudayaan	23,968	69,111	84,805	48,491	54,479	130,873	61,840	47,694	56,277	74,329	63,488	71,352	63,663	55,219	36,744	21,933
Sosial	8,964	153	1,429	1,290	637	827	2,065	1,018	1,861	1,839	878	903	804	819	1,295	-
Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-
Permukiman	-	362	6,146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,447	-	-	-
Pekerjaan Umum	44,571	28,396	25,925	39,797	19,830	48,227	44,020	28,752	28,284	14,236	16,342	17,288	3,847	21,451	17,762	4,006
Perhubungan	6,279	1,692	4,025	1,738	845	3,505	5,182	1,578	2,264	1,651	1,540	1,478	8,204	1,709	1,685	801
Lingkungan Hidup	3,051	1,940	594	916	305	2,176	766	496	1,344	2,587	722	580	1,057	2,393	730	-
Kependudukan	-	146	1,469	-	714	1,012	645	619	15,407	1,120	758	778	644	1,226	636	-
Olah Raga	1,869	-	-	-	-	-	-	774	1,565	-	-	-	-	-	-	-
Kepariwisata	4,133	322	1,609	2,717	829	1,855	1,136	1,397	2,353	1,513	2,187	761	1,160	1,002	-	-
Pertanahan	-	-	-	187	2,247	-	-	142	286	-	-	-	140	-	-	-
Lain-Lain																
(Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan)	-	-	12,749	-	-	-	-	-	6,887	-	-	18,197	-	14,220	-	-
Lain-Lain																
(Belanja Tidak Tersangka)	-	-	3,612	-	-	20,458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	396,140	178,134	251,457	193,150	174,191	329,372	219,066	181,778	200,913	214,677	197,230	209,575	169,749	179,991	133,829	54,785

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Pengeluaran 2003 (harga nominal, menurut klasifikasi ekonomi, Rp juta)

	Provinsi NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Role Ndao
Belanja Pegawai	138,532	102,565	145,779	96,682	93,517	144,280	108,998	74,473	78,885	126,619	113,562	97,378	91,405	86,906	51,657	26,586
Belanja Barang dan Jasa	65,681	17,275	17,234	15,834	10,245	43,048	23,165	25,906	39,754	24,584	18,475	16,434	16,847	30,838	20,582	5,015
Belanja Perjalanan Dinas	37,327	2,621	22,128	10,138	6,486	12,488	5,336	4,859	12,900	13,938	9,225	9,059	7,068	8,726	8,024	2,330
Belanja Pemeliharaan	9,330	7,540	24,609	11,180	7,027	26,573	19,227	11,081	6,821	12,622	20,230	31,613	11,802	14,948	5,538	4,356
Belanja Lain-Lain /																
Bantuan Sosial	80,062	8,406	4,428	9,578	15,973	20,458	15,409	6,801	6,276	6,028	-	16,858	16,413	14,220	9,990	2,597
Belanja Modal /																
Pembangunan	65,094	38,391	25,204	49,687	38,093	82,526	44,430	57,171	55,567	29,613	35,739	36,894	24,368	24,353	37,859	13,901
Pengeluaran Tdk																
Termasuk Bagian Lain*	112	1,335	12,076	50	2,850	-	2,500	1,486	710	1,275	-	1,340	1,846	-	178	-
TOTAL	396,140	178,134	251,457	193,150	174,191	329,372	219,066	181,778	200,913	214,677	197,230	209,575	169,749	179,991	133,829	54,785

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Penerimaan 2003 (harga nominal, Rp juta)

	Provinsi NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Rote Ndao	Manggarai Barat
PENERIMAAN ASLI DAERAH	123,690	35,662	20,364	7,616	7,484	11,508	11,359	11,716	11,010	9,755	9,435	22,998	9,156	8,454	5,055	3,531	1,782
Pos Pajak Daerah	76,779	5,089	2,832	530	796	1,609	1,082	1,655	1,295	1,272	2,107	1,693	1,092	1,555	1,234	288	371
Pos Retribusi Daerah	16,681	5,296	3,931	1,754	2,283	4,761	3,623	2,196	3,772	4,079	4,420	1,893	3,096	3,207	1,561	1,093	429
Pos Laba Perusahaan																	
Milik Daerah	8,895	268	554	393	506	385	438	1,160	1,357	665	357	4,467	576	434	268	18	-
Pos Lain-lain Pendapatan																	
Asli Daerah Yang Sah	21,336	25,010	13,048	4,938	3,899	4,752	6,214	6,705	4,586	3,738	2,551	14,945	4,392	3,258	1,992	2,132	982
DANA PERIMBANGAN	333,935	169,895	237,865	177,411	168,684	197,748	206,141	186,008	178,620	211,123	185,994	234,103	179,039	173,004	142,094	101,496	79,707
Pos Bagi Hasil Pajak	28,407	11,882	12,248	11,588	10,622	13,071	13,027	12,365	10,316	14,616	10,651	12,813	10,932	10,252	12,260	6,683	9,861
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	54	1	696	430	-	1,020	570	544	426	-	430	594	-	487	-	-	-
Pos Dana Alokasi Umum	305,474	150,982	216,751	157,163	150,222	173,147	182,594	162,358	159,338	186,697	165,323	211,456	158,237	153,290	121,234	89,314	65,846
Pos Dana Alokasi Khusus	-	7,030	8,170	8,230	7,840	10,510	9,950	10,740	8,540	9,810	9,590	9,240	9,870	8,975	8,600	5,500	4,000
Bagi Hasil Pajak dan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGIAN LAIN-LAIN																	
PENERIMAAN YANG SAH	10,012	10,249	2,509	11,170	11,001	14,248	13,416	10,163	15,782	14,178	17,833	4,542	12,952	13,118	3,966	9,154	2,765
Penerimaan Dari Pemerintah	10,012	6,575	-	-	10,344	10,628	9,581	7,313	3,007	9,479	-	-	9,092	10,202	-	1,862	-
Penerimaan Dari Provinsi	-	3,674	2,509	3,169	656	3,620	3,836	2,850	12,775	2,258	1,393	2,093	3,860	2,917	-	2,292	-
Penerimaan Dari Kabupaten/Kota Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,351	-	-	-	-	5,000	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,089	-	-	-	-	-	-
Bantuan Dana Kontingensi/Penyeimbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Adhoc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Dana Pilkada dari APBN Lain-Lain	-	-	-	8,001	-	-	-	-	-	-	-	2,449	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	467,638	215,806	260,739	196,198	187,169	223,504	230,916	207,886	205,412	235,056	213,263	261,643	201,148	194,576	151,115	114,182	84,254

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT Pengeluaran 2004 (harga nominal, menurut bidang, Rp juta)

	Prov NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Rote Ndao	Manggarai Barat
Administrasi Umum																
Pemerintahan	202,745	76,841	94,354	65,595	54,065	69,612	56,976	73,342	74,289	87,162	92,054	66,213	65,573	50,804	40,175	30,652
Pertanian	18,828	1,586	9,582	6,990	7,202	8,540	9,870	4,394	13,083	3,845	9,749	7,862	5,898	3,876	5,221	2,204
Perikanan dan Kelautan	6,799	226	1,879	1,076	8,329	2,225	3,473	2,151	2,082	2,392	2,252	2,328	2,887	2,040	1,554	356
Pertambangan dan Energi	4,537	149	14,301	1,035	-	1,213	1,424	1,794	1,054	864	1,126	-	-	2,515	913	515
Kehutanan dan Perkebunan	9,538	-	6,215	2,760	3,097	5,613	5,502	4,733	3,150	3,466	-	5,136	1,892	2,654	-	-
Perindustrian dan Perdagangan	5,434	1,026	1,614	1,851	796	1,419	2,062	1,070	1,336	1,864	1,456	2,511	1,244	2,900	922	901
Perkoperasian	2,606	248	1,230	-	779	1,022	2,748	997	1,935	1,235	4,680	1,005	991	772	877	-
Penanaman Modal	1,902	328	-	1,022	-	624	712	-	-	-	763	606	-	-	372	-
Ketenagakerjaan	6,029	208	1,121	2,060	606	3,584	518	628	1,061	1,401	1,115	1,469	1,432	816	874	517
Kesehatan	42,332	7,293	16,686	19,360	11,981	20,214	17,141	12,859	21,401	29,283	10,929	14,699	22,387	12,213	6,586	5,792
Pendidikan dan Kebudayaan	25,992	72,797	96,395	53,589	59,348	90,493	65,716	57,044	80,409	78,840	85,630	70,320	60,951	34,233	25,460	27,519
Sosial	8,534	175	1,298	1,618	676	803	2,264	1,861	1,357	1,046	940	764	996	1,190	-	-
Penataan Ruang	-	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perumahan	-	29,308	6,386	-	-	-	-	-	-	11,153	14,297	12,588	16,272	-	-	-
Pekerjaan Umum	41,394	951	13,807	20,967	16,313	14,114	36,289	28,284	19,260	-	6,542	18,952	-	26,144	6,462	12,218
Perhubungan	4,934	1,389	2,661	3,571	993	2,276	3,483	2,264	2,881	1,132	1,589	1,085	4,149	2,883	1,065	669
Lingkungan Hidup	2,627	2,476	661	1,074	610	1,907	785	1,344	2,683	833	707	1,086	2,172	852	840	-
Kependudukan	-	1,907	4,094	2,032	2,333	2,663	2,271	2,607	3,635	2,849	3,852	1,036	1,061	1,277	956	218
Olah Raga	1,813	-	-	-	-	-	794	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepariwisata	3,497	339	1,241	2,206	1,263	1,089	1,222	2,353	1,430	1,377	888	2,777	1,052	-	986	-
Pertanian Lain-Lain (Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan)	-	-	-	352	-	-	614	286	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain (Belanja Tidak Tersangka)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	389,542	197,543	273,525	187,157	181,400	227,409	200,556	198,013	231,047	228,742	238,570	210,437	188,956	145,170	93,264	81,561

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Pengeluaran 2004 (harga nominal, menurut klasifikasi ekonomi, Rp juta)

	Prov NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Rote Ndao	Manggarai Barat
Belanja Pegawai	142,557	113,949	162,932	110,175	103,206	130,703	104,196	84,655	90,436	127,849	108,144	139,757	106,545	97,375	59,366	40,090	34,975
Belanja Barang dan Jasa	65,381	23,606	27,855	15,880	14,962	29,201	24,013	31,296	39,282	26,658	23,168	25,122	20,283	31,405	21,199	10,042	10,316
Belanja Perjalanan Dinas	32,843	2,876	13,490	8,963	7,904	12,707	5,999	6,717	11,742	17,753	12,942	10,022	11,535	7,702	7,046	4,702	3,220
Belanja Pemeliharaan	9,127	6,886	26,350	11,019	3,083	3,890	18,869	15,750	9,238	12,618	26,015	13,373	11,540	15,111	7,875	7,336	1,519
Belanja Lain-Lain / Bantuan Sosial	-	35	-	-	11,665	-	-	-	-	6,269	-	-	-	-	12,800	-	13,011
Belanja Modal / Pembangunan	50,944	36,940	27,520	31,482	39,235	36,619	41,955	55,330	40,468	38,459	43,606	19,907	38,801	19,801	34,803	26,720	18,513
Pengeluaran Tdk Termasuk Bagian Lain*	88,690	13,252	15,376	9,639	1,345	14,289	16,484	6,808	6,848	1,441	14,866	30,389	21,732	17,562	2,082	4,374	8
Total	389,542	197,543	273,525	187,157	181,400	227,409	211,515	200,556	198,013	231,047	228,742	238,570	210,437	188,956	145,170	93,264	81,561

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT Penerimaan 2005 (harga nominal, Rp juta)

	Provinsi NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembala	Rote Ndao	Manggarai Barat
PENERIMAAN ASLI DAERAH	140,649	19,122	17,320	6,374	5,849	10,267	12,907	10,727	9,183	10,899	12,118	14,633	9,553	10,749	4,595	6,636	3,073
Pos Pajak Daerah	85,549	6,148	2,339	664	745	2,098	1,227	1,834	1,308	1,914	1,761	1,193	1,029	1,363	939	487	575
Pos Retribusi Daerah	19,963	5,874	3,242	1,794	3,205	4,589	4,076	2,706	3,851	4,904	5,901	1,731	3,730	6,308	1,506	1,618	688
Pos Laba Perusahaan																	
Milik Daerah	13,433	50	646	849	416	430	1,084	1,039	1,035	529	374	788	537	473	418	84	14
Pos Lain-lain Pendapatan																	
Asli Daerah Yang Sah	21,704	7,050	11,092	3,068	1,483	3,150	6,519	5,148	2,989	3,552	4,081	10,922	4,257	2,605	1,732	4,447	1,797
DANA PERIMBANGAN	349,951	182,896	242,262	186,643	183,550	236,717	218,649	193,836	179,458	226,642	193,727	247,551	190,174	186,310	151,401	133,303	95,260
Pos Bagi Hasil Pajak	44,440	14,485	15,889	14,338	16,029	15,644	17,584	17,175	13,524	18,086	12,920	15,012	14,385	12,871	10,684	8,242	9,172
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	37	98	326	320	-	492	327	326	324	-	344	326	242	263	-	6	485
Pos Dana Alokasi Umum	305,474	159,274	211,747	158,095	154,291	206,161	186,467	164,704	153,700	194,596	166,722	213,553	161,677	161,536	128,017	109,535	75,462
Pos Dana Alokasi Khusus	-	9,040	14,300	13,890	13,230	14,420	14,270	11,630	11,910	13,960	13,740	18,660	13,870	11,640	12,700	15,520	10,140
Bagi Hasil Pajak dan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	7,645	12,831	12,942	10,467	12,940	20,230	18,641	11,859	4,929	10,407	9,947	13,280	10,840	11,785	6,145	3,558	7,476
Penerimaan Dari Pemerintah	7,645	7,064	9,236	7,371	-	10,694	15,894	9,444	2,432	-	-	9,419	7,985	-	4,631	2,185	6,032
Penerimaan Dari Provinsi	-	5,767	3,697	3,096	-	3,569	2,747	2,416	2,497	-	9,947	2,227	2,855	5,708	1,514	1,373	1,444
Penerimaan Dari Kabupaten/Kota Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,077	-	-	-
Bantuan Dana Kontingensi/Periyimbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Adhoc dari APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	-	-	9	-	-	5,968	-	-	-	-	-	1,634	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	498,245	214,848	272,523	203,485	202,339	267,215	250,196	216,422	193,570	247,948	215,791	275,464	210,566	208,845	162,141	143,496	105,808

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT Pengeluaran 2005 (harga nominal, menurut bidang, Rp juta)

	Prov NTT	Kola Kumpang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Rote Ndao	Manggarai Barat
Administrasi Umum																
Pemerintahan	217,349	81,941	91,472	72,071	52,363	71,818	66,147	57,482	72,992	80,317	98,658	71,996	70,562	52,123	46,959	31,422
Pertanian	20,804	1,757	8,871	7,863	4,795	12,043	10,865	4,139	12,077	5,683	9,817	8,117	6,856	5,045	6,388	3,701
Perikanan dan Kelautan	7,866	1,375	4,926	2,271	8,969	2,930	2,939	3,056	2,133	2,304	2,694	3,430	2,686	2,831	3,199	1,731
Pertambangan dan Energi	6,340	556	4,213	982	-	1,344	987	878	1,259	1,209	884	131	-	1,105	2,578	1,130
Kehutanan dan Perkebunan	10,536	-	8,301	2,791	2,601	5,665	6,004	4,158	2,884	3,346	-	4,272	2,099	3,264	-	-
Perindustrian dan Perdagangan	4,625	1,184	1,553	1,549	848	1,972	443	1,007	1,613	1,720	1,233	1,907	1,820	2,133	1,743	657
Perkerasan	3,490	373	1,360	-	821	1,288	2,734	860	1,858	1,542	1,548	874	1,023	1,012	1,429	-
Penanaman Modal	2,470	271	-	809	-	691	-	-	-	-	922	492	-	-	1,258	-
Ketenagakerjaan	6,247	266	1,292	2,013	811	1,833	554	969	1,051	2,098	1,204	2,327	1,890	1,063	515	995
Kesehatan	46,082	9,071	17,667	22,382	18,925	20,654	16,956	12,810	23,314	18,320	8,459	16,198	23,354	16,807	10,475	9,839
Pendidikan dan Kebudayaan	30,275	73,186	105,960	58,071	66,915	92,837	68,762	57,426	85,486	74,837	95,602	69,365	66,477	38,381	32,520	36,650
Sosial	12,586	314	1,331	1,353	714	799	2,308	932	1,170	1,307	764	698	856	1,583	-	-
Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-
Permukiman	-	570	5,989	-	-	-	34,038	-	-	14,010	-	7,214	-	-	-	-
Pekerjaan Umum	61,736	41,380	14,049	15,937	10,110	33,977	36,081	49,580	16,502	-	17,237	7,113	11,981	30,184	13,141	10,533
Perhubungan	4,741	1,857	2,430	1,278	1,230	2,275	5,469	2,532	2,876	2,127	1,244	22,408	2,191	5,094	1,851	1,612
Lingkungan Hidup	3,104	3,729	900	931	640	2,993	809	1,146	3,189	1,362	710	913	3,109	923	1,006	-
Kependudukan	-	550	3,602	-	2,968	2,172	2,302	9,151	3,753	1,956	2,552	1,994	3,791	1,509	1,592	1,105
Olah Raga	2,328	-	-	-	-	-	798	732	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepariwisata	4,395	385	1,363	1,552	1,160	2,329	1,468	1,941	1,482	1,394	2,060	2,643	1,242	-	1,311	-
Pertanian Lain-Lain (Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan)	-	-	-	-	-	-	425	204	-	-	-	141	-	-	-	-
Lain-Lain (Belanja Tidak Tersangka)	-	-	-	-	14,578	-	-	-	4,069	-	-	-	-	-	-	7,286
Total	444,975	218,765	275,282	191,854	191,560	257,619	224,829	209,006	237,708	213,532	245,589	222,316	199,938	163,055	125,966	106,660

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT Pengeluaran 2005 (harga nominal, menurut klasifikasi ekonomi, Rp juta)

	Prov NTT	Kola Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Role Ndao	Manggarai Barat
Belanja Pegawai	145,542	118,121	162,828	104,425	107,267	132,966	104,922	86,251	93,291	142,984	110,109	144,654	104,787	98,582	61,831	46,270	45,349
Belanja Barang dan Jasa	88,417	25,042	31,795	17,799	20,543	26,994	28,671	27,797	29,366	34,190	27,840	16,354	21,203	38,373	28,778	17,483	30,683
Belanja Perjalanan Dinas	38,758	4,398	14,620	10,864	7,499	14,236	8,168	8,213	10,882	16,487	15,648	13,307	11,636	8,386	8,438	7,083	5,361
Belanja Pemeliharaan	10,329	11,065	28,247	9,637	5,345	11,404	5,235	14,344	9,307	11,095	18,879	14,196	11,882	11,620	11,054	15,270	4,228
Belanja Lain-Lain/																	
Bantuan Sosial	-	-	-	-	14,578	118	-	-	-	3,923	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal/																	
Pembangunan	70,997	46,944	22,857	29,017	33,214	47,517	53,262	52,090	57,536	28,883	26,420	27,425	44,927	18,702	40,640	35,691	13,754
Pengeluaran Tdk																	
Termasuk Bagian Lain*	90,932	13,194	14,935	20,112	3,114	24,384	24,572	15,905	8,625	147	14,636	29,653	27,881	24,274	12,315	4,169	7,286
Total	444,975	218,765	275,282	191,854	191,560	257,619	224,829	204,600	209,006	237,708	213,532	245,589	222,316	199,938	163,055	125,966	106,660

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Penerimaan 2006 (harga nominal, Rp juta)

	Provinsi NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembala	Rote Ndao	Manggarai Barat
PENERIMAAN ASLI DAERAH	175,952	25,253	14,980	9,956	9,874	17,328	17,029	19,427	12,959	14,812	14,931	22,941	15,510	19,479	9,099	8,758	7,169
Pos Pajak Daerah	101,616	6,685	2,839	759	957	3,173	1,395	4,080	1,594	2,296	2,122	1,130	1,526	1,727	922	954	1,368
Pos Retribusi Daerah	27,075	6,178	4,548	2,526	4,635	5,504	5,655	4,875	7,290	6,072	7,294	1,912	7,146	13,670	5,309	1,667	1,831
Pos Laba Perusahaan																	
Milik Daerah	10,500	1,803	606	555	780	342	952	1,575	687	597	465	1,705	364	560	683	292	189
Pos Lain-lain																	
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36,761	10,586	6,987	6,116	3,503	8,309	9,028	8,897	3,388	5,847	5,049	18,194	6,474	3,523	2,184	5,845	3,782
DANA PERIMBANGAN	528,149	302,360	385,038	285,006	294,574	377,723	319,853	310,981	273,324	347,574	298,628	369,074	300,926	292,540	203,103	207,637	236,751
Pos Bagi Hasil Pajak	48,713	17,474	17,562	12,147	6,617	19,888	18,821	17,447	15,414	15,601	15,377	15,457	15,844	14,372	13,975	14,782	11,865
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	-	-	263	4,122	13,473	377	346	410	-	137	339	309	-	318	-	71	264
Pos Dana Alokasi Umum	479,436	260,636	325,363	239,558	246,374	322,608	272,806	261,404	229,500	303,447	253,522	320,237	252,052	247,890	166,668	161,078	186,832
Pos Dana Alokasi Khusus	-	24,250	41,850	29,180	28,110	34,850	27,880	31,720	28,410	28,390	29,390	33,070	33,030	29,960	22,460	31,705	37,790
Bagi Hasil Pajak dan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH	-	13,749	5,064	6,522	5,123	6,132	10,251	5,309	3,727	12,557	4,733	8,710	4,686	10,159	3,903	3,047	7,275
Penerimaan Dari Pemerintah	-	-	88	-	-	-	-	-	-	1,032	-	2,749	-	5,386	-	-	3,356
Penerimaan Dari Provinsi	-	11,000	5,064	6,433	5,123	6,132	7,254	5,309	3,727	6,037	4,733	5,652	4,686	4,774	3,903	3,047	3,919
Penerimaan Dari Kabupaten/Kota Lainnya	-	-	-	-	-	-	2,997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,383	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Dana Kontingensi/Periyimbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Adhoc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Dana Pilkada dari APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	-	2,749	-	-	-	-	-	-	-	2,105	-	310	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	704,101	341,362	405,083	301,484	309,572	401,183	347,134	335,717	290,011	374,943	318,292	400,725	321,123	322,179	216,105	219,442	251,195

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Pengeluaran 2006 (harga nominal, menurut bidang, Rp juta)

	Prov NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Rote Ndao	Manggarai Barat
Administrasi Umum																	
Pemerintahan	298,459	109,527	118,120	94,930	97,721	91,536	94,421	81,729	96,307	98,768	98,180	132,948	95,782	111,156	80,159	70,532	55,218
Pertanian	24,404	4,644	13,724	13,624	8,449	18,507	18,750	17,041	8,905	16,640	9,556	12,107	14,720	10,018	7,409	11,366	7,393
Perikanan dan Kelautan	8,804	2,598	5,593	3,587	6,409	5,901	3,978	4,304	5,218	4,115	3,794	4,138	3,552	5,789	3,838	3,677	5,888
Pertambangan dan Energi	4,524	1,094	5,050	2,247	-	2,289	3,316	3,822	1,596	2,424	1,530	3,153	1,464	-	4,595	3,657	2,868
Kehutanan dan Perkebunan	14,911	-	7,344	3,328	4,150	7,169	9,671	7,087	6,085	4,501	4,724	-	6,716	3,435	3,048	-	-
Perindustrian dan Perdagangan	6,659	2,075	2,194	2,087	1,512	1,809	748	1,969	1,931	2,475	2,227	2,454	1,840	1,765	1,686	1,499	2,271
Perkoperasian	4,430	500	1,847	-	2,618	1,650	1,894	1,911	1,370	2,794	2,042	1,759	1,410	1,535	1,153	859	-
Penanaman Modal	2,927	333	-	1,769	-	827	-	606	-	-	-	-	847	-	-	1,385	-
Ketenagakerjaan	7,728	345	1,404	2,823	3,439	3,579	892	4,486	1,166	1,785	2,625	1,928	2,325	2,377	885	910	2,604
Kesehatan	72,928	16,176	26,528	30,353	30,144	33,114	23,248	29,706	24,218	33,505	33,390	8,241	24,764	46,034	21,181	16,077	25,261
Pendidikan dan Kebudayaan	47,654	90,343	132,740	69,224	83,665	119,208	92,281	77,568	67,412	106,224	94,619	117,764	87,105	81,857	45,407	41,310	59,833
Sosial	14,765	368	1,445	1,978	1,010	1,570	2,946	1,331	2,403	2,231	1,925	-	1,243	1,314	1,744	-	-
Penataan Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,076	-	-	-	-
Perumahan	-	766	8,040	-	-	-	-	56,484	-	-	22,240	-	8,761	-	-	-	-
Pekerjaan Umum	107,820	65,567	36,941	31,049	23,487	80,913	50,214	34,954	36,758	-	-	26,797	9,662	31,969	21,331	31,403	63,714
Perhubungan	7,505	2,665	1,685	2,281	3,892	4,815	9,152	1,929	3,602	3,550	1,510	1,378	31,981	2,903	6,003	2,052	5,970
Lingkungan Hidup	3,794	4,825	1,924	2,497	-	4,806	1,073	1,790	1,898	5,114	1,763	1,493	1,712	3,950	1,571	2,256	-
Kependudukan	-	1,629	5,195	-	-	5,046	2,553	2,955	11,326	7,703	3,483	2,564	3,255	4,914	1,777	1,944	2,225
Olah Raga	4,111	-	-	-	-	-	-	1,106	690	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepariwisata	5,870	847	2,015	2,421	-	2,433	1,780	1,706	2,705	1,905	1,719	2,163	2,659	1,745	-	2,222	-
Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	584	141	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain (Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain (Belanja Tidak Tersangka)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	637,291	304,299	371,790	264,199	266,496	385,173	316,917	298,116	271,926	330,494	285,326	318,889	301,873	310,761	201,788	191,149	236,469

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Pengeluaran 2006 (harga nominal, menurut klasifikasi ekonomi, Rp juta)

	Prov NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Role Ndao	Manggarai Barat
Belanja Pegawai	189,102	141,231	194,031	122,477	133,309	165,752	130,195	107,947	113,261	174,711	135,151	176,424	131,882	125,358	74,942	55,700	58,152
Belanja Barang dan Jasa	121,491	44,215	45,189	37,661	23,863	36,197	45,979	45,339	46,004	48,772	42,279	21,967	29,613	47,174	30,993	30,650	52,891
Belanja Perjalanan Dinas	56,637	7,946	17,360	18,592	11,070	17,878	9,601	11,347	17,750	25,008	23,308	19,648	20,054	11,411	12,303	11,004	11,424
Belanja Pemeliharaan	15,461	17,146	34,961	16,035	6,107	4,922	5,062	27,588	10,492	14,054	19,697	15,752	22,348	28,656	13,700	16,367	5,954
Belanja Lain-Lain/																	
Bantuan Sosial	-	16,310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917	-
Belanja Modal /																	
Pembangunan	114,179	76,862	48,219	52,130	54,543	137,644	104,822	97,392	64,069	61,814	46,866	52,676	64,176	55,799	37,982	72,928	104,823
Pengeluaran Tdk																	
Termasuk Bagian Lain*	140,421	591	32,030	17,304	37,604	22,779	21,258	8,503	20,350	6,135	18,025	32,422	33,800	42,363	31,868	3,581	3,225
Total	637,291	304,299	371,790	264,199	266,496	385,173	316,917	298,116	271,926	330,494	285,326	318,889	301,873	310,761	201,788	191,149	236,469

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT Penerimaan 2007 (harga nominal, Rp juta)

	Provinsi NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Role Ndao	Manggarai Barat
PENERIMAAN ASLI DAERAH	200,165	24,077	20,855	14,444	13,359	17,062	22,134	14,242	13,273	17,300	14,500	11,605	15,895	20,640	9,890	11,100	9,501
Pos Pajak Daerah	120,172	7,561	2,397	877	1,216	3,611	1,558	2,879	1,678	3,256	2,092	1,115	2,038	1,974	1,207	3,451	2,220
Pos Retribusi Daerah	33,828	7,353	4,304	2,688	4,644	5,195	7,574	4,947	4,045	6,680	8,057	1,738	5,853	14,153	5,582	2,145	2,495
Pos Laba Perusahaan																	
Milik Daerah	14,636	3,699	599	-	1,060	536	3,416	820	1,266	1,205	405	1,788	372	639	496	552	292
Pos Lain-lain Pendapatan																	
Asli Daerah Yang Sah	31,529	5,465	13,556	10,879	6,439	7,719	9,586	5,597	6,284	6,159	3,946	6,964	7,632	3,873	2,604	4,953	4,494
DANA PERIMBANGAN	594,172	320,967	418,138	317,066	335,925	424,522	366,828	356,777	311,611	411,701	340,085	444,726	342,756	337,312	246,362	231,781	270,006
Pos Bagi Hasil Pajak	40,583	10,963	17,034	13,893	17,571	23,456	17,015	13,833	10,237	21,428	14,307	3,629	11,754	13,363	10,372	9,082	14,512
Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pos Dana Alokasi Umum	553,589	277,705	355,802	258,755	271,659	348,963	302,572	293,655	256,249	344,589	278,452	382,802	278,275	279,124	188,170	182,910	206,094
Pos Dana Alokasi Khusus	-	32,299	45,302	44,418	46,695	52,103	47,241	49,289	45,125	45,684	47,326	58,295	52,727	44,825	47,820	39,789	49,400
Bagi Hasil Pajak dan Keuangan dari Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAGIAN LAIN-LAIN																	
PENERIMAAN YANG SAH	-	28,630	21,492	4,953	4,763	43,785	8,274	-	14,838	3,499	37,081	13,266	35,054	9,368	4,292	866	9,655
Penerimaan Dari Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dari Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Dari Kabupaten/Kota Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Dana Kontingensi/Penyimbang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dana Penyesuaian Adhoc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Dana Plikada dari APBN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	794,337	373,675	460,485	336,463	354,047	485,369	397,236	371,019	339,722	432,500	391,666	469,597	393,705	367,321	260,544	243,747	289,162

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT Pengeluaran 2007 (harga nominal, menurut bidang, Rp juta)

	Prov NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Rote Ndao	Manggarai Barat
Administrasi Umum																
Pemerintahan	372,965	156,183	158,693	152,367	88,300	129,550	119,266	116,145	124,248	142,541	189,300	122,434	132,523	96,115	91,618	65,652
Pertanian	42,768	7,276	25,645	18,103	7,208	22,449	24,560	10,739	20,933	13,873	17,239	18,815	11,944	8,884	14,764	8,790
Perikanan dan Kelautan	10,453	3,976	6,988	5,828	6,122	4,573	5,835	6,292	5,177	5,509	5,892	4,540	6,902	4,602	4,776	7,001
Pertambangan dan Energi	5,294	1,159	5,524	2,502	-	2,414	4,096	1,925	3,050	2,221	4,489	1,872	-	5,510	4,750	3,410
Kehutanan dan Perkebunan	8,079	-	5,085	3,721	5,749	5,329	3,879	7,339	5,663	6,859	-	8,585	4,095	3,655	-	-
Perindustrian dan Perdagangan	8,079	2,401	2,902	3,759	2,413	2,050	2,733	2,328	3,114	3,234	3,495	2,352	2,105	2,022	1,948	2,701
Perkoperasian	5,390	564	2,407	-	1,405	1,774	2,026	1,653	3,515	2,964	2,505	1,803	1,830	1,383	1,116	-
Penanaman Modal	3,096	307	-	1,986	-	1,233	729	-	-	-	-	1,082	-	-	1,799	-
Ketenagakerjaan	12,922	314	1,538	4,591	3,280	7,809	3,695	1,406	2,245	3,811	2,745	2,971	2,833	1,061	1,182	3,097
Kesehatan	113,486	23,228	33,462	36,346	29,878	43,555	37,841	29,206	42,148	48,477	11,734	31,655	54,883	25,397	20,883	30,034
Pendidikan dan Kebudayaan	52,741	130,992	158,385	91,648	73,694	149,154	89,737	81,297	133,628	137,371	167,680	111,343	97,591	54,446	53,659	71,139
Sosial	15,810	485	2,414	3,087	1,064	1,584	1,950	2,898	2,807	2,795	-	1,589	1,567	2,091	-	-
Penataan Ruang	8,401	4,616	16,601	8,331	4,475	3,448	4,651	-	-	-	-	2,653	-	-	-	-
Perumahan	-	1,103	12,713	-	-	-	-	-	-	32,289	-	11,199	-	-	-	-
Pekerjaan Umum	261,557	66,543	34,190	54,027	54,785	121,878	56,974	42,154	46,241	-	38,156	12,351	38,114	25,577	40,791	75,754
Perhubungan	10,687	3,104	2,569	3,029	7,106	5,441	2,292	4,344	4,466	2,192	1,963	40,880	3,462	7,198	2,666	7,098
Lingkungan Hidup	5,489	6,472	3,114	2,764	-	3,089	2,649	2,289	6,434	2,560	2,126	2,188	4,710	1,884	2,931	-
Kependudukan	-	3,508	10,422	2,624	-	5,441	3,274	13,659	9,690	5,056	3,651	4,161	5,858	2,130	2,526	2,645
Olah Raga	5,921	-	-	-	-	-	1,713	832	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepariwisata	5,769	622	2,519	3,368	-	2,259	1,877	3,262	2,396	2,495	3,080	3,398	2,080	-	2,886	-
Pertanian Lain-Lain (Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil & Bantuan Keuangan Lain-Lain (Belanja Tidak Tersangka)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	948,907	412,852	485,173	397,780	285,481	513,030	367,252	327,938	415,754	414,247	454,053	385,870	370,496	241,955	248,293	281,152

Annex 4. Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Pengeluaran 2007 (harga nominal, menurut klasifikasi ekonomi, Rp juta)

	Prov NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Rote Ndao	Manggarai Barat
Belanja Pegawai	281,567	191,612	253,204	184,402	142,806	220,773	157,575	132,981	136,590	219,783	196,217	251,204	168,578	149,454	89,860	72,352	69,141
Belanja Barang dan Jasa	180,896	59,987	58,971	56,703	25,563	48,213	55,648	55,854	55,481	61,354	61,382	31,277	37,853	56,242	37,162	39,813	62,885
Belanja Perjalanan Dinas	84,330	10,780	22,654	27,992	11,858	23,813	11,620	13,979	21,406	31,460	33,839	27,976	25,635	13,605	14,752	14,294	13,583
Belanja Pemeliharaan	23,021	23,262	45,623	24,142	6,542	6,556	6,127	33,986	12,653	17,680	28,597	22,429	28,566	34,164	16,427	21,260	7,079
Belanja Lain-Lain/																	
Bantuan Sosial	-	22,128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,192	-
Belanja Modal /																	
Pembangunan	170,009	104,281	62,924	78,488	58,429	183,335	126,866	119,978	77,267	77,761	68,042	75,003	82,034	66,524	45,543	94,730	124,630
Pengeluaran Tdk																	
Termasuk Bagian Lain*	209,083	802	41,798	26,053	40,283	30,340	25,729	10,475	24,542	7,717	26,169	46,164	43,205	50,506	38,211	4,652	3,834
Total	948,907	412,852	485,173	397,780	285,481	513,030	383,564	367,252	327,938	415,754	414,247	454,053	385,870	370,496	241,955	248,293	281,152

Annex 4.

Data Anggaran Pemerintah Daerah NTT

Annex NTT

Penerimaan 2008 (perkiraan, harga nominal, Rp juta)

	Prov NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu
Pos Dana Alokasi Umum	616,602	313,888	389,485	285,797	290,057	382,535	82,809	324,935	284,633	379,987
Pos Dana Alokasi Khusus	42,576	38,658	60,063	56,162	62,036	65,116	55,977	58,467	58,048	57,297
TOTAL PENERIMAAN	921,233	416,141	492,420	363,083	368,464	489,749	106,655	413,803	363,949	473,990

	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Rote Ndao	Manggarai Barat	Nagekeo	Sumba Barat Daya	
Pos Dana Alokasi Umum	307,599	401,642	164,114	302,338	213,795	199,093	239,246	147,783	154,877	
Pos Dana Alokasi Khusus	57,368	72,708	64,827	55,204	53,554	51,184	58,402	15,508	13,151	
TOTAL PENERIMAAN	409,461	501,523	212,704	389,315	277,620	267,877	327,104	220,795	199,221	

Annex NTT

Penerimaan 2009 (perkiraan, harga nominal, Rp juta)

	Prov NTT	Kota Kupang	TTS	TTU	Flores Timur	Manggarai	Sumba Barat	Sumba Timur	Alor	Belu
Pos Dana Alokasi Umum	652,757	329,008	395,751	289,200	324,837	232,282	221,035	337,429	295,940	384,891
Pos Dana Alokasi Khusus	59,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	975,250	436,187	500,343	367,407	412,646	297,384	284,685	429,715	378,408	480,107

	Ende	Kupang	Ngada	Sikka	Lembata	Rote Ndao	Manggarai Barat	Nagekeo	Manggarai Timur	Sumba Barat Daya
Pos Dana Alokasi Umum	322,462	412,510	240,094	311,878	223,447	207,118	247,347	211,196	171,327	223,988
Pos Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	429,246	515,093	311,180	401,599	290,153	278,674	338,179	315,536	220,381	334,649